



# PANCASILA

MUCHAMMAD HELMI UMAM  
WIWIK SETIYANI  
ANI SOECIPTO



# PANCASILA





# PANCASILA



**RAJAWALI**  
**BUANA PUSAKA**

NOVEMBER 1, 2019  
UINSA, KPPPA

# PANCASILA

---

**Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**ISBN 978-623-7787-24-2**

xx, 150 hlm. ; 20,5 cm.

Cetakan ke 1, November 2020

**Editor**

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah  
Rochimah

**Penulis**

Muchammad Helmi Umam  
Wiwik Setiyani  
Ani Soecipto

**Desain Sampul**

Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka

**Penerbit**

**PT Rajawali Buana Pusaka**

**Depok**

**Telp: (021) 868-65632**

**e-mail: [rajawalibuanapusaka@gmail.com](mailto:rajawalibuanapusaka@gmail.com)**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam  
bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit.



# Sambutan

## Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Buku ajar berperspektif gender merupakan salah satu ikhtiar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk secara terus-menerus mengadvokasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai ranah, terutama pendidikan. Pendidikan dalam semua level, termasuk pendidikan tinggi, harus menjadi tonggak penyemaian ide dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Gender menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan. Pembangunan dianggap berhasil jika tidak mengabaikan aspek gender. Oleh karena itu, perspektif adil dan setara gender harus hadir dalam semua aspek dan ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh sering ditemukannya beragam persoalan yang masih bias gender, baik dalam doktrin, pemikiran atau pemahaman, dan praktik. Tidak bisa dipungkiri adanya bias gender dalam pemahaman keagamaan termasuk dalam pendidikan tinggi. Misalnya, masih ada pemahaman yang kuat di masyarakat bahwa pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan anak perempuan menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman

semacam ini jelas bias gender. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, logis, dan komprehensif untuk meluruskan pemahaman yang bias tersebut.

Penerbitan buku ajar dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Ada beberapa alasan buku ajar menjadi pilihan. Pertama, pemahaman bias gender berangkat dari sumber-sumber rujukan dan penulisannya yang juga bias. Pembiasan terjadi baik pada aspek metode maupun substansi. Dengan menghadirkan buku ajar dalam berbagai mata kuliah diharapkan mampu menjawab persoalan ini. Kedua, buku ajar memiliki *endurance* (waktu keberlangsungan) yang sifatnya relatif lebih lama daripada program lain semisal *training* atau *workshop*. Hadirnya buku ajar akan menjadi karya yang siap dirujuk jika muncul persoalan-persoalan yang relevan terkait isu-isu gender. Ketiga, buku ajar membidik generasi muda yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan, baik untuk lingkup kecil keluarga, masyarakat, maupun lingkup besar seperti negara.

Proyek penulisan buku ajar berperspektif gender memilih beberapa mata kuliah yang dipandang berkaitan langsung dengan isu gender di perguruan tinggi keagamaan Islam. Di samping ditujukan kepada pembaca dari kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam, buku ajar perspektif gender juga sangat direkomendasikan kepada pembaca umum, seperti praktisi, peneliti, maupun mahasiswa dari latar pendidikan umum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ajar berperspektif gender. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan

kepada semua tim perumus, reviewer, penulis, serta pimpinan perguruan tinggi Islam yang telah bekerja sama atas terbitnya buku ini. Semoga buku ajar berperspektif gender bermanfaat dan berkontribusi penting dalam pembangunan nasional.

Jakarta, Oktober 2019

Menteri KPPPA RI





# Pengantar Rektor

Alhamdulillah Maha Terpuji Allah Yang Maha Memelihara ssesi bumi. Buku ini, semata-mata merupakan limpahan wujud berkah dan bimbingan-Nya. Sebagai Perguruan Tinggi keagamaan Islam yang sedang semangat-semangatnya membangun mutu, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya akan mengusahakan terjadinya banyak hal yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Diharapkan dari peningkatan kualitas ini akan bermuara pada kemampuan lembaga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Buku ini, jika dilihat dari genre, konten, dan pola afirmasinya, termasuk buku yang belum banyak di Indonesia. Buku ini berusaha memasukkan isu dan perspektif gender pada pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Di UINSA sendiri Matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan secara organik sebagai kajian terbuka untuk menyelaraskan antara pondasi kebangsaan yang tetap dengan dinamika jaman yang terus berubah. Topik-topik ke-Indonesiaan yang abadi seperti dialektika agama-negara, konstitusi, identitas nasional, demokrasi, setia NKRI, HAM, kearifan lokal, dan masyarakat madani disajikan dengan pendekatan kritis berimbang.



Kritis berimbang berarti segala usaha ke arah yang baik selalu diperjuangkan dalam mekanisme kompromi yang tidak merusak. Kritik terbuka pada semua topik kebangsaan tidak hanya berarti asal melawan kemudian meninggalkan sisa-sisa bangunan yang tercabik-cabik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UINSA yang kritis dan terbuka ini tentu saja dibangun dari niat melengkapi, bukan mengganti. Bahwa apa yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa, oleh para pengelola negara adalah sesuatu yang muncul karena proses keputusan yang disetujui oleh segenap elemen bangsa. Misalnya, mendiskusikan kegagalan sebuah program adalah perkara wajar yang semata-mata bertujuan menggugah tanggung jawab aktor-aktor muda masa depan bangsa, bukan untuk mendelegitimasi pihak tertentu.

Kritisisme semacam ini diadaptasi buku ini menjadi misi lain untuk melihat pendidikan kesetaraan gender dalam bingkai kebangsaan yang kompleks. Bahwa sejak awal mula kelahirannya, Pancasila dihasilkan dari partisipasi yang setara dari semua elemen bangsa sehingga menjadi berkesesuaian secara nalar jika Pancasila mendasari bagi tumbuhnya kesetaraan yang lain. Memperjuangkan kesetaraan gender adalah memperjuangkan nilai-nilai, memperjuangkan emosi dan subjektivitas kemanusiaan. Meski demikian, perjuangan ini didukung oleh dasar penalaran yang jernih, bahwa meminggirkan perempuan atau kelompok minoritas lain, selain tidak etis, juga merupakan gerakan anti produktifitas dan melawan kolaborasi. Buku ini ingin menjangkau misi tersebut dalam penggambaran yang bisa didiskusikan.

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung segala bentuk kampanye terhadap keadilan dan kesetaraan. Usaha terbatas yang dilakukan oleh kampus UINSA ini semoga berdampak bagi nilai yang lebih

luas. Terima kasih kepada tim penulis yang telah mengusahakan waktu dan kemampuannya untuk memperhatikan isu penting ini. Bahwa yang tertulis di buku ini merupakan bukti dukungan kita pada program dunia pemberantasan penindasan terhadap perempuan dan kelompok lemah. Terima kasih tak terhingga kepada Pusat Studi Gender dan Anak UINSA yang telah lama menjadi motor dan dinamisator lahirnya gagasan-gagasan *pro-human*. Melalui PSGA lah kampus bisa bersinergi dengan lembaga yang lebih besar seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebaliknya, terima kasih mendalam kepada KPP-PA yang telah mempercayakan kerjasama sosial humaniora seperti ini kepada kampus kami.

Terakhir, segenap pimpinan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menyampaikan maaf sebesar-besarnya jika apa yang ada di buku ini kurang mampu mengakomodir harapan dewan pembaca di manapun berada. Buku ini adalah cermin niat baik yang belum tentu semua isinya dinilai baik sesuai yang dicitrakan. Kami percaya bahwa perbaikan dan evaluasi perlu terus dilakukan bagi buku-buku sejenis yang lain, hal ini sebagai pengganti kalimat bahwa usaha kami tetap berkekurangan. Semoga Allah Swt. memberkahi ikhtiyar dan jalan kebaikan ini, semoga Indonesia senantiasa mendapat keberkahan untuk mengantarkan masa depan bangsa menjadi lebih baik. Salam []].

Rektor UINSA

Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, MA. Ph.D



# Pengantar Penulis

Di dalam Islam, inti utama kehidupan adalah kehidupan yang diindikasikan dengan eksistensi jiwa. Jiwa adalah subjek utama manusia bagi dirinya sendiri, bagi alam, dan bagi Tuhan Yang Maha Esa. Bukti paling signifikan dari proposisi ini adalah bahwa meski sama-sama memiliki nyawa dan jasad, manusia berbeda dengan makhluk bernyawa dan berjasad lain. Manusia adalah subjek kejiwaan yang dilengkapi dengan prasarana fisik. Di dalam bahasa Al-Quran, manusia diberi tanggung jawab titipan *ruh* yang ketika menjalani bahtera hidup manunggal dengan tubuh menjadi *nafs*.

Karena alasan ini, maka pada dasarnya mendidik *ruh* atau *nafs* adalah pendidikan yang ada di arus utama dalam Islam. Lahirnya konsep *akhlaq* sebagai tujuan pembentukan karakter manusia merupakan bukti akan hal ini. *Akhlaq* adalah keseluruhan profil manusia yang berhasil mengelola kejiwaannya untuk berlaku hidup tepat. Hidup tepat adalah hidup yang secara intelektual benar, secara moral baik, dan secara sosial cakap. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT semata-mata untuk menyempurnakan misi ini, misi mendidik sekaligus memberi teladan manusia untuk menyempurnakan akhlaqnya.

Pendidikan, dengan demikian, dibagi menjadi dua bidang besar, pendidikan fisik dan pendidikan non-fisik. Pendidikan fisik adalah pendidikan keterampilan khusus yang mendayagunakan

seluruh potensi fisik manusia seperti bidang olahraga, beladiri, dan kesehatan. Pendidikan fisik bersifat komplementer untuk melengkapi kesempurnaan jiwa. Pendidikan jiwa adalah semua pendidikan non fisik yang bekerja meningkatkan kapasitas keilmuan serta kapasitas penanaman nilai-nilai budaya. Secara umum manusia melembagaan pendidikan jiwa dalam sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, serta pendidikan akademik lain. Kesemua contoh lembaga ini, meski di dalamnya terakomodasi pendidikan fisik, ia merupakan pendidikan jiwa untuk membentuk pribadi lulusan.

Pribadi lulusan inilah yang bertanggung jawab turut serta menentukan wajah bangsa di masa-masa setelahnya. Baik atau buruk sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa baik sistem pendidikan kita membentuk *akhlaq* lulusan. Tentu saja, sebagaimana penjelasan sebelumnya, kualitas *akhlaq* lulusan yang dimaksud adalah yang sinergis dengan kepentingan kebangsaan. Hal itu berarti bahwa jika *akhlaq* adalah keseluruhan kompetensi manusia mengelola kejiwaannya, maka ia tidak hanya bertugas menjaga nilai-nilai keislaman saja (*values*) tetapi juga bertanggung jawab membangun kesadaran sosial, berdemokrasi, berhukum, berbangsa, dan bernegara (*mechanism*). Bahwa manusia *berakhlaq* yang diharapkan jiwanya terdidik, akan mampu memperjuangkan nilai-nilai Islam tetap dalam proses kebangsaan yang disepakati.

Pada bagian yang berbeda, ketika pendidikan jiwa dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, sejatinya pendidikan adalah teknik melanjutkan kebudayaan Indonesia. Ketika budaya Indonesia yang dimaksud adalah budaya manusia seutuhnya lahir batin, maka yang diutamakan adalah tradisi keberhasilan di bidang kesejahteraan dan kebaikan. Pendidikan menjadi manusia Indonesia bertujuan menyehatkan seluruh rakyat seperti halnya rakyat di dunia lain namun dengan

nilai tambah terinternalisasinya keberlanjutan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Nilai ber-Indonesia yang dimaksud adalah nilai agama yang kuat, adat ketimuran yang multiidentitas serta toleran, sekaligus dinamis dengan tetap sinergis dengan alam.

Tujuan bernegara yang masih normatif ini selanjutnya diukur menggunakan indikasi yang lebih praktis. Bagi penulis, secara berurut indikator dapat dibatasi pada keberhasilan pembentukan sikap individu, keberhasilan pembentukan sistem hidup bernegara, serta keberhasilan terbentuknya budaya tanggung jawab. Ketiga indikator ini secara masif telah diakomodir oleh sistem budaya pendidikan yang lengkap di Indonesia. Contoh yang biasa kita temukan adalah pendidikan karakter di keluarga, sekolah, serta wawasan keagamaan untuk pembentukan kapasitas individual. Secara formal, materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan juga membantu menyinergikan pendidikan individual kepada visi pembentukan kesadaran sipil bermasyarakat dan bernegara. Terakhir, pendidikan budaya yang berisi dialog pengetahuan serta tanggung jawab kebangsaan yang dinamis bisa kita temukan pada wacana sosial, diskusi, memecahkan masalah, hingga budaya baru seperti dialektika di media massa.

Pada ketiga target indikatif keberhasilan pendidikan di Indonesia tersebut, muncul inisiatif untuk meningkatkan kualitas terutama di bidang konten. Pelibatan isu-isu global baru seperti kesetaraan gender, konservasi lingkungan, energi terbarukan, perubahan iklim, keamanan dan perdamaian, hingga penguatan paradigma sosial berjejaring-kolaboratif oleh Program SDG's PBB, semakin berdampak pada arah strategis lembaga pendidikan di Indonesia. Salah satu alasan kenapa lembaga pendidikan mulai mengakomodir isu-isu ini adalah karena pemerintah melalui kebijakan Pembangunan Nasional juga melakukan hal yang sama. Ketika lembaga pendidikan,

baik yang dilibatkan pemerintah atau yang berinisiatif sendiri menganggap substansi isu ini kuat, maka akan terjadi dinamisasi ideal bagi pengembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Buku ini sendiri pada dasarnya hendak menghubungkan antara pendidikan kesetaraan gender sebagai satu paket yang integral dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Lebih tepatnya, buku ini ingin mengaitkan bahwa amanat kesetaraan gender sejalan dengan amanat Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Isu gender adalah isu kemanusiaan yang harus dituntaskan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan isu-isu perlindungan dunia lainnya. Ketika pendidikan kesetaraan gender menguat, maka manusia Indonesia akan lebih kuat tingkat toleransi dan tingkat kolaborasinya dalam menyongsong persoalan global yang lain.

Catatan UIN Sunan Ampel dalam pengembangan isu-isu sosial, terutama di bidang pengabdian kepada masyarakat, telah dibentuk sejak lama. Melalui peninggalan hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga pengabdian dunia seperti SILE Canada dan CBPR UNESCO, UIN Sunan Ampel telah menjadi perguruan tinggi dengan corak pengabdian yang kaya. Pengembangan metode melihat masyarakat secara demokratis, partisipatif, terbuka, dan berwawasan gender telah memaparkan teori pengabdian kelembagaan seperti PAR, ABCD, SL, CBPR, dan Pengabdian Literasi. Oleh karena itu, maka pelibatan pemerintah mengundang UIN Sunan Ampel untuk berpendapat soal penguatan gender di dalam pendidikan karakter telah mendapat pendasarannya.

Secara sekilas, buku ini terdiri dari 5 Bab, mengetengahkan sistematika pembahasan yang dimulai dari historis-visioner Pancasila, kemudian mengalir kepada sistem

pengetahuan Pancasila, sistem keterampilan Pancasila, sistem sikap Pancasila, dan diakhiri dengan penutup. Setiap bab dilengkapi dengan pertanyaan reflektif untuk menguatkan ulang konten. Konten yang dimaksud berisi dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mendapat sentuhan objek material gender serta objek formal gender sebagai perspektif. Tujuan keseluruhan buku adalah untuk menggali lebih dalam pembentukan karakter mahasiswa keagamaan di Indonesia agar menjadi profil lulusan yang humanis-berakhlaqul karimah, cakap sebagai warganegara, serta memiliki tanggung jawab kebangsaan yang kuat.

Selanjutnya, penulis berpandangan bahwa apa yang disajikan pada buku ini merupakan fasilitasi awal bagi pengembangan kajian pengembangan karakter berwawasan gender bagi lembaga-lembaga lain di Indonesia. Keberanian buku ini memainkan contoh-contoh mutakhir tentang fenomena media sosial, kronik komunikasi massa, serta tema baru lainnya menjadi alasan kenapa buku ini akan jauh dari kata sempurna. Tema-tema ini tentu saja akan menjadi lebih lengkap disajikan oleh buku lain dari lembaga lain dengan kesamaan koncern. Terakhir kali, penulis menyampaikan terima kasih mendalam terhadap semua pihak yang telah menjadi jalan bagi terbitnya buku ini. Salam. []

*ttd*

Penulis



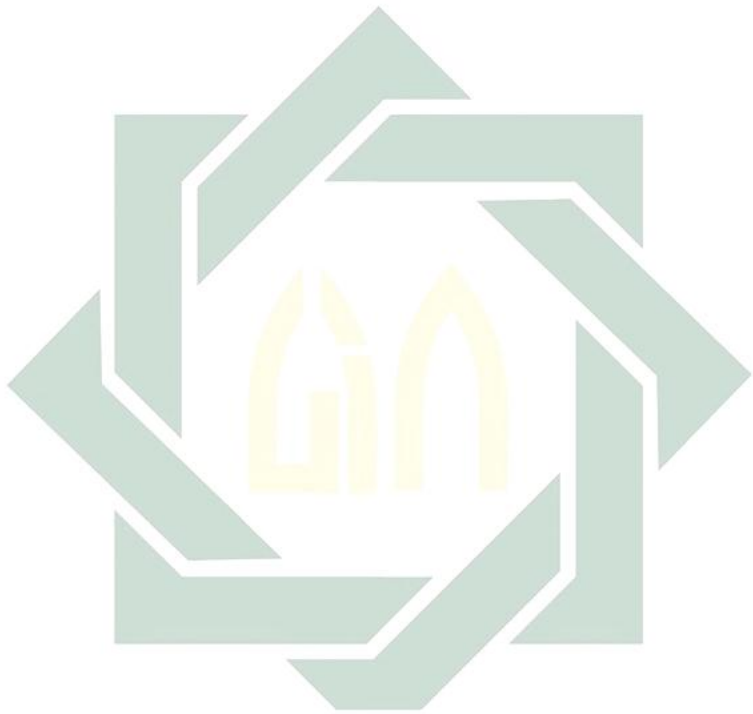
# Daftar Isi

<b>Sambutan</b>	<b>iv</b>
<b>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>iv</b>
<b>Pengantar Rektor</b>	<b>vii</b>
<b>Pengantar Penulis</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>xv</b>
<b>Bagian 1</b>	
<b>Keterlibatan Perempuan dalam Proses Lahirnya Pancasila</b>	<b>1</b>
Pendahuluan 3	
Mengusahakan Kemerdekaan	6
Melahirkan Pancasila	16
Penutup	27
Latihan	29
<b>Bagian 2</b>	
<b>Dinamika Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan</b>	<b>31</b>
Pendahuluan	33



Revolusi Nasional	36
Pancasila Melindungi Seluruh Anak Bangsa	47
Penutup	53
Latihan	55
<b>Bagian 3</b>	
<b>Orde Baru dan Pergerakan Perempuan</b>	<b>56</b>
Pendahuluan	58
Pancasila sebagai Stabilisator Nasional	60
Perempuan di Masa Orde Baru	65
Penutup	71
Latihan	73
<b>Bagian 4</b>	
<b>Pancasila dan Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945</b>	<b>74</b>
Pendahuluan	76
<i>Setting</i> Sosial-Politik Reformasi 1998	80
Reformasi Undang-Undang dan Kebijakan Perempuan dan Jabatan Publik	84
Perempuan dan Jabatan Publik	92
Penutup	97
Latihan	100
<b>Bagian 5</b>	
<b>Membumikan Pancasila</b>	<b>101</b>
Pendahuluan	103
Membumikan Pancasila	106

<i>Euforia</i> Pancasila di Era Kebebasan	117
Perempuan dan Gender di Era Keterbukaan Publik	123
Penutup	127
Latihan	130
<b>Bagian 6</b>	
<b>Dinamika Pancasila di Era Globalisasi</b>	<b>133</b>
Pendahuluan	134
Pancasila dan Perubahan Melawan Radikalisme dan Transnasional	137
<i>Gender Citizenship</i>	141
Penutup	151
Latihan	160
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>163</b>
	165



[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# Bagian 1

## Keterlibatan Perempuan dalam Proses Lahirnya Pancasila

- Kemampuan mahasiswa** : Mahasiswa mampu memahami keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Pancasila.
- Indikator** : - Mampu menjelaskan peran perempuan pada perjuangan kemerdekaan.  
- Mampu menjelaskan rangkaian lahirnya Pancasila.  
- Mampu menceritakan peran perempuan dalam proses lahirnya Pancasila.
- Bahan kajian** : - Perkenalan dan kontrak belajar.  
- Konsep perkuliahan.  
- Sejarah perjuangan kemerdekaan dan sejarah lahirnya Pancasila.  
- Peran perempuan pada sejarah kemerdekaan dan proses lahir Pancasila.
- Metode belajar** : Menonton Film, melihat gambar sejarah, diskusi, dan penelitian referensi terkait.
- Waktu belajar** : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.

- Pengalaman belajar** : Mahasiswa mengalami pelajaran tatap muka dan diskusi, mengalami penelitian dan berbagi informasi menggunakan media belajar online, serta mengalami pengalaman menuliskan kesimpulan di media sosial tentang peran perempuan dalam proses kemerdekaan dan kelahiran Pancasila.
- Manajemen Pertemuan** : Perkuliahan bisa dilakukan 2-3 kali pertemuan.
- Kriteria / bobot penilaian** : Penilaian proses belajar (40%), penilaian produk belajar (30%), penilaian etika belajar (30%).
- Indikator materi RG** : Perempuan dipresentasikan dalam proses perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Pancasila.
- Indikator strategi RG** : Mahasiswa mengumpulkan dan menggali referensi tentang peran perempuan di sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan serta dalam proses kelahiran Pancasila.

## Pendahuluan

Nama 'Indonesia' secara konvensi tercatat sebagai kesepakatan bangsa pertama kali dalam representasi ikrar pada Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda Tahun 2028. Indonesia saat itu dan saat-saat sebelumnya adalah nama panggilan untuk menyatukan perasaan senasib-sepenanggungan sebagai anak bangsa. Konsekuensi logisnya, secara resmi Indonesia baru sah pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 dibacakan. Nama Indonesia berasal dari akar Latin, *indos* artinya kawasan India atau Hindia dan *nesos* yang berarti kepulauan.<sup>1</sup> Jadi, Indonesia adalah kata yang terus dipekirakan selain kata merdeka yang baru dianggap resmi setelah sekian puluh tahun pergerakan kemerdekaan.

Hingga saat ini, pada tahun 2019, Indonesia telah banyak sekali mengalami perubahan, dibanding dengan apa yang terjadi 20 tahun sebelumnya, pada masa pasca reformasi 1998. Indonesia sekarang adalah negara berkembang yang siap menyongsong menjadi negara maju dengan semua pencapaian selama 74 tahun merdeka. Bangsa Indonesia hari ini merupakan bangsa dengan kekenyamanan hak berekspresi, berpendapat, dan berimprovisasi sebagai warga dunia yang komunikatif tanpa batas teritorial. Era revolusi industri 4.0 belakangan ini menjadi tahapan untuk semakin memantapkan pandangan bahwa Indonesia terus beregerak dalam banyak hal.

Terbukanya era informasi yang sedemikian pesat, memberi kesempatan semua elemen bangsa menampakkan diri. Jika sebelumnya masih ada unit-unit kepentingan yang terpojokkan, kini saatnya semuanya mengemuka, memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian setara yang telah dijamin oleh misi ilmu

---

<sup>1</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 26.

pengetahuan, hukum, politik, serta oleh nilai-nilai kemanusiaan universal. Apa yang dianggap cela pada masa lalu, kembali mendapat tempat dan kesempatan untuk dipugar kembali. Atas nama perjuangan atas kesetaraan hak dan atas nama masa depan kemanusiaan yang lebih baik, masa kini adalah masa di mana terdapat banyak sekali kesempatan membangun dunia dengan manajemen kekuasaan yang lebih adil.

Mahasiswa sebagai sebuah segmen khusus dalam masyarakat, adalah kelompok terdidik yang secara resmi dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk meneruskan kepemimpinan bangsa. Bagaimanapun caranya, mahasiswa Indonesia harus dijamin mendapatkan hak pendidikan yang adil, sekaligus mendapatkan hak menentukan kebebasan belajarnya. Salah satunya, Perguruan Tinggi wajib menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai untuk membentuk pengetahuan kebangsaan mahasiswa dalam konteks ikatan nasionalisme yang berkomitmen dan berintegritas. Perguruan Tinggi harus menjadi lembaga penuntas untuk memastikan bahwa Mahasiswa Indonesia adalah pemimpin masa depan dengan identitas, komitmen, serta integritas kebangsaan yang baik.

Salah satu isu paling lama yang terus menjadi konsen dalam pendidikan berbangsa dan bernegara kita adalah tentang kemajuan yang dapat diakses oleh semua, tanpa penindasan, serta berkeadilan. Kemajuan yang dapat diakses oleh semua berarti diberikannya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi aktor utama ataupun menjadi aktor penyempurna dalam proses pengelolaan kemajuan. Tidak hanya soal kesempatan menentukan peran, setiap warga negara yang memiliki perbedaan khusus seperti kelompok difabel,

kelompok lemah (*mustadh'afien*), serta kelompok 3 T (tertinggal, terdapat, terluar) juga mendesak segera mendapatkan hak-hak berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan demikian, diharapkan mampu menjadi jembatan inklusi untuk mendorong terciptanya kemajuan yang holistik, paripurna, dan berprinsip kesemestaan. Sebagai panduan mayor bagi arah kebangsaan, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah matakuliah paling relevan untuk menjaga jiwa bangsa agar tetap setia pada cita-cita luhur kebangsaan yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada akhirnya mampu berkiprah lebih serius pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Melalui amanat inklusi inilah dapat dilihat lebih jernih peran bersama setiap pihak dengan mengedepankan penjelasan yang jujur, kolaboratif, dan merangkul semua kalangan.

Menarasikan peran perempuan serta minoritas lainnya pada proses perjuangan kemerdekaan dan kelahiran Pancasila merupakan salah satu usaha menyeimbangkan narasi yang lebih dulu dominan. Tanpa harus berarti melakukan perlawanan perempuan terhadap narasi yang 'meninggalkan' perempuan, menyajikan informasi yang adil atas peran perempuan merupakan panggilan kebenaran yang fair. Mengisahkan peran perempuan dalam proses di awal sejarah kebangsaan ini merupakan panggilan kemanusiaan dan bukan semata-mata hanya sekedar ketidakterimaan perempuan. Bahwa studi budaya tentang perjuangan kesetaraan gender misalnya adalah perjuangan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.



## Mengusahakan Kemerdekaan

Secara harfiah, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Namun demikian, semakin terbukanya pilihan informasi di jaman kebebasan akses ini, muncul banyak versi tentang ketepatan waktu proklamasi. Dibanding memperdebatkan kepastian waktu tentang kemerdekaan, ada hal yang lebih prinsipil selain itu, yakni moral juang bangsa hingga akhirnya berhasil merdeka. Generasi sekarang lebih membutuhkan nilai-nilai juang ini dibanding akurasi pewaktuan. Bahwa tidak hanya status kemerdekaan semata yang layak dijaga, namun juga warisan kisah juang yang harus dipelihara. Dengan demikian, generasi-generasi yang akan datang akan mendapatkan hak yang sama untuk merasakan cita-rasa perjuangan yang sama menjaga Indonesia meski dengan momentum dan isu yang berbeda.

Latar belakang kehidupan kebangsaan Indonesia tentu saja lebih panjang dibanding kehidupan bernegara yang tercatat secara legal. Indonesia adalah bangsa dengan sejarah panjang, termasuk dalam hal sejarah paleoantropologi dunia. Artinya, Indonesia termasuk negara yang lokusnya menyumbangkan temuan signifikan di bidang arkeologi yang akhirnya membentuk narasi asal-usul manusia permuliaan dunia. Di kawasan Indonesia ditemukan hampir semua fase perkembangan bentuk tulang manusia, mulai dari jaman *pleistocen* bawa, *pleistocen* tengah, *pleistocen* atas, hingga jaman *holocen*. Semua sekolah di Indonesia memberikan wawasan dasar tentang bagaimana *Pithecantropus Robustus*, *Pithecantropus Mojokertensis*, *Pithecantropus Palaeojavanicus*, *Pithecantropus Erectus*, *Homo Wajakensis*, *Homo Soloensis*, hingga *Homo Sapiens*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 29.

Tidak hanya informasi penting tentang manusia-manusia pertama dunia, Nusantara yang berpulau-pulau ini juga memberi sumbangan pengetahuan kebudayaan yang penting, terutama soal cara hidup dan berkepercayaan purba. Mulai dari berburu hingga menetap dan bercocok tanam, mulai jaman batu tua hingga jaman besi, mulai dari berkepercayaan magis dinamisme-animisme hingga jaman agama-agama, semua ada pada sejarah Indonesia.<sup>3</sup> Sistem sosial kemasyarakatan, lembaga serta intitusi perpolitikan jaman kerajaan hingga jaman menjelang negara bangsa juga bisa dibaca tuntas pada Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang kaya sejarah, sebuah bangsa dengan banyak sekali riwayat gilang-gemilang.

Informasi tertulis yang pertama-tama bisa dirujuk tentang Indonesia adalah prasasti yupa di Kutai, Kalimantan Timur, pada kurang lebih 400 Masehi. Menurut Ricklefs, ditemukan Yupa berjumlah tujuh yang menurut penelitian paleografi tertulis tahun tersebut.<sup>4</sup> Yupa Kutai adalah monumen atau penanda sebagai petunjuk bahwa pada tahun sekian sudah ada Kerajaan Hindu di tanah Kalimantan. Keterangan para ahli dari bacaan atas yupa yang beraksara Palawa ini mengindikasikan bahwa raja-raja Kutai sudah menjalin kontak dengan kekuatan Brahma yang ada di India.

Prasasti Kutai menjelaskan bahwa kawasan Indonesia saat itu telah tercatat memiliki geliat kebudayaan penting dunia. Kesimpulan para sejarahwan tentang komunikasi bilateral Kerajaan Kutai dengan pengaruh India bisa disimpulkan sebagai kemajuan. Bahwa India adalah bangsa dengan sejarah tertua

---

<sup>3</sup>M. Junaedi Al Anshori, *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 2010), hal. 8-14.

<sup>4</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono dan rekan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 13.

dunia sehingga kemajuannya bisa dipastikan melebihi bangsa lain di kawasan Asia Tenggara. Kemampuan Kutai menjalin hubungan dengan India bisa diasumsikan sebagai langkah strategis kerajaan untuk mengakses kemajuan. Asumsi ini juga berarti bahwa Indonesia sejak Abad ke-5 telah menjadi bangsa yang terbuka.

Masuknya Agama Islam sebagai kepercayaan baru yang akhirnya meluas dan menjadi lebih dominan atas Hindu Budha dianggap Ricklefs sebagai penanda dimulainya Jaman Baru Indonesia. Ricklefs sempat merevisi dalam hal pewaktuan tentang jaman ini. Pertama-tama ia mengatakan jaman ini mulai pada kurang lebih 1300 Masehi, namun kemudian direvisi pada penelitian berikutnya dengan 1200 Masehi.<sup>5</sup> Latar belakang jejak kebudayaan Indonesia, sejak 400-1200 Masehi hingga kemudian masuknya penjajahan merupakan variabel penting untuk memahami fase-fase perjuangan kemerdekaan.

Banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di kawasan Nusantara atau Indonesia sekarang merupakan bukti bahwa ada kekuatan yang terbagi-bagi. Hal ini berarti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah mendapatkan persoalan serius dalam hal persatuan. Persoalan serius tersebut terbukti dalam banyak catatan sejarah gerakan perjuangan yang sekian lama tidak cukup berhasil karena dilakukan secara terpisah, sesuai dengan kohesi lokal masing-masing kekuatan. Kekuatan-kekuatan lokal yang terpisah tersebut bisa didasarkan hanya pada kohesi keagamaan atau kohesi kesukuan.

Meski dianggap sebagai gerakan primordial yang terserak dan terpisah, sesungguhnya perlawanan lokal yang merata di seluruh Nusantara ini merupakan tonggak penting bagi

---

<sup>5</sup>M.C Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 19.

fase berikutnya. Pola perlawanan yang digerakkan oleh nilai etno-religius ini oleh Yudi Latif disimpulkan sebagai landasan Nasionalisme Purba (*archaic nationalism*).<sup>6</sup> Nasionalisme Purba menjadi semacam inspirasi dari satu perlawanan bagi perlawanan lain sehingga kemudian mulai tumbuh kekompakan pada masa berikutnya. Banyaknya perang lokal yang berkobar merupakan bukti bahwa ada kesamaan aspirasi untuk segera menghapus penjajahan. Karena secara umum dibakar oleh sentimen religio-etnis, maka di fase ini, pada dasarnya tidak ada sekat yang secara terstruktur membuntu kekuatan peran selain keduanya, termasuk terhadap peran perempuan.

Pada level sebaliknya, sesungguhnya kekuatan kebangsaan pada saat itu terpisahkan bukan karena sentimen saling berlawanan, namun hanya belum dipertemukan oleh momentum yang tepat. Bahwa kemudian kenapa hanya religiusitas dan etnisitas saja yang sementara mampu memotivasi kekuatan melawan, hal demikian dikarenakan modal sosial yang tersedia hanya itu. Modal sosial ini yang dioptimalkan sebagai pengobaran juang, sehingga lebih banyak lahir kecenderungan bahu-membahu saling membantu dibanding kecenderungan bersaing. Pada saat itulah, ketika lahir para panglima juang perempuan, anasir kekuatan lain terbukti tidak keberatan. Perang Paderi (1821) dan Perang Diponegoro (1825) yang digerakkan oleh narasi laki-laki berjalan sejajar dengan Perang Aceh ke-3 yang dipimpin oleh Cut Nyak Dhien (1899) atau dengan perang gerilya yang digencarkan oleh Cut Nyak Meutia (1901).

Munculnya sejumlah tokoh pejuang perempuan pada masa ini semakin menguatkan bahwa peran perempuan sangat

---

<sup>6</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 272-273.

tampak. Bahkan justru jauh sebelumnya, penghormatan bangsa terhadap tokoh Aceh seperti Laksamana Malahayati (1599) cukup besar. Seorang Gadis Maluku, Martha Christina Tiahahu gugur di medan perang (1817) di usia 17 setelah turut memimpin pertempuran melawan Belanda. Sebagaimana Keumalahayati dan Cut Nyak Dhien, nama Martha Christina Tiahahu juga turut harum di hati dan pikiran bangsa. Perempuan-perempuan pejuang dari Jawa seperti Nyi Ageng Serang, Nyai Ahmad Dahlan, Kartini, atau Dewi Sartika, meski tidak seradikal sepakterjang pejuang perempuan Aceh atau Maluku, peran mereka tetap dianggap sangat penting bagi perjuangan.

Hingga pada awal Abad ke-20, perjuangan kemerdekaan mulai memutuskan memakai teknik yang lebih modern. Gerakan-gerakan akademik dan lebih politis mulai diterapkan, pergerakan menekan penjajahan tidak lagi berorientasi pada konfrontasi fisik. Lahirnya Budi Utomo merupakan wujud dari perubahan pola perlawanan fisik yang terpisah-pisah mengarah pada pola yang lebih rasional. Perjuangan dengan basis lokalitas pelan-pelan menjadi perjuangan Nasional yang teroganisir dengan baik. Hal ini terjadi tentu tidak semata-mata hanya karena persoalan kejenuhan perjuangan semata, melainkan ada pemicu eksternal dari pihak Belanda yang secara internasional berdampak oleh geopolitik seputar Perang Dunia.

Momentum perjuangan kebangsaan seolah bergerak cepat dan tepat. Bersatunya seluruh kekuatan kebangsaan seperti gayung bersambut dengan rangkaian perubahan-perubahan strategi kolonial yang membutuhkan semakin banyak tenaga terdidik.<sup>7</sup> Iklim pendidikan yang pelan-pelan dibuka aksesnya oleh pemerintahan kolonial (politik etis), yang mula-mula

---

<sup>7</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 274.

ditujukan sebagai bagian dari masifikasi hasil kolonialisme ternyata justru berbalik arah mencerdaskan model perjuangan. Ada wacana *kemadjoean* yang membibit dan tumbuh mekar di kalangan masyarakat kala itu. Di balik wacana tersebut terselip optimisme semakin besar akan keberhasilan mengusir penjajah.

Tonggak Budi Utomo mewakili Nasionalisme Tua, hal itu berarti proses perubahan dari perjuangan fisik peperangan menuju perjuangan intelegensia teroganisir masih belum dikatakan sepenuhnya matang. Masih banyak kelompok kepentingan baru dari kalangan elit pribumi yang belum satu padu pada visi yang sama.<sup>8</sup> Lahirnya Tri Koro Dharmo (*Jong Java*) yang kemudian disusul dengan *Jong Sumatra*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, *Sekar Rukun*, atau organisasi kepemudaan muslim *Jong Islamieten Bond* mengonfirmasi bahwa persatuan kebangsaan tetap masih dalam anasir terpisah-pisah. Meski kemudian pada 1926 pelan-pelan mulai ada inisiasi perhimpunan nasional seperti Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) sebagai embrio lahirnya Sumpah Pemuda sebagai tonggak lahirnya nasionalisme modern.<sup>9</sup>

Informasi tentang geliat perjuangan yang berliku ini menjadikan Bangsa Indonesia perlu terus mawas diri namun tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwa peristiwa kemerdekaan tidak hanya murni hitungan sebab-akibat karena kegigihan perjuangan semata. Ada Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadikan semesta mendukung perjuangan ini. Pemahaman teologis ini mungkin dianggap tidak signifikan atau bahkan tidak bisa dijelaskan dalam historiografi, namun Bangsa Indonesia tentu meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Pembukaan

---

<sup>8</sup> Yudi Latif, *Negara...*, hal. 290.

<sup>9</sup> Sri Sudarmiyatun, *Makna Sumpah Pemuda* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal. 4-8.

Undang-Undang Dasar 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ...” menjadi relevan.

Pada aras yang lebih filosofis, pengakuan teologis ini, selain sebagai bukti identitas kebangsaan Indonesia yang religius, juga sebagai manifestasi dari kerendah hatian seluruh elemen perjuangan. Perjuangan kebangsaan adalah perjuangan yang adil dari seluruh kalangan dan dipersembahkan untuk bangsa seluruhnya. Bahwa tidak ada vonis mengangkat hanya kalangan tertentu saja yang dianggap paling berjasa, semua elemen adalah kesatuan padu yang saling memberi dampak. Kesepahaman ini penting sekali bagi pengakuan mendasar bagi peran perempuan dan kelompok minoritas lain (agama atau etnis) terhadap perjuangan kemerdekaan.

Sejarah mencatat, pada Kongres Pemuda II pada 1928, Sumpah Pemuda justru digelar digelar di rumah milik warga etnis Tionghoa, Sie Kong Liong, yang di kemudian hari dihibahkan ke negara menjadi Museum Sumpah Pemuda.<sup>10</sup> Pada Kongres Pemuda tersebut, hakikatnya melibatkan juga peran aktifis perempuan-perempuan seperti Purnama Wulan, Siti Soendari, Emma Puradiredja, Soekawati, dan banyak lagi.<sup>11</sup> Catatan ini meluaskan wawasan kebangsaan sekaligus mengayakan perasaan keadilan kita bahwa semua pihak berjasa dalam proses penguatan fondasi Indonesia sebagai bangsa yang berjuang menjadi negara merdeka.

Yudi Latif menggarisbawahi peristiwa menarik pada 22-25 Desember 2028, yakni pada Kongres Perempuan Indonesia. Persitiwa ini memuat makna mendalam tentang nasionalisme sekaligus sangat penting bagi pengakuan peran perempuan.

---

<sup>10</sup>Sri Sudarmiyatun, *Makna...*, hal. 9.

<sup>11</sup>Sri Sudarmiyatun, *Makna...*, hal. 11.

Diyakini bahwa Kongres Perempuan tersebut adalah pembuktian pertama penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi rapat dan dipidatokan dengan lantang oleh Siti Soendari. Lebih menarik lagi ketika diketahui bahwa pada dua bulan sebelumnya, pasca ikrar Sumpah Pemuda, Kongres Besar Pemuda yang dipimpin oleh Soegondo Djojopoespito belum berhasil mengaplikasikan Bahasa Indonesia dan masih menggunakan Bahasa Belanda atau Bahasa Jawa.<sup>12</sup>

Perkembangan nasionalisme modern, adalah makna lain dari perubahan lebih rasional tentang nasionalisme yang sebelumnya bersifat kultural menjadi bersifat politik kelembagaan. Nasionalisme yang sebelumnya terbuka bisa diakses tafsirnya oleh semua aktifis dengan cara yang sangat cair, pada saat itu dimasukkan menjadi organisasi tata kerja dan tata laksana politik dengan tonggak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pada saat itulah lembaga-lembaga kebangsaan yang sudah mendisiplinkan nomenklatur organnya dengan nama Indonesia berproses secara lebih inten dengan *stakeholders* politik Pemerintahan Belanda atau Pemerintahan Jepang. Tidak hanya secara administratif lebih resmi, masa pergerakan ini juga lebih menjangkau lebih jauh masuk ke jantung perhatian dunia.

Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Persahabatan dengan Republik Arab Mesir, atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag merupakan sekian dari banyak manuver politik kebangsaan yang membuktikan semakin mantabnya nasionalisme modern. Perjuangan kemerdekaan pada masa ini menitikberatkan pada pengakuan dunia akan kedaulatan Indonesia. Bahwa pendapat dunia internasional tentang kedaulatan Republik Indonesia adalah unsur yang sangat penting untuk menekan Pemerintahan Belanda yang hingga 1949 masih berusaha melakukan tekanan

---

<sup>12</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 322.



bersenjata sebagai wujud provokasi atas legitimasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada masa ini peran perempuan semakin banyak yang bisa dicatat. Sebagaimana karakter sejarah yang selalu menumbuhkembangkan rasionalitas, peran perempuan juga semakin berkembang. Rasionalitas modern masyarakat Indonesia menjamin corak kemajuan itu dan menjadi prasyarat lahirnya gerakan perempuan secara lebih struktural. Cora De Stuers menyebutnya sebagai proses peralihan dari gerakan sosial menuju gerakan politik.<sup>13</sup> Ini pemahaman yang sama sebagaimana Yudi Latif namun dengan pilihan bahasa yang berbeda. Lahirnya organisasi perempuan Putri Mardika di Jakarta pada 1912 bisa dipakai sebagai petunjuk bagaimana perempuan memang berusaha mengakomodir kepentingan-kepentingannya agar tidak ketinggalan dalam proses pergerakan nasional.

Pada bagian awal pemetaan peran perempuan di sekitar sebelum dan menjelang kemerdekaan Indonesia, belum dijelaskan secara terperinci bahwa di dalam diri gerakan perempuan terdapat corak dan karakter khusus yang berbeda. Peran dan gerakan perempuan pada bagian ini masih dianggap sebagai perjuangan bersama dan tidak dibedakan dari manapun ia muncul. Misalnya nanti akan ada banyak penjelasan dari referensi yang berbeda-beda tentang gerakan perempuan dilihat dari aktifitas keagamaan, aktifitas etnis, termasuk dari aktifitas politik seperti gerakan perempuan Gerwani yang masing-masing memiliki irisannya sendiri-sendiri.

Munculnya tokoh unik seperti Tirto Adhi Soerjo, seorang jurnalis pribumi yang menginisiasi koran pertama turut

---

<sup>13</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*, Terj., Elvira Rosa, Dkk (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hal. 77.

mengayakan wacana tentang peran perempuan. Bahwa meski ia laki-laki, ialah yang pertama menyediakan rubrik bagi perempuan di surat kabar *Soenda Berita* sejak 1903. Pada tahun 1908, ia menerbitkan koran Berbahasa Indonesia pertama khusus untuk tema perempuan, *Poetri Hindia*.<sup>14</sup>Tirto adalah bukti lain bahwa peran perempuan dalam gerakan kebangsaan tidak selalu oleh perempuan. Pemahaman bahwa kekuatan perempuan adalah sesuatu yang mendasar dan signifikan tidak sedikit yang digagas dan dikembangkan oleh laki-laki. Sekali lagi, ini bukti berikutnya tentang universalisasi gerakan perempuan sebagai gerakan keadilan.

Kesimpulan penting yang bisa diambil dari bagian ini adalah bahwa peran perempuan di sepanjang masa-masa ini tidak bisa dipungkiri. Lebih dari cukup untuk menyajikan bukti-bukti tentang ini. Kesimpulan seperti ini menjadi penting untuk meyakinkan pada generasi di masa ini bahwa faktanya bangsa ini dibangun secara proporsional dengan pelibatan seluruh kalangan. Tanpa harus memaksa pengakuan atas bukti peran perempuan, hal ini tentu tidak berarti secara tendensius seolah-olah ada ketidakterimaan dari kekuatan yang merepresentasikan gerakan perempuan atas minimnya pengakuan. Melalui bahasa yang sama, bahwa pengakuan peran perempuan adalah pengakuan tidak hanya demi kepentingan perempuan, tetapi demi kebenaran sejarah yang dinarasikan secara adil bagi masa depan kemanusiaan.

Perjuangan untuk sampai pada pengakuan atas peran perempuan merupakan bagian perjuangan untuk memberi pengakuan yang sama pada minoritas lain yang lazimnya tidak

---

<sup>14</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010), hal. 104.

diperlakukan adil. Tidak ada maksud lain melebihi tujuan itu, karena memperjuangkan kepentingan perempuan saja justru akan jatuh pada relasi dominan sejenis ketidakadilan itu sendiri. Sekali lagi, dalam bahasa yang sederhana, penulisan sejarah yang mempromosikan peran perempuan adalah semata-mata bertujuan menciptakan rasa kemanusiaan yang adil, yang berimbang dan tegak untuk kemanusiaan, bukan untuk perempuan.

## **Melahirkan Pancasila**

Mengakses informasi tentang sejarah lahirnya Pancasila tidak sulit. Banyak sekali buku yang bisa kita baca untuk ini. Namun demikian, hal ini tidak berarti kepentingan kognitif bangsa atas Pancasila tidak perlu diperhatikan lagi. Ada persoalan lebih signifikan pada bagian ini selain hanya soal penguasaan informasi tentang sejarah Pancasila, yakni penguasaan emosi kebangsaan yang terjamin, yang bergaransi. Di dalam buku *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, As'ad Said Ali menjelaskan adanya indikasi surutnya pengetahuan tentang Pancasila, tidak hanya dari sisi kognitifnya, melainkan dari sisi dampaknya bagi komitmen kebangsaan.<sup>15</sup>

Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji persepsi publik tentang makna Pancasila bagi responden secara pribadi yang dikaitkan dengan visi kebangsaan setiap responden. Misalnya riset tahun 2008, sejumlah 48% responden dalam jumlah yang cukup tidak bisa menghafal kelima sila Pancasila secara benar.<sup>16</sup> Kesimpulan ini cukup mengejutkan mengingat Pancasila masih menjadi pelajaran wajib yang diulang-ulang di bangku sekolah sejak jenjang pertama hingga perguruan tinggi.

---

<sup>15</sup>As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa* (Jakarta: LP3S, 2010), hal. 2.

<sup>16</sup>As'ad Said Ali, *Negara...*, hal. 2.

Bahwa mengulang-ulang kembali informasi tentang bagaimana status dan sejarah Pancasila merupakan usaha kebangsaan yang harus terus ditempuh, jika masih menganggap identitas kebangsaan sebagai sesuatu yang penting.

Secara konsep, Pancasila lahir secara verbal pada 1 Juni 1945, saat Soekarno mengemukakan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI ke-1 (29 Mei-1 Juni 1945).<sup>17</sup> Proposisi Pancasila oleh Soekarno ini merupakan dialektika atau perimbangan dari konsep dasar negara yang sebelumnya dikemukakan oleh tokoh lain seperti Moch. Yamin dan Soepomo.<sup>18</sup> Pada dasarnya, meski berbeda-beda konsep yang dikemukakan oleh sekurang-kurangnya tiga tokoh ini memuat prinsip kebangsaan yang hampir mirip, tentang kesatuan nasional, sikap kemanusiaan, sikap keagamaan, demokrasi permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan. Akhirnya, konsep dari Soekarno lah yang disetujui sebagai kesepakatan bersama.

Peristiwa 1 Juni tersebut kemudian diputuskan secara nasional sebagai hari lahirnya Pancasila, sebagai sebuah konsep yang menerangkan asas kebangsaan Indonesia. Selain pendapat ini, ada pemikiran lain tentang kapan Pancasila lahir. Perbedaan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan lebih kepada rangkaian penyusunan konsep Pancasila oleh BPUPKI yang memang berproses. Menurut Nugroho dalam Asvi Warman, Pancasila lahir pada empat waktu yang berbeda; pada 29 Mei 1945 oleh Moch. Yamin, pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno, pada 22 Juni 1945 oleh Tim Sembilan (Jakarta Charter), dan pada 18 Agustus 1945 dalam UUD 1945 (Pembukaan).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Versi lain menyatakan Rapat BPUPKI ke-1 dimulai sejak 28 Mei 1945. Lihat St. Sularto dan D. Rini Yunarti, *Konflik di Balik Proklamasi, BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 9.

<sup>18</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 44-46.

<sup>19</sup>Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi*

Persoalan kapan lahirnya Pancasila disepakati pada dasarnya berkaitan dengan proses perubahan muatan atau substansinya. Rumusan Moch. Yamin sesungguhnya sudah identik rumusan Soekarno, hanya urutan serta pilihan diksinya saja yang berbeda. Rumusan Moch. Yamin dianggap yang paling dekat dengan teks Pancasila sekarang; ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup> Rumusan Moch. Yamin hanya berubah pada urutan sila ke-2 dan ke-3 jika dicocokkan dengan teks Pancasila sekarang.

Rumusan Soekarno justru agak berbeda dengan teks Pancasila sekarang. Urutan Soekarno dimulai dari; kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.<sup>21</sup> Menariknya, konstruksi Soekarno justru menempatkan ketuhanan di sila ke-5 atau terakhir. Tentu saja ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik saat perkuliahan tentang maksud serta asumsi yang berkembang sekarang dengan maksud dan asumsi yang terjadi di jaman itu. Misalnya, dari kedua rumusan ini, para peneliti bisa menempatkan keduanya dalam gaya penalaran deduktif atau induktif. Diharapkan dari perbedaan ini justru muncul diskusi yang menarik di kelas.

Pada sisi muatan, selanjutnya ketetapan Pancasila menempatkan proses yang berkembang sejak pidato Soekarno 1 Juni dengan Sidang BPUPKI ke-2, pada 22 Juni. Di dalam dokumen hasil keputusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta

---

*Pelaku dan Peristiwa* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 27.

<sup>20</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 44.

<sup>21</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 47.

atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta 22 Juni merupakan hasil kesepakatan dari Tim Sembilan<sup>22</sup> yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan 38 orang tokoh Nasional yang diundang Panitia Delapan.<sup>23</sup> Panitia Delapan sendiri merupakan tim kecil yang ditunjuk oleh hasil rapat BPUPKI ke-1 yang ditugaskan merapikan, menyelaraskan, serta membangun formulasi paling tepat dari diskusi tentang rumusan dasar negara yang bermacam-macam. Panitia Delapan diketuai oleh Soekarno.<sup>24</sup>

Tim Sembilan merupakan kepanjangan tangan dari Panitia Delapan dengan tugas paling krusial memberi rumusan yang pas tentang dasar negara dengan memperhatikan hal-hal penting seperti hubungan negara dengan agama. Mengingat pentingnya penuntasan masalah tersebut, maka ada inisiatif dari Panitia Delapan untuk meluaskan gagasan dengan melibatkan semakin banyak tokoh, sehingga diundanglah 38 tokoh sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>25</sup> Hasil masukan ke 38 tokoh ditambah Panitia Delapan ini dimatangkan oleh Tim Sembilan. Hasilnya adalah lahirnya rumusan redaksi “Rancangan Mukadimah Hukum Dasar”. Rumusan rancangan mukadimah hukum dasar ini kemudian oleh Moch. Yamin disebut “Jakarta Charter” atau “Piagam Jakarta”.<sup>26</sup>

Redaksi Piagam Jakarta adalah; ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,

---

<sup>22</sup>Tim Sembilan: (Ketua) Soekarno, (Anggota) Ki Bagus Hadikusuma, Wakhid Hasyim, Moch. Yamin, Ahmad Soebardjo/A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosuyoso, Muh. Hatta, dan Agus Salim. Lihat Sarinah Dkk., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 15.

<sup>23</sup>Panitia Delapan: (Ketua) Soekarno, (Anggota) Muh. Hatta, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso, Ahmad Soebardjo, dan Moch. Yamin. Lihat Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 50.

<sup>24</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 49.

<sup>25</sup>Versi lain menyatakan 39 orang. Lihat St. Sularto, *Konflik...*, hal. XVI.

<sup>26</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 50.

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, menarik bila dicermati ada perubahan rumusan Piagam Jakarta hasil Tim Sembilan dibanding bahan kesepakatan yang diberikan Panitia Delapan berdasarkan hasil Rapat BPUPKI ke-1. Bahwa masukan dari 38 atau 39 tokoh Nasional menghendaki perhatian khusus terhadap relasi agama-negara. R.E. Elson menggambarkan bagaimana ada diskusi serius saat itu antara dua kepentingan, antara yang mengedepankan masa depan kebangsaan dengan yang mengkhawatirkan masa depan Islam.<sup>27</sup>

Momentum kesepakatan dalam pembentukan dasar negara ini sangat penting bagiantisipasi kesalahpahaman filsafat kenegaraan bagi generasi Indonesia di masa mendatang. Klarifikasi proses dalam bentuk historiografi yang memadai tentu menjadi kebutuhan mendasar sebelum ruang tafsir atas maksud sejarah berkembang liar. Kelas perkuliahan di perguruan tinggi keagamaan Islam bisa menjadi tempat yang baik untuk meneliti proses perubahan-perubahan substansial Pancasila ini agar di kemudian hari selalu ada penjelasan yang memadai bagi tarik-menarik kepentingan antara agama-negara di Indonesia. Namun apapun itu, Pancasila yang sampai pada generasi sekarang adalah Pancasila dengan sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Selanjutnya Pancasila kembali diputuskan dalam bingkai kenegaraan yang lebih mengikat. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dilanjutkan oleh kepanitian lebih spesifik ke arah persiapan kemerdekaan, PPKI. PPKI sendiri merupakan

---

<sup>27</sup>R.E. Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Terj. Zia Anshor (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hal. 164.

usulan dari BPUPKI, sedangkan draft dasar negara yang akan dilanjutkan oleh PPKI adalah apa yang dihasilkan oleh hasil akhir rapat BPUPKI ke-2. Menariknya, hasil pleno terakhir rapat BPUPKI ke-2 yang diserahkan ke PPKI tetap menyatakan redaksi sila pertama dengan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. PPKI melakukan *pleno* pertama pada 18 Agustus 1945 sekaligus sebagai penetapan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup>

Sejarah kembali memberi catatan sangat menarik. Bahwa justru di saat-saat menjelang penetapan dasar-dasar negara baru Republik Indonesia ini terjadi peristiwa luar biasa. Sebelum sidang PPKI berlangsung, dikisahkan bahwa Muh. Hatta secara darurat mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohamad Hasan untuk membicarakan hal penting selama kurang lebih 15 menit. Hasil dari diskusi singkat oleh lima orang inilah yang diyakini mengubah Piagam Jakarta dengan perubahan redaksi pada poin pertama. Perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa.

PPKI, selain menetapkan Pancasila atau Piagam Jakarta (dengan perubahan) sebagai dasar negara dalam naskah pembukaan UUD 1945, ia juga menetapkan beberapa hal penting yakni; rancangan hukum dasar atau UUD RI 1945, serta penetapan Ir. Soekarno dan Muh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. PPKI juga menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden akan dibantu menjalankan tugas-tugasnya oleh sebuah komite nasional sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keseluruhan ketetapan PPKI

---

<sup>28</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan...*, hal. 55.



ini merupakan tonggak awal landasaan kebangsaan yang sah dan mengikat setelah Indonesia merdeka.

Menurut perspektif partisipatori, sejarah proses pembentukan tim, keanggotaan tim, serta proses kerja dan keputusan BPUPKI maupun PPKI belum banyak mengakomodir perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar perempuan tidak banyak berperan pada saat itu atautkah hanya sejarah *mainstream* saja yang tidak melibatkan peran perempuan dalam narasi peletakan dasar kenegaraan Indonesia. Di dalam keanggotaan BPUPKI, hanya ada satu perempuan yang terlibat, Raden Ayu Maria Ulfah Santoso. Di dalam postur keanggotaan PPKI, bahkan tidak ada satupun perempuan yang ikut serta. Maria Ulfah adalah putri kelahiran Semarang yang saat itu langsung dipercaya menjadi menteri sosial pada Kabinet Sjahrir II.<sup>29</sup>

Untuk menjelaskan sedikit banyak keterlibatan atau ketidakterlibatan perempuan dalam proses peletakan dasar negara, perlu dijelaskan secara singkat perkembangan pergerakan perempuan sejak awal 1900-an. Sejarah pergerakan perempuan telah dimulai secara sporadis di awal Abad ke-20. Pada tahun 1912, di Jakarta didirikan organisasi perempuan pertama, Putri Mardika. Pendirian organisasi ini banyak mendapat bantuan dari aktifis Budi Utomo, terutama oleh Wahidin Sudirohusodo. Tujuan utama Putri Mardika adalah memberi bantuan biaya bagi sebanyak mungkin perempuan untuk mendapat pendidikan. Pada tahun 1913, Putri Mardika sudah berhasil menerbitkan surat kabar mingguan dengan banyak artikel yang fokus pada pembelaan hak-hak perempuan dalam budaya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Hassan Shadily, ed., *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984), hal. 3317.

<sup>30</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 78.

Selain Putri Mardika, organisasi perempuan yang lain adalah Keutamaan Istri di Sunda (1912), Pawijatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hado di Jepara (1915), dan Wanito Susilo di Pemalang (1918). Tokoh-tokoh populer perempuan yang dihasilkan pada masa ini salah satunya adalah Ny. Abdoerachman, ia adalah penulis artikel keperempuanan yang kosen pada hak-hak perempuan yang dirugikan karena pernikahan dini dan poligami pada surat kabar mingguan Putri Mardika. Tokoh lain seperti Siti Soendari populer dengan langkah strategisnya membangun media independen perempuan yang bernama Wanito Sworo pada 1913.

Pada tahun-tahun yang hampir bersamaan, organisasi perempuan juga menyebar pada wilayah Indonesia yang lebih luas. Di antara yang akhirnya bangkit adalah organisasi Putri Budi Sedjati di Surabaya. Tahun 1914 berdiri Keradjinan Amai Setia di Kota Gadang Sumatera Barat, tujuan organisasi ini adalah membekali perempuan dengan keterampilan. Keutamaan Istri Minangkabau lahir di Padang Panjang. Bukittinggi adalah pusat komunikasi organisasi perempuan seluruh Sumatera dengan nama Sarekat Kaum Ibu Sumatra, dengan produksi media tulisannya yang masif tentang perempuan. Pada tahun 1917, di Minahasa lahir perkumpulan dan media PIKAT (Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan).<sup>31</sup>

Selain organisasi berbasis kedaerahan, organisasi perempuan juga lahir dari basis keagamaan. Pada tahun 1912 saat Muhammadiyah dan Sarekat Islam berdiri, kedua organisasi ini juga memberi fasilitas bagi pergerakan perempuan sebagai sayap, Muhammadiyah dengan Aisyiah dan Sarikat Islam dengan Wanudijo Utomo yang kemudian berganti menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Selain itu, gerakan

---

<sup>31</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 81.

perempuan dalam organisasi tersegmentasi khusus seperti kepanduan (pramuka), Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Sulawesi, dan Jong Islamietyen telah mengakomodir kepentingan perempuan baik dalam bentuk akomodasi sebagai anggota maupun akomodasi program.<sup>32</sup>

Munculnya gerakan terorganisir perempuan di seluruh penjuru Indonesia selaras dengan berkembangnya pikiran masyarakat Indonesia. Jong Java dan Jong Sumatra adalah salah satu contoh dari sekian organ yang konsen menulis media tentang perempuan. Pada kesempatan lain pada kongres pertama pemuda di tahun 1926 juga digemakan pidato luar biasa dari seorang lelaki terpelajar tentang pentingnya pengakuan atas peran perempuan beserta hak-haknya setara laki-laki, Bahder Djohan, seorang yang kelak menjadi rektor UI.<sup>33</sup> Puncak dari gelombang organisasi perempuan pertama ini adalah lahirnya Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), sebuah organ perempuan yang mulai bersifat nasional, tidak lagi lokal.

PPI lahir dari Kongres Perempuan Indonesia, kongres ini pertama kali diselenggarakan pada 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta. Dari penyelenggaraan kongres ini kemudian kini diperingati sebagai Hari Ibu. Selain menetapkan PPI, kongres ini juga memberi rekomendasi advokatif yang ditujukan kepada pemerintahan Hindia Belanda agar meningkatkan jumlah sekolah untuk perempuan, deklarasi atas hak-hak perempuan saat pernikahan, serta jaminan kesejahteraan pada perempuan janda dan yatim atau piatu.<sup>34</sup> Pada tahap ini, gerakan perempuan selain sudah nasional juga sudah mulai efektif berhasil mengomunikasikan kepentingannya pada pemerintahan.

---

<sup>32</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 87.

<sup>33</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 89.

<sup>34</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 124.

Kongres PPI Kedua berlangsung di Jakarta pada Desember 1929. Nama PPI kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). PPII adalah wadah yang pertama kali melarang penggunaan Bahasa Belanda pada corong medianya dan mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia.<sup>35</sup> Pada saat itu gerakan nasional perempuan mulai mendapat perhatian serius dari *founding fathers*, seperti Soekarno. PPII terus berproses dengan pertemuan nasional secara rutin tiap tahun, yang pertama diadakan di Surabaya pada 1930. PPII menjadi federasi berkumpulnya organisasi perempuan terbesar, meski demikian ada yang terpisah dari federasi tersebut. Organisasi perempuan Isteri Sedar yang didirikan di Bandung dengan ketua Soewarni Pringgodigdo terpisah dari PPII, karena dianggap terlalu keras.<sup>36</sup>

Pada 1931, PPII berkesempatan mengikuti forum internasional yang diadakan di India, Lahore. Forum internasional tersebut adalah Kongres Perempuan Asia yang merupakan komunikasi pertama gerakan perempuan Indonesia dengan gerakan perempuan dunia. Pada saat yang sama Isteri Sedar menyelenggarakan pertemuan rutin mereka sendiri. Dua kekuatan organisasi perempuan yang tidak sependangan ini diperkaya dengan lahirnya organisasi perempuan baru berbasis Islam, Sarekat Isteri Jakarta, yang menentang sepak terjang PPII maupun Isteri Sedar. Sarekat Isteri Jakarta, yang karena basis keislamannya, berpandangan bahwa perjuangan Isteri Sedar maupun kesepakatan Lahore menyinggung ajaran poligami dalam Islam.<sup>37</sup>

Isteri Sedar adalah fenomena pertama dinamika ketidaksepehaman antar organisasi perempuan kemudian

---

<sup>35</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 125.

<sup>36</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 126.

<sup>37</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 127.

dipersengit dengan lahirnya Sarekat Isteri Jakarta. Pada tahun 1932, konteks perpolitikan tanah air dengan semakin tidak menentunya kekuatan Hindia Belanda mengarahkan Isteri Sedar untuk memilih jalan lebih masuk ke dunia politik. Deklarasi Isteri Sedar yang terang-terangan masuk ke dunia politik, meski secara kelembagaan tidak sepaham dengan PPII, namun secara faktual diam-diam disetujui oleh para aktifis perempuan lintas organisasi. Jadi, meskipun banyak aktifis yang secara organisasi memutuskan tidak terlibat politik, namun secara pribadi punya ketertarikan. Pada tahun 1932 yang sama ini berdiri organisasi perempuan baru bernama Isteri Indonesia yang diketuai Maria Ulfah Santoso.<sup>38</sup>

Pada 1938, Maria Ulfah Santoso gagal menjadi anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda) dan posisi tersebut diduduki oleh perempuan Belanda. Dari sini kita pahami bahwa peran perempuan tidak lagi selalu dihambat oleh laki-laki, ada kalanya perbedaan identitas agama, suku, kebangsaan, dan politik menyebabkan antara sesama perempuan saling membatasi. Pergumulan peran perempuan di seputar lahirnya Pancasila dan lahirnya dasar negara yang lain tidak bisa lepas dari konteks struktural Indonesia yang pada saat itu masih belum sepenuhnya mengapresiasi kepemimpinan perempuan. Perempuan sudah diakui kekuatannya namun diakui dengan sangat terbatas.

Status keanggotaan Maria Ulfah Santoso pada BPUPKI patut diapresiasi namun juga disayangkan. Di saat pada jaman tersebut telah banyak bukti pergerakan perempuan yang signifikan sumbangsuhnya bagi penguatan dasar kebangsaan, perempuan tetap belum terbukti dilibatkan dalam struktur kekuasaan yang memadai. Formasi keanggotaan dalam risalah

---

<sup>38</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah...*, hal. 127.

rapat BPUPKI maupun PPKI merupakan bukti otentik yang menjelaskan posisi perempuan dalam proses perumusan negara. Tantangan kita hari ini adalah untuk meneliti, mendiskusikan dan menjawab apakah ada informasi peran perempuan dalam proses penting kebangsaan ini.

## **Penutup**

Setelah membaca seluruh uraian dalam paragraf-paragraf di atas, maka mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ulang bagaimana sejarah perjuangan pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Mahasiswa juga bisa mengelaborasi lebih luas apakah perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak jaman penjajahan masuk ke Indonesia tersebut dilakukan oleh aktor tertentu ataukah dilakukan oleh seluruh elemen. Bagaimana dengan peran perempuan-perempuan Nusantara yang sumbangsuhnya bagi perjuangan bersenjata juga tercatat dalam sejarah. Apakah peran-peran perempuan Nusantara tetap akan dianggap tidak setara dengan peran laki-laki kemudian berkonsekwensi pada pengakuannya yang juga tidak setara.

Ada pola perjuangan perempuan pada masa-masa perang yang bisa diasumsikan menjadi proposisi (teori kecil), bahwa perempuan Aceh dan kekuatan perempuan luar Jawa lainnya lebih masif dibanding kekuatan perempuan dalam perang. Apakah asumsi ini bisa dibenarkan berdasarkan riset-riset yang lebih mendalam. Jika benar, bagaimana karakter perjuangan peperangan perempuan-perempuan Jawa dan bagaimana model praktik perannya. Apakah perbedaan karakter perempuan yang sejak awal berbeda dalam hal etnisitas, agama, dan pandangan budaya ini menjadi indikator yang bisa melahirkan asumsi lain mengenai faktor-faktor penyebabnya. Diskusi di kelas yang lebih kaya dan eksploratif diperlukan untuk semakin memperdalam bagian ini.

Proses berkembangnya gagasan nasionalisme dari nasionalisme purba, nasionalisme tua, hingga nasionalisme modern sebagaimana diutarakan oleh Yudi Latif layak diperdalam. Mahasiswa diharapkan mampu meneruskan kajian ini dengan cara memikirkan ulang apakah demikian adanya atautkah ada nasionalisme bentuk lain yang ditemukan informasinya dari sumber berbeda. Bagaimana dan siapa saja yang berperan dalam perkembangan gagasan nasionalisme ini. Apakah mayoritas dan minoritas, apakah laki-laki dan perempuan mendapat momentumnya masing-masing dalam berperan dalam gagasan nasionalisme yang berkembang tersebut.

Selanjutnya, proses lahirnya Pancasila adalah proses intelektual yang panjang. Sebagai proses intelektual, kepemimpinan akademik diyakini menjadi kekuatan yang paling dibutuhkan. Perang gagasan oleh aktor-aktor cerdas pandai pada akhirnya mengantarkan pada situasi di mana hanya mereka yang secara kodrat unggul saja yang akan tampil memimpin. Bagaimana tokoh-tokoh unggul seperti Soekarno dan Muh. Hatta hampir selalu ada di tengah pusaran dan bagaimana kabar tokoh-tokoh lain yang akhirnya terlempar. Bagaimana jika ia bahkan bukan tokoh sama sekali, apakah ia dianggap tidak mendapat peran dalam proses tersebut.

Pembentukan BPUPKI dengan kedua rapatnya, kemudian PPKI dengan pleno penetapannya merupakan proses yang harus diikuti. Diharapkan dari proses ini mahasiswa mampu menjelaskan ulang bagaimana Pancasila dibangun sejak mulai awal sekali. Bagaimana setiap fase rapat oleh badan-badan ini menghasilkan kesepakatan yang berjenjang dan dinamis. Mahasiswa harus bisa menjelaskan kembali bagaimana riwayat teks Pancasila menjadi seperti sekarang ini. Masuknya ide

perubahan sesaat sebelum dasar negara ditetapkan dari sila pertama yang menguatkan kepentingan umat Islam menjadi sila pertama yang lebih netral harus pula bisa dielaborasi oleh mahasiswa.

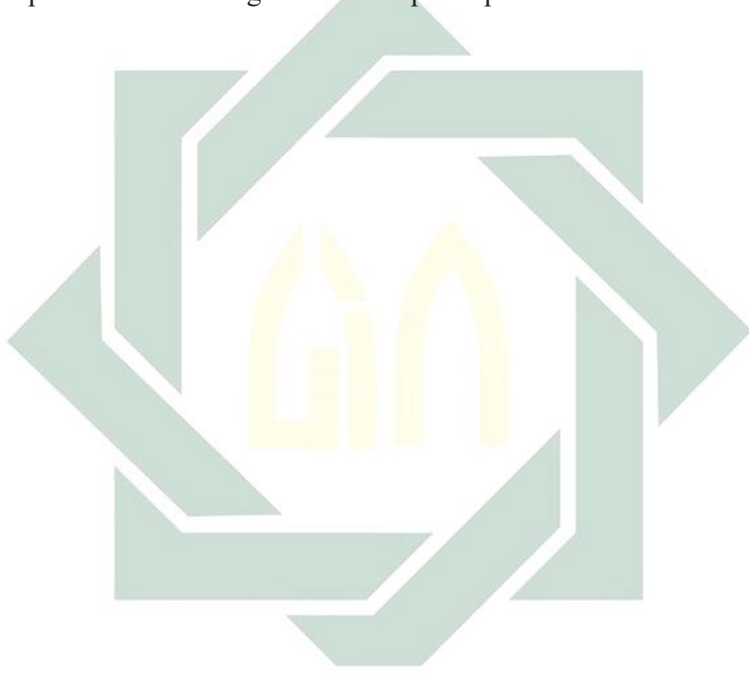
Mahasiswa juga bisa menjelaskan secara panjang lebar, bagaimana peran perempuan dalam proses pembidanan Pancasila ini. Apakah uraian di atas sudah mengompilasi seluruh informasi tentang perempuan ataukah justru serba berkekurangan. Bisakah mahasiswa mendiskusikan persoalan peran perempuan yang dianggap masih belum diakui dalam proses lahirnya Pancasila pada uraian di atas ke sebuah proyek penelitian lebih dalam yang bertujuan membuktikan kesimpulan sebaliknya. Diharapkan dari refleksi dari bagian penutup ini menghasilkan dinamika kelas yang lebih baik, yang semakin meluaskan cakrawala informasi tentang hal lain di luar sejarah *mainstream* yang belum diungkap yang termasuk tentang pengayaan peran perempuan.

### **Latihan**

1. Bagaimana gambaran tentang manusia Nusantara purba?
2. Bagaimana gambaran manusia Nusantara di jaman kerajaan Hindu Budha?
3. Sesaat datang ajaran Islam di Nusantara, bagaimana wajah Nusantara pasca-Islam masuk?
4. Kapan Indonesia berdiri? Dan bagaimana perjuangan menjadi Indonesia yang berdaulat?
5. Bagaimana peran perempuan dalam proses perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan?
6. Apa saja yang dipersiapkan dan apa yang ditempuh secara strategis oleh bangsa Indonesia menjelang kemerdekaannya?
7. Bagaimana proses BPUPKI dan PPKI mempersiapkan konsep kemerdekaan dengan dasar negara yang kokoh?



8. Bagaimana gambaran posisi perempuan dalam proses peletakan dasar negara tersebut?
9. Bagaimana konteks pergerakan perempuan dalam organisasi sepanjang sejarah seputar kemerdekaan?
10. Apa yang bisa dikembangkan mahasiswa untuk sejarah perjuangan kemerdekaan yang mengakomodir sumbangsih dan peran semua kalangan termasuk perempuan?





## Bagian 2

### Dinamika Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan

- Kemampuan mahasiswa** : Mahasiswa mampu memahami keterlibatan perempuan dalam dinamika politik pasca kemerdekaan.
- Indikator** : - Mampu menjelaskan peran perempuan di seputar revolusi kemerdekaan.  
- Mampu menjelaskan fungsi Pancasila sebagai konsolidator nasional.  
- Mampu menjelaskan jaminan Pancasila terhadap hak kesetaraan perempuan.
- Bahan kajian** : - Sejarah Indonesia pasca merdeka.  
- Sejarah masa revolusi kemerdekaan dan bukti signifikansi Pancasila.  
- Peran dan jaminan hak kesetaraan perempuan di seputar revolusi kemerdekaan.
- Metode belajar** : Menonton Film, melihat gambar sejarah, diskusi, dan penelitian referensi terkait.
- Waktu belajar** : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.

- Pengalaman belajar** : Mahasiswa mengalami pelajaran tatap muka dan diskusi, mengalami penelitian dan berbagi informasi menggunakan media belajar *online*, serta mengalami pengalaman menuliskan kesimpulan di media sosial tentang peran perempuan dalam pergerakan pasca kemerdekaan serta pemantapan signifikansi Pancasila di masa revolusi sebagai media konsolidasi nasional. Perkuliahan bisa dilakukan 2-3 kali pertemuan.
- Manajemen Pertemuan** :
- Kriteria / bobot penilaian** : Penilaian proses belajar (40%), penilaian produk belajar (30%), penilaian etika belajar (30%).
- Indikator materi RG** : Perempuan dipresentasikan dalam proses perjuangan pasca kemerdekaan dan masa-masa ketahanan Pancasila.
- Indikator strategi RG** : Mahasiswa mengumpulkan dan menggali referensi tentang peran perempuan di sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, revolusi kemerdekaan, hingga perjuangan untuk ketahanan Pancasila.

## Pendahuluan

Masa-masa pra-kemerdekaan Indonesia tidak seluruhnya berisi peperangan dan perjuangan fisik melawan penjajahan. Pola penjajahan hampir selalu diawali dengan penetrasi fisik, peperangan, kemudian dilanjutkan dengan penjajahan terstruktur pelebagaan monopoli ekonomi. Portugis dan Belanda melakukan strategi penjajahan ini. Catatan sejarah menunjukkan, meski sama-sama mengandalkan strategi yang sama, Belanda lebih baik dan Portugis tidak mampu bertahan lama.<sup>39</sup> Hal ini memberi penjelasan kenapa catatan penguasaan Portugis atas tanah-tanah di Indonesia tidak selama Belanda.

*Vereenig-de Oost-Indische Compagnie* (VOC) merupakan kesatuan dari banyak penjelajah swasta Belanda yang sebelumnya saling bersaing mengincar Indonesia dan merebutnya dari pengaruh Portugis. Dicitat oleh Ricklefs bahwa keinginan pengambilalihan Belanda ini berasal dari informasi orang-orang Belanda yang awalnya bekerja pada Portugis dan menganggap kepemimpinan Portugis tidak terampil. Ini merupakan persaingan antar Bangsa Eropa atas wilayah jajahan. Atas VOC, maka pemerintahan resmi di Belanda memberi kewenangan penuh untuk merepresentasikan kerajaan Belanda secara resmi, dengan izin melakukan penyerangan, membuat koloni, dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal.<sup>40</sup>

Jadi, pada dasarnya VOC merupakan kekuatan bisnis yang dipersenjatai yang karena misi sektoralnya memiliki kekuatan berlipat-lipat setelah ditambah amanat dari iklim perekonomian di tanah Belanda yang juga terpuruk. Setelah VOC berhasil mengambil alih dominasi Portugis, ia berhasil menancapkan

---

<sup>39</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj., Tim Serambi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hal. 43.

<sup>40</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 49-51.

sistem perdagangan monopoli beserta pranata sosial, politik, agama, dan budaya Belanda di sebaran Wilayah Indonesia yang hingga menjelang kemerdekaan Indonesia masih berpengaruh. Model inilah yang dimaksud dengan penjajahan yang tidak selalu berarti konfrontasi fisik. Volksraad atau Dewan Rakyat merupakan salah satu contoh bentuk penyesuaian penjajahan baru dengan orientasi baru dari dominasi ke hegemoni.

Jepang mulai masuk ke Indonesia dan memulai pendudukan di bulan-bulan pertama 1942. Sebagai negara yang masih berstatus terjajah oleh Belanda, bagi Indonesia pendudukan Jepang adalah suasana baru, ketidakmenentuan baru, namun juga kesempatan baru. Pada gebrakan pertama pendudukannya, Jepang menyebutkan dirinya sebagai sesama saudara Asia bagi Indonesia. Jepang juga memberi beberapa kelonggaran lain, seperti izin pengibaran bendera merah putih, izin penggunaan Bahasa Indonesia, dan izin menyanyikan Lagu Indonesia Raya. pengambilalihan Jepang atas Belanda menyiratkan harapan bahwa Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama.<sup>41</sup>

Meski pasukan Pembela Tanah Air (PETA) telah terbentuk secara resmi sejak 3 Oktober 1943, namun konon baru pada 1944 mulai mendapatkan momentumnya secara dramatis saat dilaksanakan upacara yang mengibarkan bendera secara bersama antara bendera Jepang dengan Merah Putih.<sup>42</sup> Ada tangisan haru, ada kebahagiaan, namun juga ada pekerjaan lebih besar yang segera akan menentukan apakah kemerdekaan bangsa secara penuh akan terjadi sebentar lagi. Dua pekan pasca proklamasi kemerdekaan, ada rapat lain yang juga raksasa

---

<sup>41</sup>Yudi Latif, Negara Paripurna, *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 326.

<sup>42</sup>Bagin, Topan Menjelang Fajar (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1983), hal. 127.

sebelum rapat raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Pada saat itu Bendera Merah Putih menghiasi angkasa meski secara *de facto* pemerintah Jepang masih berkuasa penuh.<sup>43</sup>

Pada bagian ini ingin ditegaskan bahwa secara kejiwaan, seluruh elemen bangsa saat itu hanya fokus pada satu keinginan bersama, kemerdekaan secara penuh. Pengalaman perjuangan melawan penjajah memasuki babak-babak akhir, dan tinggal selangkah lagi kedaulatan sebagai bangsa yang bernegara akan terwujud. Seluruh bangsa Indonesia saat itu seolah tidak mampu lagi menahan diri mendapatkan kembali hak-hak manusia merdeka yang selama ratusan tahun terenggut. Pada saat itu, perasaan bersatu sebagai sesama anak bangsa ada di puncak kekuatannya. Tubuh kebangsaan saat itu bersatu sangat pejal, tidak ada kisah perselisihan yang berarti.

Kebutuhan paling utama bagi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan adalah konsolidasi nasional. Hal ini tidak hanya karena dengan konsolidasi kekuatan nasional akan bertambah berlipat-lipat menyempurnakan kemerdekaan, tetapi juga akan sangat berbahaya jika negara muda ini harus terkoyak sehingga mengancam cita-cita kemerdekaan. Persoalannya adalah secara teori hal ini tidak akan berjalan mudah. Indonesia dengan definisi keluasan geografi, kekayaan budaya, serta dengan keragaman kepentingan tiap unsur pembentuknya akan butuh waktu untuk mengonsolidasi diri. Oleh siapa dan dengan formula seperti apa proyek konsolidasi ini akan dicerna oleh bangsa.

Proklamasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah formula yang dimiliki. Dari sana seluruh harapan persatuan yang melahirkan kekuatan

---

<sup>43</sup>Moehkardi, *Bunga Rampai Sejarah Indonesia, dari Borobudur hingga Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1918), hal. 38.

merdeka ditumpukan, tidak ada tumpuan lain lagi selain itu. Potensi persilangan pendapat, perpecahan karena kepentingan yang tidak diakomodasi dengan baik harus selesai oleh semangat kemerdekaan dan Pancasila beserta turunannya. Indonesia saat itu adalah bangsa yang paling berbahagia karena telah merdeka, tetapi juga bangsa yang sangat rentan tidak boleh meleset meletakkan landasan kehidupannya agar terus bertahan.

## **Revolusi Nasional**

Pasca ketetapan PPKI yang mendeklarasikan Pancasila sebagai dasar negara dan mengangkat Soekarno Hatta sebagai Presiden Wakil Presiden, tugas bangsa selanjutnya adalah menjalani hidup bernegara dengan pekerjaan berat membangun kesatuan gerakan menuju kemerdekaan secara penuh. Bahwa sesungguhnya proklamasi tidak serta merta melepaskan seluruh pengaruh penjajahan Belanda atas Indonesia. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia baru terjadi di 23 Agustus 1949, setelah lahir kesepakatan kedua belah pihak pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Bahkan pada maklumat pengakuan kedaulatan ini, masih ada beberapa syarat yang diajukan Belanda, yakni tentang kekuasaan model federal dalam Republik Indonesia Serikat serta belum disertakannya Irian sebagai wilayah Indonesia.<sup>44</sup>

Selain masih terus berhadap-hadapan dengan kepentingan asing Belanda dan Jepang, pada tubuh 'kelompok nasionalis' sendiri masih diwarnai perpecahan yang tidak bisa diabaikan. Cengkeraman Belanda selama ratusan tahun membawa bekas-bekas cara berfikir taktik adu domba yang bercampur dengan euforia kemerdekaan. Pada tubuh Bangsa Indonesia sendiri

---

<sup>44</sup>Bachtiar Chamsyah Dkk., *100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai dengan Sejarah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), hal. 189.

waktu itu masih tercabik-cabik antara mereka yang sejak awal menentang keras Belanda, mereka yang membantu dan dibantu Belanda, serta mereka yang beretnis asing lain seperti Arab dan Cina. Masa-masa pembentukan identitas nasional yang menantang ini konon merenggut banyak korban, kebanyakan perang saudara terjadi di saat ini. Slogan ‘merdeka ataoe mati’ konon tidak untuk Belanda, tetapi untuk mengancam sesama anak bangsa yang tidak sejalan dengan kekuatan dominan.<sup>45</sup>

Mereka yang menentang Belanda pun terbagi dalam beragam modus dan strategi, ada model Soetomo dan kawan-kawan dengan Partai Persatuan Bangsa Indonesia kemudian menjadi Partai Indonesia Raya yang menggunakan taktik kooperatif bersaing pengaruh dengan Partindo kemudian Gerindo (Gerakan Ra’jat Indonesia) yang dimotori Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, dan kawan-kawan yang lebih keras kepada Belanda.<sup>46</sup> Kelompok yang lebih keras kepada Belanda pun masih terpecah, sebagian besar menentang karena tidak ketemunya pandangan mereka dengan kapitalisme *ala* Sekutu dan Amerika, namun sebagian kecil lainnya lebih radikal dengan mempromosikan komunisme dengan terang-terangan.

Situasi serba berserakan ini yang selain mencekam, namun juga menjadi penyadaran sangat keras bagi semua elemen terutama elit. Kesempatan hampir merdeka yang masih dirudung perselisihan harus segera diantisipasi, segera perlu dilakukan manuver efektif untuk menumbuhkan semangat persatuan sebagai prasyarat multak Kemerdekaan. Digambarkan saat itu, bahwa tonggak 1942 hingga 1945

---

<sup>45</sup>Gert Oostindie, *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950, Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*, Terj., Susi Moeiman Dkk. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 7.

<sup>46</sup>Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Terj., Samsuddin Berlian (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hal, 44o.



merupakan masa-masa peletakan dasar kohesi nasional lintas etnis, lintas kepercayaan, lintas politik, lintas kelas, dan lintas gender.<sup>47</sup> Soepomo, Moh. Yamin, dan Soekarno tidak henti-hentinya memidatokan pentingnya persatuan kebangsaan sebagai landasan kemerdekaan. Landasan ini yang muncul di awal-awal pengusulan dasar negara.

Melalui bahasa yang pas dari analisis sederhana namun akurat, Ricklefs menyatakan situasi pada masa-masa revolusi ini sebagai tahun yang membentang antara 1945 hingga 1950 yang berisi kerinduan merdeka namun harus terlebih dahulu mengatasi cerai-berai.<sup>48</sup> Iklim yang selama perjuangan Kemerdekaan pra Proklamasi yang begitu sektoral dan terpisah, kemudian dipaksa harus bersatu pasca proklamasi merupakan situasi kacau-balau yang mudah ditebak. Kontestasi antara kanan-kiri, antara kooperatif-konfrontatif, antara Jawa-non-Jawa, agamawan-sekuler, atau antara agamawan Muslim dengan agamawan non-Muslim terjadi di semua segmen, membentuk rivalitas sangat seru.

Yang pertama-tama menjadi perhatian saat itu adalah kualitas kepemimpinan pusat. Presiden Soekarno dan wakil Presiden Muh. Hatta masih dianggap lemah sebagai kekuatan persatuan, terutama pengaruhnya yang masih dipertanyakan di kalangan elit Jakarta. Namun demikian, kharisma dwi-tunggal Soekarno-Hatta efektif bagi mayoritas rakyat di penjuru negeri, yang kebanyakan belum terpelajar. Untuk menguatkan peran kepemimpinan Soekarno-Hatta, PPKI menetapkan mekanisme bantuan mengelola pemerintahan utuh dengan Kominte Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini, selain sebagai alat bantu paling sah mengawal Presiden, ia juga bermanfaat

---

<sup>47</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 328.

<sup>48</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 446.

untuk memangkas berbagai kepentingan kepartaian yang terus berusaha tampil, seperti PNI sebagai wujud lain Jawa Hokokai.<sup>49</sup>

Faktor keterbatasan teknologi komunikasi yang terlebih dihambat oleh geografi kepulauan juga menyebabkan koordinasi antara kabar proklamasi kemerdekaan di Jakarta dengan area-area perjuangan terpencil lambat. Di daerah-daerah terjauh, kabar proklamasi baru masuk pada September 1945. Tidak hanya persoalan kelambatan, konfirmasi atas Kemerdekaan Indonesia juga bermasalah, masih banyak situasi lokal per-daerah tidak langsung menyambut kemerdekaan dengan baik.<sup>50</sup> Pada beberapa kasus kerajaan yang memiliki kedekatan dengan Belanda, masih enggan bergabung dengan kekuatan revolusi kemerdekaan. Masa revolusi adalah masa penyatuan kebangsaan yang sangat menantang.

Soekarno konon menyebut persatuan ini dalam kesempatan berkali-kali. Pada beberapa pidatonya bahkan ia sangat serius menjelaskan bahwa inti kebangsaan adalah persatuan. Menurutnya, Bangsa Indonesia adalah bukan Bangsa Minangkabau, bukan Bangsa Minahasa, bukan Bangsa Sunda, bukan Bangsa Jawa, melainkan memang Bangsa Indonesia yang disatukan oleh kesamaan nasib dan kesamaan tekad untuk bersatu. Soekarno tidak segan-segan mengutip slogan filolog Prancis, Ernest Renan dan politisi Austria Otto Bauer tentang persatuan. Kesimpulan konseptual akan kesatuan kebangsaan ini disebut juga dengan kesatuan geo-politik, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka di seluruh bekas kekuasaan Hindia Belanda yang bersatu dalam kesepakatan Negara Kesatuan atau Republik.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 449.

<sup>50</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 450.

<sup>51</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 332-335.

Pada akhir 1945, November, kekuatan penyokong Belanda, Inggris bertempur sengit di berbagai tempat, paling hebat di Surabaya. Inggris menderita kekalahan hebat meski korban di pihak pejuang lebih banyak. Inggris beringsut kembali dan menarik diri dari barisan Belanda yang saat itu bersikukuh mempertahankan statusnya sebagai penguasa.<sup>52</sup> Kekuatan Belanda mulai makin melemah, sebaliknya kekuatan pejuang semakin mantab yang menghadirkan perlawanan bela tanah air semakin menggelora. Peta kekuatan militer yang berkecamuk saat itu adalah peralihan dari kembalinya kekuatan Sekutu atas Jepang pada masa-masa Indonesia baru saja mengambil momentum proklamasi kemerdekaan.

Usaha Belanda datang kembali sepeninggal pelucutan Jepang mengisi riwayat masa-masa revolusi ini. Tidak kurang dari 220.000 serdadu Belanda disiapkan untuk membungkam kembali kemerdekaan Indonesia.<sup>53</sup> Namun demikian, karena banyak faktor, terutama karena tekanan Internasional yang semakin kritis mempertanyakan manuver politik status quo kolonialisme oleh Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda, mereka akhirnya lebih banyak menempuh jalan diplomasi. Pada 15 November 1946 terlaksana Perjanjian Linggarjati. Perjanjian itu menegaskan dua hal, pertama Belanda mengakui nilai tawar Indonesia sebagai pihak yang diajak berunding, kedua Belanda mengakui bahwa hanya persoalan waktu hingga Belanda mengakui Indonesia merdeka. Artinya, hingga benar-benar Indonesia merdeka, Belanda akan terlibat pada proses peralihan.<sup>54</sup>

Pada Tahun 1947 Belanda memecahkan sendiri perjanjian Linggarjati dengan cara merusaknya melalui Agresi Militer

---

<sup>52</sup>Gert Oostindie, *Serdadu...*, hal. 6.

<sup>53</sup>Gert Oostindie, *Serdadu...*, hal. 8.

<sup>54</sup>Gert Oostindie, *Serdadu...*, hal. 9.

ke-1 atau dikenal juga dengan aksi Polisional ke-1. Manuver ini mengagetkan Indonesia sekaligus mengagetkan dunia internasional, termasuk para sekutu Belanda sendiri, di antaranya Amerika Serikat dan Australia. Meskipun aksi berhasil bagi Belanda dengan merebut beberapa pos strategis di Jawa, aksi ini mendapat tekanan internasional yang luar biasa. Bagi sebagian besar Sekutu, agresi ini merupakan manuver yang blunder.<sup>55</sup> Tidak lama dari peristiwa itu, di tahun yang sama, Sekutu bersama PBB mendesak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata dalam perjanjian baru, lahirah Perjanjian Renville, di Januari 1948. Renville adalah nama kapal USS, tampak dari sana bahwa Amerika Serikat memiliki andil pada momentum ini.

Pada akhir tahun yang sama saat Perjanjian Renville “diteken”, pada Desember 1948 Belanda kembali melakukan provokasi dengan Agresi Militer ke-2. Di saat Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi perpecahan internal dalam dirinya sendiri dengan kemunculan fraksi berbasis politik sosialis dan berbasis agama. Akibat politik dari serangan militer Belanda yang terpusat di Yogyakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota Sementara Republik Indonesia, mengakibatkan secara darurat kantor kepresidenan harus dialihkan ke Sumatera dengan Pemimpin Darurat Syafruddin Prawiranegara. Saat itu Indonesia diperintah oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Pada tahun berikutnya, April 1949 digelar Perjanjian Roem-Roijen di Jakarta. Perjanjian ini dalam rangka merespon dinamika politik di mana pada akhirnya Belanda mengarah pada pengakuan kedaulatan RI yang kelak baru “diteken” pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perjanjian Roem-Roijen menghasilkan kesepakatan terpenting yakni gencatan senjata

---

<sup>55</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 474.

hingga lahir upaya diplomasi pengelolaan republik melalui cara-cara yang disepakati kedua belah pihak. Pada Agustus 1949, KMB di Den Haag menghasilkan pengakuan resmi Belanda atas kedaulatan Indonesia namun dengan syarat perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat. Pada masa berlakunya RIS ini banyak terjadi gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia. Pada upacara peringatan ulang tahun proklamasi ke-5, Soekarno dan segenap bangsa Indonesia menutup era RIS dengan kembali ke Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Pada sepanjang sejarah revolusi yang melelahkan ini, informasi tentang posisi dan peran perempuan cukup terbatas. Sekilas tampak dalam daftar nama-nama pengisi kronik ini, perempuan hampir tidak pernah disebutkan. Bagi sejarah Indonesia pada lazimnya, lagi-lagi sejarah perempuan kembali tidak dikenal. Apakah peristiwa fenomenal pidato Siti Soendari dengan Bahasa Indonesia pada forum publik pertama yang menjadi gebrakan demonstratif bagi implementasi identitas nasional itu terulang lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Dan jika ada peristiwa berpengaruh seperti itu lagi, apakah ia hanya menjadi sejarah minor khusus bagi dunia perempuan, ataukah memang benar-benar luas pengaruhnya sebagai sejarah mayor.

Penalaran tentang peran perempuan tidak jarang menjadi unik ketika ia berpadu dengan perasaan. Misalnya Newberry mengulas dalam bukunya bahwa pada saat masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kiprah perempuan Jawa tidak bisa dipandang remeh, meskipun basis perjuangannya di rumah. Secara domestik, perempuan Jawa merupakan ratu dan penjaga moral di dalam rumah tangga sebagai pusat kebudayaan.<sup>57</sup> Artinya, ketika secara akademik

---

<sup>56</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 489.

<sup>57</sup>Jan Newberry, *Back Door Java, Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*, Ter., Bernadetta Esti Sumarah-Masri maris (Jakarta: Yayasan

tidak ada keraguan untuk mengakui bahwa peran domestik adalah sesuatu yang sangat penting bagi perempuan, namun apakah pengakuan tersebut juga menjadi nyata pada bidang-bidang kongkrit yang lain, termasuk akomodasi politik pada jamannya.

Di dalam bahasa yang lebih jujur dikatakan bahwa sesungguhnya peran perempuan sangat mendasar, sebagai penentu sekaligus penjaga nilai-nilai dasar kebangsaan, hanya saja peran ini tidak banyak disorot mata, tidak cukup diapresiasi oleh media, dan akhirnya sedikit sekali yang terekam dalam risalah sejarah. Pada awal-awal kemerdekaan, dengan ketidakmenentuan situasi seperti dijelaskan sebelumnya yang masih didominasi kekuatan fisik bersenjata, menjadikan perempuan secara nalar tidak dapat banyak berbuat di sektor publik. Ekonomi bangsa yang sedang rentang membuat energi perempuan lebih terarah pada upaya penyelamatan dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hanya perempuan-perempuan 'elit' yang memiliki cukup sisa waktu untuk mengembangkan keterbatasannya.

Menjadi sangat mafhum sekali bahwa bahkan hingga pada jaman seperti sekarang ini, pembagian peran perempuan Jawa sebagaimana pada saat kemerdekaan tetap saja berlangsung. Perempuan akan mendukung laki-laki atau suami untuk berjuang di sektor publik, sehingga untuk turut serta dalam peran yang sama di sektor publik, perempuan memiliki beban berlipat. Faktanya, dengan berlipat-lipatnya beban seperti itu, perempuan sudah akan kehabisan energinya di lipatan beban pertama, sehingga beban berikutnya tidak berdaya. Apa yang terjadi di Jawa adalah potret yang terjadi pada budaya seluruh Indonesia. Pada kajian Internasional sekalipun, pola

---

Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 171-172.

pembebanan budaya pada perempuan seperti ini hampir diakui sebagai fenomena universal.

Raden Ajeng Kartini tepat jika diungkap pertama-tama pada bagian ini. Ia adalah tokoh perempuan yang memulai tradisi literasi bagi kaumnya. Sebagai perempuan yang lahir di tengah keluarga bangsawan, kehendaknya yang kuat pada pendidikan berjodoh dengan kesempatan dan waktu yang cukup. Dicatat bahwa Kartini muda adalah pembaca tekun pada buku-buku serta majalah yang bertema kebudayaan, sastra, hingga sains. Kartini adalah pembaca fanatik Max Havelaar, Multatuli, Louis Couperus, Frederik van Eden, Augusta de Wit, Berta von Sutter, serta penulis dunia lainnya.<sup>58</sup> Secara umum, bacaan Kartini bertema perjuangan perempuan keluar dari beban-beban ketidakadilan budaya yang menghambatnya.

Informasi tentang Kartini ini mengisyaratkan dua informasi penting, pertama bahwa persoalan perempuan di mana-mana masih sama, yakni tentang perjuangannya meraih kesetaraan di segala bidang kehidupan. Kedua, perempuan hanya akan mendapatkan kesempatannya dalam kesetaraan melalui pendidikan. Kartini menyadari benar bahwa apa yang ia baca telah memberi gambaran tentang dunia selain Indonesia yang sebagiannya telah menempatkan perempuan pada peran-peran publik yang penting. Bagi Kartini, perempuan Indonesia tentu memiliki kans yang sama jika situasi eksternal banyak bidang mendukung tentang ini. Pikiran Kartini adalah pikiran yang wajar, namun menjadi luar biasa karena konteks saat itu dianggap sangat tidak memungkinkan.

Tuntutan pendidikan bagi perempuan menggelinding menjadi pekerjaan serius kebangsaan terutama sejak 1911 terbit

---

<sup>58</sup>Tetty Yukesti, *51 Perempuan Pencerah Dunia* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2015), hal. 191.

buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku ini menjadi pandu bagi pergerakan perempuan di seputar kemerdekaan, baik yang sifatnya internal hanya untuk organisasi keperempuanan maupun yang bersifat publik. Lahir, tumbuh, dan kembang organisasi perempuan sedemikian masif dan hampir rata-rata organisasi ini memberi catatan rekomendasi yang penting bagi kebangsaan. Kesadaran berserikat dan berkumpul menjadi strategi perempuan saat itu untuk menggalang kekuatannya agar suaranya terdengar. Pada 21 April 1964 Presiden Soekarno mendeklarasikan sebagai Hari Kartini dan Hari Libur Nasional.<sup>59</sup>

Bukti faktual yang mencatat keterlibatan perempuan pada peperangan dan revolusi fisik bersifat komplementer. Perempuan bertugas memberi dukungan langsung maupun tidak langsung pada perang. Mulai pelibatan perempuan untuk mengirim pesan, sandi, dan informasi pergerakan pasukan, pengumpulan logistik dan pengobatan, hingga perempuan-perempuan pemangkul senjata. Namun demikian, yang dimaksud dengan peran komplementer atau hanya sebagai daya dukung saja merupakan pemahaman dari fakta bahwa sesungguhnya bahkan dalam perjuangan tersebut masih saja banyak perempuan yang dimanfaatkan dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin laki-laki.<sup>60</sup>

Tentara Republik Indonesia pernah memberi pelatihan khusus bagi Laskar Wanita Indonesia bentukan di Bandung (LASWI) yang salah satu gembelannya dipusatkan di Yogyakarta untuk mendayagunakan kemampuan perempuan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan.<sup>61</sup> Selain itu

---

<sup>59</sup>Tetty Yukesti, *51 Perempuan...*, hal. 191.

<sup>60</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, Terj., Harsutejo (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010), Hal. 69.

<sup>61</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran...*, Hal. 148.



masih banyak lagi satuan khusus perempuan di Jawa seperti Persatuan Wanita Indonesia (PERAWANI) di Jakarta, dan Barisan Putri di Jawa Timur. Di luar Jawa ada Barisan Srikandi di Sumatera atau Laskar Rakyat di Sulawesi, selain di beberapa tempat lain di seluruh Indonesia.<sup>62</sup>

Hingga sebelum KMB digelar di Den Haag sebagai upaya akhir perundingan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, pergerakan perempuan bisa dibaca dalam beragam versi. Secara kronologis tentang pergerakan perempuan pada masa revolusi bisa dibaca ulang pada bagian satu buku ini. Hingga pada akhir periode ini beberapa tokoh perempuan sudah berhasil menembus posisi publik secara nasional setelah melalui proses perjuangan yang berliku. Yang paling terkenal perempuan-perempuan nasional yang tampil pada jabatan publik saat tersebut adalah Maria Ulfah Santoso sebagai Direktur Perdana Menteri, dan Suwarni Pringgodigdo di Dewan Pertimbangan Agung (DPA).<sup>63</sup> Di samping itu ada juga tokoh perempuan pejabat politik lain seperti S.K. Trimurti yang terus terlibat dalam gerakan diplomasi nasional sejak BPUPKI, KNIP, hingga ke kementerian.<sup>64</sup>

Suwarni Pringgodigdo dari organisasi Isteri Sedar dan Maria Ulfah Santoso dari organisasi Isteri Indonesia adalah aktifis perempuan yang merintis arah gerakan perempuan dari gerakan domestik ke gerakan publik.<sup>65</sup> Istri Sedar dengan afiliasi kepartaiannya, PNI, dan Maria Ulfah Santoso dengan latar belakang pendidikan modernnya di bidang hukum menjadi

---

<sup>62</sup>Ayatrohaedi, Tawalinuddin Haris, Sri Sutjiatiningsih, *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I* (Jakarta: Depdikbud RI, 1994), hal. 72.

<sup>63</sup>Ayatrohaedi, Tawalinuddin Haris, Sri Sutjiatiningsih, *Kumpulan...*, hal. 72

<sup>64</sup>Edy Suparjan, *Pendidikan...*, hal. 188.

<sup>65</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran...*, Hal. 150.

ujung tombak keterlibatan perempuan di dunia politik.<sup>66</sup> Suasana pada waktu jelas tidak mudah bagi perempuan untuk mendesak masuk ke dunia kepemimpinan laki-laki yang mendominasi penuh, namun keberhasilan keduanya menjadi penanda bahwa perempuan benar-benar terlibat dalam kebijakan publik di awal-awal Republik mengelola dan mempertahankan kemerdekaannya.

Lahirnya koalisi lebih besar dalam bentuk kongres bersama di antara organisasi perempuan pada 1946 di Sala melahirkan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kowani merangkul organisasi-organisasi perempuan dengan segenap kepentingan parsialnya masing-masing untuk menyepakati hal-hal mendesak yang dianggap penting di samping perjuangan masing-masing setiap organisasi. Tujuan utama Kowani adalah mendukung penuh revolusi nasional.<sup>67</sup> Kowani adalah forum terbesar pertama antara organisasi perempuan Indonesia yang mengakui dasar Negara Pancasila sebagai dasar organisasi dan bergerak aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi internasional.<sup>68</sup>

### **Pancasila Melindungi Seluruh Anak Bangsa**

Kelahiran Pancasila yang panjang, bahkan sebelum proses persidangan BPUPKI, sering dinyatakan sebagai proses menyejarah hasil kristalisasi norma bangsa, pikiran bangsa, dan pengalaman bersama bangsa. Pancasila merupakan simbol sekaligus harapan besar untuk meletakkan dasar normatif kebangsaan yang menjamin berlangsungnya implementasi religiusitas, kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban,

---

<sup>66</sup>Edy Suparjan, *Pendidikan Sejarah Untuk Membentuk Karakter Bangsa* (Sleman: Deepublish, 2019), hal. 193.

<sup>67</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran...*, Hal. 151.

<sup>68</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran...*, Hal. 152.

konsolidasi nasional, demokratisasi, dan kepastian hukum. Pancasila adalah rumah kebangsaan bagi semua anak-anak Indonesia untuk berteduh dan meminta perlindungan. Sebuah perlindungan menyeluruh, tidak hanya dari ancaman penjajahan bangsa asing, tetapi juga perlindungan dari ancaman sebangsa.

Pada bagian ini akan didiskusikan, bagaimana Pancasila diuji kesaktiannya, tidak hanya sekedar dari aspek ketahanannya menghadapi ideologi lain dunia yang sejak awal kemerdekaan saling berebut dominasi,<sup>69</sup> tetapi juga dari aspek kepastian efektifitas dan fungsinya bagi kehidupan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Pancasila ampuh memberikan pengaruh baik bagi berlangsungnya nilai-nilai kemanusiaan yang bebas, bertanggung jawab, serta bersatu dalam menatap masa depan kebangsaan berdasarkan ketuhanan dan keadilan. Sebagai konsolidator serta dinamisator, Pancasila harus mampu menyatukan sekaligus menyediakan iklim kebangsaan yang baik untuk tumbuhnya optimisme.

Sesaat setelah Proklamasi 17 Agustus, di saat makna kemerdekaan masih jauh dari fakta, sambil berlangsung aktifitas revolusi, berlangsung pula babak baru menyusun haluan negara. Pada salah Rapat Panitia Hukum Dasar 11 Juli 1945 yang dipimpin Soekarno, Moch. Yamin menyampaikan visinya tentang kebutuhan pokok sebuah negara dalam konstitusinya. Ia mengangkat formulasi Konstitusi Amerika sebagai perbandingan, bahwa sekurang-kurangnya harus ada dasar bagi HAM, pernyataan kedaulatan, dan sistem konstitusional yang baku.<sup>70</sup> Ketiga hal mendasar ini menurut

---

<sup>69</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 158.

<sup>70</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 185.

Yamin akan menjadi model bagi bangsa yang butuh sesegera mungkin bergerak maju.

Sayangnya, proposisi ini ditentang Soepomo dengan mengajukan keberatan tentang orientasi HAM yang bisa berdampak buruk bagi konsolidasi nasional. Maksud Soepomo lebih pada kekhawatiran lahirnya gejala individualisme yang bisa diakibatkan oleh HAM.<sup>71</sup> Soepomo berargumentasi bahwa norma ketimuran lebih sesuai mengedepankan kebersamaan dalam kekeluargaan dibandingkan individualisme. Pada akhir babak dalam perdebatan penentuan hukum dasar ini, Soekarno menengahi dengan mengajukan kemungkinan tentang konsep negosiasi yang memungkinkan deklarasi HAM namun tetap bernafas kekeluargaan. Atas kompromi ini, Soepomo menyetujui, bahwa deklarasi HAM dalam konstitusi Indonesia harus bercorak kekeluargaan dan kebersamaan.

Pada forum yang sama Agoes Salim memberikan perspektif lain namun menguatkan. Menurutnya, konstitusi harus menyediakan suasana kebatinan yang melegakan rakyat. Kondisi psikologi rakyat yang selama puluhan tahun terjajah harus dilunasi dengan model konstitusi yang memberikan nafas kebebasan. Deklarasi HAM dalam konstitusi dengan demikian diperlukan namun tetap dalam bingkai kepastian hukum yang adil. Baginya, kebebasan manusia Indonesia harus diberi jaminan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak bisa digunakan mengancam orang lain. Seseorang tetap harus dicabut kemerdekaannya apabila secara hukum ia melanggar.

Kesepakatan ini mengunci pemahaman bahwa dasar konstitusi Indonesia adalah kekeluargaan dan kebersamaan, yang di kemudian hari diekstrak oleh Soekarno sebagai konsep gotong-royong. Bahwa Indonesia memakai filosofi gotong

---

<sup>71</sup>Yudi Latif, *Negara...*, hal. 186.

royong untuk mengawal jaminan hak setiap individu secara bebas, selain itu pula gotong-royong berfungsi mengawal keadilan. Penegakan berlakunya hukum dasar kebangsaan yang dibangun dari gotong-royong, selain memenuhi unsur partisipatori dalam pembidannya, ia juga bermanfaat bagi fungsi pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, pada momentum ini telah diraih dua norma penting di dalam hukum dasar, yakni 'kebebasan' dan 'keadilan'.

Selain melahirkan formula ideal yang melegakan semua elemen ini, sesungguhnya pencapaian generasi Soekarno tentang hukum dasar merupakan bukti bagaimana kecerdasan mereka berkelit dari tekanan ideologi dunia. Pertarungan individualisme *ala* demokrasi liberal di satu sisi dan sosialisme ala komunisme di sisi lainnya tidak ada yang menjadi pemenang. Rumusan hukum dasar yang baru tersebut menerima semua unsur, sekaligus menolak semuanya. Ada sebagian unsur kefilsafatan demokrasi liberal yang diterima, ada pula yang ditolak dan dianggap tidak sesuai dengan nafas bangsa, demikian pula pada sosialisme. Pancasila dan UUD 1945 hasil ijtihad kebangsaan merupakan produk otentik yang mengakomodir keduanya.

Dua norma kebebasan dan keadilan di atas menjadi ikatan tekstual di dalam ke semua sila Pancasila, tidak sekedar ikatan ucapan semata. Kebebasan dan keadilan telah menjelma menjadi ketetapan hitam di atas putih (*scripta manent*), dan tidak hanya ikrar lisan (*verba volant*). Hingga pada saat sekarang, kedua normatif hasil racikan bapak-bapak bangsa ini tetap relevan. Kebebasan dan keadilan merupakan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Sebuah kemerdekaan yang berkedaulatan, yang mampu memberi jaminan bagi ekosistem kehidupan bersama yang tidak saling menindas.

Sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam penentuan hukum dasar ini perlu digali. Siapa saja yang dilibatkan dalam sejarah perumusan rancangan hukum dasar ini. Bagaimana dengan komposisi perempuan, apakah ia dilibatkan, siapa sajakah mereka. Pertanyaan-pertanyaan tentang peran minoritas ini terkadang tidak bisa dijawab dengan sempurna dikarenakan sumber referensi yang sangat terbatas. Referensi *mainstream* biasanya hanya menyediakan catatan tentang sejarah tokoh-tokoh utama saja. Bagian ini adalah bagian sulit untuk membuktikan perempuan terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran pada peletakan hukum dasar.

Fakta bahwa pada saat tersebut perempuan telah mulai bergerak tidak dipungkiri. Sejumlah catatan sebelumnya yang mengidentifikasi pergerakan perempuan dalam beragam organ dan dengan tokoh-tokoh paling populernya telah juga dijelaskan. Namun demikian tidak banyak informasi yang menyatakan peran kunci perempuan dalam proses peletakan ini. Informasi tentang keterlibatan perempuan masih sebatas perjuangan mengakses hak sebagaimana ditetapkan dalam hukum dasar dan belum sampai pada peran peletakan hukum dasarnya. Hal ini mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika saat Anna Eleanor Roosevelt justru menjadi ketua wanita pertama komisi HAM.<sup>72</sup>

Pada soal mengawal hak-hak perempuan di awal penetapan hukum dasar masa revolusi, ada sejumlah informasi yang berhasil dirangkum Dara Affiah. Bahwa pada Kongres Kowani 1952, kesepakatan yang dihasilkan adalah mengenai penggunaan hak pilih pada pemilihan umum pertama, 1955. Selain hak pilih, kesepakatan juga mengarah pada penegasan kembali hak-hak perempuan untuk dipilih menduduki pos-

---

<sup>72</sup>Yudi Latif, *Negara...*, 209.

pos publik sebagaimana laki-laki. Bidang-bidang rentan yang memungkinkan pelanggaran hak-hak perempuan seperti lembaga perkawinan, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya diusahakan agar dimasuki pejabat perempuan.<sup>73</sup>

Jabatan publik untuk hakim agama, departemen buruh, departemen kesehatan, dan pendidikan menjadi sasaran perjuangan perempuan untuk lebih aktif memimpin. Selain tentu saja usaha terus-menerus memasukkan perempuan pada lembaga kepemimpinan yang mengatasi semuanya, seperti lembaga eksekutif kekabinetan atau lembaga legislatif keparlemenan. Perjuangan organisasi perempuan, meski lebih berorientasi penguatan internal keperempuanan, juga tidak pernah lepas dengan nasionalisme. Tercatat dalam hasil keputusan 1957, salah satu rekomendasinya kepada pemerintah adalah tekanan untuk pengembalian Irian Barat ke tangan Republik Indonesia.<sup>74</sup>

Sebagaimana catatan-catatan sebelumnya, tuntutan kongres ini tidak benar-benar baru. Jauh pada 1941, sejumlah kesepakatan organisasi perempuan telah berkali-kali menyuarkan ini. Hasil Kongres Perempuan Indonesia di Semarang misalnya, telah menuntut penyiapan Tentara Indonesia agar selalu bersiap menyambut perang dalam situasi tidak menentu di Pasifik.<sup>75</sup> Pada saat yang sama tuntutan kongres ini juga menyorot pada kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, pemberantasan buta huruf untuk perempuan, perluasan kesempatan kerja untuk perempuan, penguatan ekonomi perempuan, dan harmonisasi Hukum

---

<sup>73</sup>Neng Dara Affiah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 79-80.

<sup>74</sup>Neng Dara Affiah, *Potret...*, hal. 80.

<sup>75</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian* (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hal. 136.

Islam dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>76</sup>

Nama-nama aktifis politik perempuan seperti Soewarni Djoyopoespito, Sri Mangoensarkoro dan S.K. Trimurti muncul pada masa penetrasi perpolitikan perempuan ini. Menurut Trimurti, gerakan politik perempuan tetap diperlukan meskipun tujuan perjuangan keadilan untuk perempuan bisa dilakukan oleh laki-laki.<sup>77</sup> Nyi Mangoensarkoro adalah perempuan yang perannya terlacak pada awal-awal penataan KNIP.<sup>78</sup> KNIP merupakan lembaga yang sangat penting yang tugas utamanya mengawal kerja pokok Presiden. Signifikansi KNIP menjadi berlipat-lipat tentu saja karena pada saat itu kepresidenan adalah lembaga yang masih sangat baru setelah mandat kedaulatan.

## Penutup

Fokus pembahasan bagian kedua buku ini adalah mengenai peran serta perempuan dalam masa-masa perjuangan revolusi, kemudian disusul dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai konsolidator nasional, dan diakhiri dengan jaminan Pancasila atas hak-hak seluruh rakyat terutama atas perempuan. Dari pembahasan ini diharapkan mahasiswa menyerap informasi awal yang menggambarkan apa yang terjadi di masa-masa revolusi, apa yang terjadi dalam diri perempuan masa-masa tersebut, serta bagaimana gelora perjuangan kebangsaan memotret relasi perempuan dengan peran-peran revolusinya. Sebagaimana pada bagian satu, mahasiswa didorong melakukan riset tambahan untuk melengkapi informasi tentang masa revolusi.

---

<sup>76</sup>Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah ...*, hal. 136.

<sup>77</sup>Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 362.

<sup>78</sup>Yanto Bashri dan Retno Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2011), hal. 76.



Bagian yang paling membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai peran perempuan di gelanggang publik adalah masa-masa pasca-proklamasi yang seolah-olah sepi dari perempuan. Munculnya beberapa tokoh perempuan yang tidak cukup banyak seperti Soewarni, Maria Ulfah, Mangoensarkoro, atau Trimurti belum menjadikan perempuan berperan dalam pusran utama kepemimpinan publik. Mahasiswa diharapkan menyiapkan diskusi lebih dalam mengenai bagian ini sambil menyiapkan projek riset lebih serius untuk menemukan elemen gerakan perempuan lain sehingga menjadi bukti keterlibatan perempuan lebih kuat dalam revolusi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara eksplisit maupun implisit begitu kuat mendorong terciptanya kemerdekaan dan keadilan. Kemerdekaan atau kebebasan dan keadilan adalah kata kunci pada pemahaman sebaliknya tentang tidak adanya penindasan dan ketidakadilan bagi setiap anak bangsa, termasuk bagi perempuan. Pertemuan antara nilai-nilai luhur, yang sejak awal tidak ada masalah dengan kedaulatan setiap pribadi, dengan nilai-nilai yang mendukung kesatuan, konsistensi, dan komitmen kebangsaan semakin menguatkan kesimpulan bahwa Indonesia saat itu adalah bangsa baru yang pandangannya jauh ke depan.

Gerakan-gerakan yang menuntut keadilan dalam kesetaraan yang diperjuangkan perempuan sudah sejak awal menjadi agenda revolusi. Pancasila memosisikan diri sebagai bukti akomodasi atas tuntutan ini, bahwa ia adalah kumpulan dasar-dasar kebangsaan yang luhur tentang kemanusiaan, kesatuan bangsa, tata kelola demokrasi, serta keadilan yang berlandaskan ketuhanan. Perempuan Indonesia saat revolusi tersebut merupakan perempuan modern yang mandiri dan

terdidik, yang sejak awal memperjuangkan keadilannya sendiri dalam ekosistem bangsa yang belum tertata namun penuh harapan.

## **Latihan**

1. Apa yang dimaksud masa revolusi kemerdekaan?
2. Bagaimana iklim perpolitikan nasional saat revolusi kemerdekaan, kekuatan apa saja yang saling tarik-menarik pada saat itu?
3. Bagaimana proses singkat perjalanan bangsa mempertahankan kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan oleh Pemerintahan Belanda?
4. Tokoh perempuan siapa saja yang saudara ketahui di seputar masa revolusi kemerdekaan? Dapatkan saudara menambahkan tokoh lain?
5. Bagaimana organisasi perempuan masa revolusi berperan mempertahankan kemerdekaan?
6. Bagaimana proses peletakan hukum dasar bagi Indonesia pasca kemerdekaan?
7. Corak ideologi dunia apa saja yang berebut pengaruh dalam proses peletakan hukum dasar bangsa Indonesia?
8. Bagaimana penjelasan saudara tentang norma kebebasan dan keadilan?
9. Siapa dan bagaimana tokoh-tokoh perempuan di sepanjang proses penentuan hukum dasar Indonesia?
10. Apa bukti Pancasila menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk jaminan keadilan bagi perempuan?



## Bagian 3

### Orde Baru dan Pergerakan Perempuan

- Kemampuan mahasiswa** : Mahasiswa mampu memahami keterlibatan perempuan dalam dinamika politik masa Orde Baru.
- Indikator** :  
- Mampu menjelaskan tantangan Rakyat Indonesia di masa orde baru.  
- Mampu menjelaskan eksistensi Pancasila di masa Orde Baru sebagai sarana stabilisator.  
- Mampu menjelaskan bagaimana perempuan merespon dominasi orde baru.
- Bahan kajian** :  
- Tantangan bangsa di masa orde baru.  
- Pancasila menjadi alat doktrinasi.  
- Sejarah perjuangan perempuan merespon tekanan.
- Metode belajar** : Menonton Film, melihat gambar sejarah, diskusi, dan penelitian referensi terkait.
- Waktu belajar** : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.
- Pengalaman belajar** : Mahasiswa mengalami pelajaran tatap muka dan diskusi, mengalami penelitian dan berbagi informasi menggunakan media belajar *online*, serta mengalami pengalaman menuliskan

di media sosial tentang respon perempuan di masa Orde Baru.

**Manajemen Pertemuan** : Perkuliahan bisa dilakukan 2 kali pertemuan.

**Kriteria / bobot penilaian** : Penilaian proses belajar (40%), penilaian produk belajar (30%), penilaian etika belajar (30%).

**Indikator materi RG** : Perempuan dipresentasikan sebagai kekuatan dinamis dalam proses tarik-ulur responsi terhadap Orde Baru.

**Indikator strategi RG** : Mahasiswa mengumpulkan dan menggali referensi tentang peran perempuan di sepanjang masa Orde Baru.

## Pendahuluan

Pada sepanjang masa revolusi, dua isu paling utama adalah menyempurnakan dukungan kemerdekaan di hadapan forum internasional serta konsolidasi kebangsaan secara internal. Pada masa-masa ‘pembentukan Indonesia’ ini banyak peristiwa terjadi yang bisa dimaknai menjadi indikator berlangsungnya pengaruh orang-perorangan, pengaruh dominasi etnis, pengaruh dominasi keagamaan, hingga pengaruh dominasi politik yang terhubung dengan ideologi-ideologi besar dunia. Pada masa-masa di sepanjang 1949-1965, yakni masa praktis kepemimpinan Soekarno, Hong Liu melaporkan bahwa tidak sedikit negara-negara lain dunia yang turut membentuk Indonesia, termasuk Tiongkok.<sup>79</sup>

Masuknya pengaruh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, maupun Inggris, meski kesemuanya terkait dengan persekutuan pada Perang Dunia dengan Belanda, merupakan konsekwensi logis dari perang pengaruh dua blok besar dunia, liberalisme-kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Kedua kubu ideologi besar dunia ini logisnya terjadi di hampir semua negara muda di dunia. Terlibatnya unsur-unsur internasional negara sebaya seperti India, Pakistan, Filipina, Thailand, Arab Saudi, atau mesir, merupakan pengaruh dalam pengertian persahabatan. Persahabatan karena lebih didasarkan sebagai sesama negara yang bersahabat karena ada kesamaan menanggung masa-masa penjajahan.<sup>80</sup>

Selain anasir internasional, masa-masa pembentukan di sepanjang tahun-tahun ini lebih banyak diwarnai lika-liku

---

<sup>79</sup>Hong Liu, *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965* (Singapore: NUS Press, 2011), hal. 206.

<sup>80</sup>Ahmad Arifin., Ed., *Serangan Umum 1 Maret 1949, Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 538.

transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Banyak sekali informasi sejarah masa-masa ini yang disajikan dalam warna yang sangat variatif dan banyak versi, karena sarat kepentingan. Para pendukung Orde Lama maupun Orde Baru memiliki informasi masing-masing sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan sesuai kebutuhannya. Para pengagum Soekarno akan terus melakukan protes terhadap transisi penguasaan Soeharto yang dinilai banyak kejanggalan. Sebaliknya, para pendukung Soeharto akan terus meyakini bahwa Soekarno tidak berhasil menciptakan iklim kepemimpinan yang memungkinkan Indonesia bergerak maju.

Secara umum, masa Presiden Soekarno setelah KMB 1949 hingga masa kontroversi Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan masa format kepemimpinan nasional berlangsung silih-berganti. Pergantian yang berlangsung cukup kerap ini diyakini sebagai rapuhnya kohesi nasional di antara sesama elit pemimpin di samping karena negara muda yang masih mencari bentuk. Proses peralihan kekuasaan Orde Baru menggeser Orde Lama dinarasikan sebagai pemberhentian atas tidak menentukannya kepemimpinan nasional yang semakin membahayakan dasar negara. Bahkan meski Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menghentikan semua spekulasi atas beragamnya sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak mengurangi kekacauan.<sup>81</sup>

Lepas dari apa yang sesungguhnya terjadi, Soeharto adalah orang yang tepat pada saat yang tepat. Tepat karena bagaimanapun juga Soeharto telah berhasil membuat perubahan yang signifikan, meski perubahan tersebut bagi banyak kalangan dianggap memakan ongkos demokrasi

---

<sup>81</sup>St. Sularto, Ed., *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hal. 59.

yang sangat mahal. Stabilitas yang identik dengan Orde Baru menyajikan kisah panjang tentang tidak hidupnya kebebasan di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, pada saat itu, kiranya patut diapresiasi tampilnya Soeharto dengan Orde Baru telah menutup bagian dari masa-masa sulit di mana hingga Hatta meninggalkan Soekarno sejak pemilu pertama 1955.<sup>82</sup>

### **Pancasila sebagai Stabilisator Nasional**

Soeharto memimpin sejak 1966 dan pada 1968 secara resmi dilantik menjadi Presiden RI kedua oleh MPRS. Sejak 1966, kepemimpinan Soeharto didasarkan pengaruhnya yang sangat kuat pasca Supersemar. Sejak 1966, Indonesia dipimpin melalui pendekatan militer didasarkan situasi nasional yang tidak stabil dengan sisa-sisa kejadian pemberontakan PKI 30 September 1965 serta pemberontakan bersenjata di daerah-daerah lain. Soeharto memimpin selama 32 tahun, terhitung sejak 1966 hingga reformasi 1998. Selama 6 kali pemilihan umum berikutnya, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Soeharto tidak tergantikan sebagai Presiden.<sup>83</sup>

Kekuasaan Soeharto diawali dengan meletakkan slogan yang kuat untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Slogan ini kemudian diterjemahkan ke dalam tiga visi, yakni Indonesia sebagai negara yang harus mencapai stabilitas politik yang mantab sehingga pembangunan berjalan, sehingga ekonomi berkembang, dan berakhir menjadi negara yang berkeadilan sosial. Ketiga visi ini dikenal sebagai Trilogi Pembangunan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>St. Sularto, Ed., *Masyarakat...*, hal. 59.

<sup>83</sup>Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hal. 6.

<sup>84</sup>Sulastomo, *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 192.

Akibat dari tekanan pada sisi ini, Indonesia terbukti menjadi negara dengan stabilitas politik, namun dianggap kurang demokratis.

Menurut penilaian ekonomi, masa-masa Orde Baru dianggap cukup baik, diukur dari kemampuan daya beli masyarakat yang relatif stabil, swasembada pangan yang baik, serta dilihat dari ukuran lain seperti perubahan kebijakan Orde Lama *deficit budget* menjadi *balanced budget*. Ekonomi Orde Lama mengandalkan mencetak uang baru untuk mencukupi kebutuhan revolusi, sedangkan Orde Baru lebih ke perimbangan belanja negara berdasarkan postur APBN.<sup>85</sup> Ekonomi Orde Baru dikenal sebagai potret ideal ekonomi progresif atau ekonomi pembangunan meski akhirnya anggapan itu terbukti gagal, dengan berakhirnya Orde Baru karena ketidaktahanannya menghadapi krisis ekonomi global 1997-1998.

Selain karena faktor politik dan ekonomi yang sentralistik, perwajahan Orde Baru kuat sekali dengan strategi hegemoni pengetahuan negara melalui media dan kampanye. Teknik pemberitaan negara di sepanjang masa ini melahirkan konstruksi pengetahuan masyarakat yang loyal. Masyarakat hanya mengerti kabar tentang hasil-hasil kemajuan rezim dan karena metode kampanye media yang disiplin, sedikit sekali informasi sebaliknya tentang kegagalan pembangunan. Runtuhnya rejim di akhir 1997 diawali dari terbukanya kran informasi tentang kerapuhan-kerapuhan radikal kebijakan rezim. Terlebih bagi masyarakat yang ada dalam struktur negara seperti PNS atau ASN, diberlakukan strategi Monoloyalitas yang kuat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Muhammad Hisyam, Ed., *Krisis Masa Kini dan Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2003), hal, 238.

<sup>86</sup>St. Sularto, Ed., *Masyarakat...*, hal. 60.



Kekuasaan Orde Baru di bidang media masyarakat sudah mulai bergerak bahkan sebelum Soeharto dilantik. Terbitan Keputusan Menpan No. 34/1966 tentang Fungsi TVRI menyatakan bahwa TVRI adalah alat menanamkan Ideologi Pancasila.<sup>87</sup> Bahwa TVRI pada waktu itu diarahkan negara untuk menggugah dukungan masyarakat terhadap Pancasila dan turunannya menurut versi negara. TVRI yang seharusnya menjadi media publik berubah fungsi menjadi media negara. Program-program khusus seperti Laporan Khusus yang ditayangkan setelah tayangan Dunia Dalam Berita tepat jam 21.00 malam bahkan menjadi agenda khusus kepresidenan. Media menjadi mobilisasi rakyat atau *public support*, bukan *public education*.

Pancasila pada masa Orde Baru merupakan Pancasila dengan level kekuatan legitimasi paling tinggi. Pancasila pada masa ini benar-benar tidak pernah dibiarkan mendapat tantangan dari ideologi-ideologi lain. Penghormatan terhadap pemurnian Pancasila secara konsekwen bahkan diturunkan dalam instrumen pembumian ke masyarakat hingga level yang paling bawah. Sosialisasi, pendidikan, dan penataran nilai-nilai Pancasila mendapat perhatian utama. Pemerintahan telah mengunci alternatif masuknya paham-paham lain dengan pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada awal 1980-an. Ketika ada provokasi dari paham lain yang akan mengganggu, pemerintah akan dengan segera bertindak defensif dan ofensif.<sup>88</sup>

Situasi menguatnya Pancasila tidak serta-merta menjadi jaminan kehidupan kebangsaan yang ideal. Berkembangnya saluran informasi yang selanjutnya berakibat pada

---

<sup>87</sup>Rully Chairul Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era* (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 78.

<sup>88</sup>Jason F. Isaacson dan Colin Rubenstein, Ed., *Islam in Asia, Changing Political Realities* (New Jersey: Transaction Publishers, 2002), hal. 13.

perkembangan kualitas pendidikan masyarakat melahirkan banyak kesadaran kritis. Terutama di kalangan aktifis, pergerakan protes dan keberatan terhadap model hegemoni Orde Baru mulai muncul. Menguatnya Pancasila dianggap hanya sebagai cara rezim untuk melegitimasi kekuasaannya dengan cara-cara egois sepihak. Bahwa faktanya tafsir akan normatif Pancasila serta implementasinya harus melalui tafsir negara. Negara menjadi penguasa tunggal terhadap tafsir atas Pancasila.

Soeharto sebagai bapak pembangunan nasional telah berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang bahkan mendapat pengakuan yang layak di dunia internasional. Namun demikian, reruntuhan dampak negatif dari pembangunan yang monolitik ini memicu munculnya sejumlah perlawanan. Kelihaihan Soeharto dalam mengondisikan bangsa tidak mampu mencegah pikiran-pikiran curiga dari mereka yang sudah pernah dirugikan oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut mereka yang kritis, Orde Baru adalah perwajahan dari kekuasaan yang penuh senyum namun bengis.

Kekuatan masyarakat sipil semakin melemah, kebijakan politik militerisme Orde Baru membuat organ sipil tidak banyak berlutik.<sup>89</sup> Hingga baru pada tahun 1970-an organ-organ sipil seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO mulai bergeliat kembali. Tekanan politik yang sedemikian mencengkeram membuat kaum intelektual yang semakin banyak saat itu mulai bergerak. Kemiskinan masyarakat pedesaan serta mulai banyak bermunculannya lembaga donor internasional sebagai patron LSM lokal dianggap sebagai masa-masa kembalinya pengorganisasian masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 83.

<sup>90</sup>Yumiko Sakai dalam Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era*

Pemaknaan tunggal Pancasila di masa Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada masa-masa Soekarno. Pada masa Orde Lama terjemahan Pancasila adalah Manipol-USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin). Terjemahan ini tentu saja adalah terjemahan tunggal menurut kekuasaan kepemimpinan Soekarno. Pada masa Orde Baru, terjemahan Pancasila adalah P4 (Penataran, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila).<sup>91</sup> Hanya saja karena pendekatan Soeharto bercorak lebih militeristik serta didukung dengan pelanggaran kekuasaan selama puluhan tahun, wajah tunggal Pancasila lebih kuat pada Orde Baru.

Secara kepartaian, Orde Baru juga meninggalkan sejarah yang menarik. Golkar atau Golongan Karya dianggap sebagai cara neo-fasisme Orde Baru untuk terus melindungi kekuasaannya namun mengatasnamakan demokrasi.<sup>92</sup> Sebelum pemilu pertama Orde Baru di tahun 1971, Golkar sudah disiapkan sebagai sekretariat bersama atau sekber yang secara politik kebangsaan diletakkan sebagai kekuatan penyeimbang PKI atau paham komunisme. Diinisiasi oleh Angkatan Darat, Sekber Golkar sudah ada sejak Oktober 1964. Pada masa-masa Soeharto resmi memerintah, Sekber Golkar menjadi Golkar dan dikaryakan sebagai alat politik tunggal yang seolah-olah tanpa lawan. Partai politik lain seperti PDI, dan PPP hanya menjadi pajangan dan tidak benar-benar terjadi kontestasi yang fair antar ketiganya.

---

*Reformasi* (Yogyakarta: Medpress, 2008), hal. 103.

<sup>91</sup>Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 107.

<sup>92</sup>Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 258.

## Perempuan di Masa Orde Baru

Tidak dapat disangkal, Orde Baru menciptakan banyak perubahan, baik yang terjadi karena penilaian alamiah karena sebelumnya Orde Lama gagal bertahan maupun yang terjadi karena perubahan cara memandang kemajuan. Orde Lama adalah orde pembentukan, ideologi dan politik menjadi agenda utama kebangsaan yang hingga akhir periode orde masih belum sempurna terbentuk. Pada saat orde pembentukan ini, semua persoalan memiliki tingkat keketatan yang tinggi dalam hal prioritas. Apa-apa yang dianggap penting bagi kepentingan kelompok tertentu, akan otomatis bergeser dengan kepentingan kebangsaan yang lebih prioritas. Isu-isu dengan prioritas tidak sangat mendesak menjadi seolah-olah tidak penting, termasuk isu keterlibatan peran perempuan.

Bahkan hingga di awal-awal Orde Baru, persoalan ideologi belum benar-benar selesai. Praktis sepanjang 1969 hingga 1975, fokus Orde Baru adalah menyempurnakan stabilitas politik sebagaimana visi trilogi pembangunan.<sup>93</sup> Dari modal stabilitas politik ini, Orde Baru melanjutkannya ke visi pembangunan ekonomi, 'developmentalisme'. Terlepas dari penilaian moral, perubahan visi kebangsaan dari orientasi politik dan ideologi menuju orientasi ekonomi dan pembangunan, menyebabkan banyak perubahan yang bersifat konstruktif. Perubahan konstruktif berarti munculnya beragam budaya serta lembaga baru sebagai tanda-tanda pembangunan yang sebelumnya tidak ada.

Layanan dasar publik seperti sandang-pangan-

---

<sup>93</sup>Muhammad Hisyam, Ed., *Krisis Masa Kini dan Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2003), hal. 185.

papan, kesehatan, dan pendidikan lambat laun meningkat. Secara domestik, kepentingan perempuan dan anak-anak pun mulai diperhatikan, tidak hanya melalui program insidental, tetapi dilembagakan secara permanen. Seiring dengan itu, porsi pendidikan bagi perempuan meningkat pesat. Pada tahun 1996 saja tercatat, dari 100 mahasiswa, 88,2 nya adalah perempuan.<sup>94</sup> Disimpulkan bahwa pada sisi pemenuhan hak dasar aktifitas rumahan yang layak, Orde Baru telah berhasil mengamatkannya. Meski pada dasarnya rintisan layanan dasar ini telah ada di jaman Soekarno, akan tetapi catatan dinamikanya baru tampak pada jaman Soeharto. Sebagai contoh, bahwa program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), ternyata sudah melekat pada Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan) pada 1952.<sup>95</sup> BKIA, Puskesmas, dan Posyandu mulai ada sejak tahun 1957.<sup>96</sup>

Pada tahun 1970 an, Program Keluarga Berencana (KB) berhasil menekan angka kelahiran yang itu berarti menekan angka kematian ibu dan anak. KB dianggap dunia sebagai prestasi Indonesia dalam hal pengelolaan jumlah kelahiran.<sup>97</sup> Melalui slogan kesejahteraan keluarga, “Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), Orde Baru telah mengunci kesadaran publik bahwa di masa-masa ini, kesejahteraan setiap keluarga menjadi persoalan penting negara. Program KB dan Posyandu dianggap sebagai hasil dari usaha negara sejak

---

<sup>94</sup> Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, Ed., *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 82.

<sup>95</sup>Buchari Lapau dan Alib Birwin, *Prinsip dan Metode Epidemiologi* (Depok: Kencana, 2017), hal. 13.

<sup>96</sup>Wulan Mulya Pratiwi, *Kuliah Jurusan Apa? Jurusan Kebidanan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 18.

<sup>97</sup>AD. Kusumaningtyas dan kawan-kawan, *Seksualitas dan Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama* (Jakarta: Elex Media

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) lahir dari tangan Kementerian Kesehatan pada tahun 1957-1962.<sup>98</sup>

PKK mulai mendapat status kelembagaan lebih signifikan pada tahun 1982, yang mana ia ditempatkan sebagai salah satu divisi di dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan dipimpin oleh istri kepala desa. Secara nomenklatur koordinasi, PKK mulai bergeser dari Kementerian Kesehatan menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Selain secara kelembagaan PKK mengangkat tanggung jawab perempuan ke lembaga resmi, PKK juga mendapat jatah anggaran berdasarkan Instruksi Presiden. Hingga pada tahun 1983, PKK secara otimal masuk dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>99</sup> Seluruh proses perkembangan sejumlah layanan publik basis keluarga ini otomatis melibatkan perempuan.

Keterlibatan perempuan pada masa Orde Baru tetap dianggap sebagai keterlibatan *emansipatoris*. Artinya perempuan terlibat tetap hanya sebagai bagian di bawah pengendalian filosofi patriarki. Gerakan-gerakan perempuan yang semakin berkembang bukan semata-mata karena diniatkan oleh negara, tetapi justru karena akses positif dari kemajuan pendidikan. Artinya, meskipun negara telah berbuat banyak pada masa Orde Baru, negara masih belum bermaksud menyetarakan peran perempuan.<sup>100</sup> Pada beberapa kesimpulan pengamat lainnya, perempuan pada masa Orde Baru justru dihormati di dalam rumah dengan cara disangkarkan. Pelayanan khusus terhadap isu-isu keperempuanan yang dilakukan negara, justru melokalisir gerak perempuan.

---

Komputindo, 2015), hal. 68.

<sup>98</sup>Jan Newberry, *Back Door Java, Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*, terj., Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), hal. 7.

<sup>99</sup>Jan Newberry, *Back Door...*, hal. 8.

<sup>100</sup>Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, Ed., *Tentang Perempuan...*, hal. 82.

Gerakan-gerakan perempuan pada masa Orde Baru berasal dari akar historis yang berbeda-beda. Selain dalam wujud gerakan perjuangan melepaskan diri dari kooptasi hegemonik yang melokalisir ruang gerak perempuan yang mengatasnamakan kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga di masa-masa stabil, serpihan gerakan perempuan juga berasal dari sejarah kontroversial kelahiran Orde Baru.<sup>101</sup> Tampilnya Soeharto sebagai pemimpin tidak diawali oleh kisah yang jernih. Ada aroma periwayatan sejarah yang penuh intrik, ada kisah-kisah kekerasan, ada dugaan konspirasi, dan ada sisa-sisa korban yang hingga kini tetap sakit karena peralihan kepemimpinan ini. Latar belakang peristiwa-peristiwa ini menjadi dasar lahirnya beberapa organisasi yang mewadahi gerakan perempuan di sepanjang Orde Baru.

Orde Baru memulai kendalinya atas gerakan perempuan dengan cara mendefinisikan ulang apa dan bagaimana seharusnya organisasi perempuan. Menurut Wieringa, perang total Orde Baru melawan PKI merupakan modal utama Soeharto merebut perhatian rakyat Indonesia.<sup>102</sup> Termasuk di dalam perang ini, Gerwani menjadi representasi dari organisasi perempuan paling buruk bagi Indonesia dan menjadi standar untuk dihindari. Dari latar belakang kegelisahan yang dibangun ini, Orde Baru mengarahkan bagaimana seharusnya organisasi perempuan bergerak. Gerwani yang sebelumnya memberi contoh gerakan perempuan yang mulai berani tampil setara melawan dominasi laki-laki di segala bidang, termasuk dalam bidang politik, menjadi contoh buruk yang wajib dihindari. Organisasi perempuan seharusnya fokus pada kerja-kerja

---

<sup>101</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hal. 408.

<sup>102</sup>Saskia E. Wieringa, *Penghancuran...*, hal. 415.

perempuan dalam keluarga, demikian niat Orde Baru.

Pola gerakan perempuan di masa Orde Baru mulai berubah, dari yang awalnya gerakan emansipasi menjadi gerakan kesetaraan gender.<sup>103</sup> Sifat mendasar dari kedua pola ini adalah bahwa yang terdahulu, perempuan berusaha terlibat setelah terjadi kepemimpinan laki-laki, sedangkan yang berikutnya perempuan berusaha sejak awal terlibat sebelum kepemimpinan berjalan. Cara pandang kesetaraan menghendaki adanya kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan publik karena tidak ada satupun alasan gender yang mendasar untuk membedakan keduanya. Persoalannya adalah, organisasi-organisasi perempuan program Orde baru, meski secara kasat mata mengakomodir eksistensi perempuan, namun justru dianggap membatasi perempuan.

PKK, KIA, Dharma Wanita, KB, dan NKKBS melembagakan perempuan dalam sekat-sekat ideal basis keluarga yang tidak leluasa. Selain 'trik politik' dari negara, agama, kepercayaan, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan turut mendukung penyekatan ini. Termasuk cara pandang perempuan terhadap dirinya sendiri, masih banyak di antara mereka yang merasa sudah sepantasnya perempuan hanya berkiprah pada batas-batas yang digariskan PKK. Konten normatif dalam 10 Pokok Program PKK atau Panca Dharma Wanita menegaskan bahwa perempuan dibatasi dalam materi-materi yang sudah ditentukan. Hal itu seperti yang terlihat dalam Panca Dharma Wanita, perempuan sebagai istri pendamping setia, sebagai ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai

---

<sup>103</sup>Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, Ed., *Tentang Perempuan...*, hal. 79.



pekerja penambah penghasilan keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna’.

Tentu sangat banyak sekali gerakan perempuan yang terwadahi dalam beragam organisasi. Sebagian besar organisasi perempuan pada masa ini masih fokus pada penguatan internal, masih di tahap pemberdayaan peran perempuan. Organisasi perempuan yang ada di sayap-sayap organisasi yang lebih besar misalnya, hampir pasti dibangun untuk mengakomodir gagasan emansipasi ini. Termasuk organisasi perempuan yang ada pada ormas keagamaan seperti Muslimat di NU atau Aisyiah di Muhammadiyah. Sebagian kecil saja yang benar-benar mulai berubah ke arah gerakan kesetaraan. Pemerintah Orde Baru bahkan menetapkan Kowani sebagai payung untuk semua organisasi perempuan di bawah kontrol negara.

Tidak banyak organisasi perempuan yang mampu keluar dari kooptasi ini, sedikit di antaranya adalah organisasi dengan corak LSM seperti Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta dan Kalyanamitra di Jakarta. Organisasi-organisasi serupa juga eksis, seperti Yayasan Perempuan Mardhika atau Pusat Perjuangan Buruh Indonesia yang dipimpin tokoh perempuan terkenal Dita Indah Sari.<sup>104</sup> Sayangnya, Yayasan Perempuan Mardhika tidak bisa bertahan cukup lama karena dianggap tidak memiliki akar kepentingan yang kuat terhadap basis yang mereka dampingi. Simbol perlawanan yang sangat melegenda pada masa ini adalah Marsinah, buruh perempuan Jawa Timur yang meninggal pada 1993 akibat perjuangannya mendapatkan hak yang setara. Kepergian Marsinah dicatat Indonesia bahkan dunia sebagai simbol kepahlawanan bagi kaum perempuan.

Secara umum, organisasi perempuan yang mengambil

---

<sup>104</sup>Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 185.

sikap kritis terhadap negara ini bergerak pada bidang advokasi hukum, advokasi hak, dan perlawanan terhadap ketidaksetaraan sekaligus eksploitasi atas perempuan. Sri Kusyuniyati pada tahun 1982, pendiri Yasanti misalnya menjelaskan bahwa pekerja-pekerja perlu disiapkan bertahun-tahun agar benar-benar siap bekerja dengan status manusia sempurna dengan kemampuan melawan eksploitasi.<sup>105</sup> Selama perempuan diam tidak melakukan perlawanan, kepemimpinan negara akan meletakkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyetarakan. Sedikit berbeda, Kalyanamitra bergerak lebih masif pada media dan publikasi menyaringkan suara perjuangan kaum perempuan.<sup>106</sup>

## Penutup

Gerakan perempuan pada masa Orde Baru memiliki corak perubahan dari yang sebelumnya memperjuangkan emansipasi atau keterlibatan menjadi perjuangan atas kesetaraan. Mahasiswa bisa mendiskusikan di kelas mengenai gambaran lebih detil format relasi kekuasaan yang membedakan antara emansipasi dengan kesetaraan. Selain itu, mahasiswa tentu saja didorong untuk mengembangkan sumber bacaan terutama untuk mengoleksi informasi lain di seputar pergerakan organisasi perempuan pada masa Orde Baru. Selanjutnya kelas bisa meneruskan diskusi ini dengan fokus pada menarik nilai-nilai perjuangan sekaligus intensi-intensinya bagi perjuangan kelompok tertindas (*mustadhafien*) sebagai perjuangan melindungi harkat kemanusiaan.

Selanjutnya, kenyataan bahwa model organisasi perempuan di masa Orde Baru yang tidak semuanya kritis

---

<sup>105</sup>Susan Blackburn, *Women and the State...*, hal. 184.

<sup>106</sup>Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa, Sebuah Kajian Pascakolonial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 12.

terhadap negara menarik diperdalam. Diskusi kelas bisa diinisiasi mahasiswa untuk membuat tipologi gerakan perempuan berdasarkan organisasinya berdasarkan kriteria tema perjuangan sekaligus model relasi kuasanya di hadapan negara. Diskusi bisa dilakukan dengan melakukan FGD atau studi pustaka di perpustakaan perempuan terdekat atau dengan mendatangkan narasumber tamu dari luar. Dosen pengampu matakuliah bisa melakukan fasilitasi kelas sehingga melahirkan rumusan konseptual tentang peta perjuangan pergerakan organisasi perempuan Indonesia masa Orde Baru.

### **Latihan**

1. Bagaimana sejarah transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto?
2. Silahkan saudara ceritakan ulang bagaimana awal-mula Soeharto mendapat tempat sebagai Presiden RI kedua!
3. Apa yang dimaksud stabilitas pada masa-masa Orde Baru?
4. Dimensi apa saja yang dianggap menjadi ukuran stabilitas masa Orde Baru?
5. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan, apa yang dimaksud dengan bapak pembangunan?
6. Perbandingkan tafsir Pancasila menurut Soekarno dan tafsir Pancasila menurut Soeharto?
7. Bagaimana iklim demokrasi pada saat Orba dan bagaimana *civil society* berkembang?
8. Organisasi perempuan apa saja yang saudara ketahui di seputar Orde Baru?
9. Tokoh perempuan siapa saja yang saudara ketahui di masa Orde Baru?
10. Apa corak perjuangan pergerakan perempuan di masa Orde Baru?



## Bagian 4

### Pancasila dan Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

- Kemampuan mahasiswa** : - Mahasiswa mampu memahami Pancasila dan perubahan Amandemen UUD 45.
- Indikator** : - Mampu menjelaskan posisi perempuan di Era Reformasi.  
- Mampu menjelaskan kebijakan yang mengafirmasi hak-hak perempuan.  
- Mampu menjelaskan posisi tawar perempuan dalam politik.
- Bahan kajian** : - Pancasila dan jaminan perempuan di Era Reformasi.  
- Kebijakan afirmatif bagi perempuan.  
- Posisi tawar perempuan dalam produk undang-undang dan kebijakan.  
- Politik identitas yang memarjinalkan perempuan.
- Metode belajar** : - Kasus-kasus pelanggaran HAM atas perempuan.  
- Perlawanan perempuan dalam kesetaraan hak-hak perempuan dalam kuota.
- Waktu belajar** : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.

- Pengalaman belajar** : Mahasiswa mengalami pelajaran tatap muka dan diskusi, mengalami penelitian dan berbagi informasi menggunakan media belajar *online*, serta mengalami pengalaman menuliskan kesimpulan di media sosial tentang Pancasila dan perubahan amandemen undang-undang dasar 1945.
- Kriteria / bobot penilaian** : Penilaian proses belajar (40%), penilaian produk belajar (30%), penilaian etika belajar (30%).
- Indikator materi RG** : Kuota perempuan tidak boleh jabatan publik, problem ras dan problem kelas.
- Indikator strategi RG** : Problem etnis, ras, kelas, tidak bisa diatasi hanya dengan regulasi. Hal lain yang bisa dilakukan di antaranya adalah mengubah cara pandang, dari elit menjadi populis. Mendekonstruksi pemahaman dari elit maskulinitas yang melayani atau sekurang-kurangnya setara, tidak lagi dilayani.

## Pendahuluan

Era Reformasi menjadi penanda baru bagi politik Indonesia. Corak pada masa ini, politik tidak lagi tertumpu pada meletakkan dasar kebijakan atau pembangunan, melainkan justru melakukan evaluasi seluruh tatanan. Rakyat Indonesia memahami Era Reformasi sejalan dengan maknanya, yakni *to reform*, era membentuk ulang apa yang selama masa sebelumnya telah dibentuk oleh perspektif Orde Baru. Hal paling mendasar dari pembentukan ulang ini terutama tertuju pada orientasi demokrasi yang pada masa Orde Baru dianggap semu yang hanya memanfaatkan tafsir tunggal atas Pancasila untuk melanggengkan kekuasaan rezim.

Pada dasarnya diskusi di seputar reformasi di Indonesia ini beragam. Misalnya, Miftah Thoha berpendapat bahwa masing-masing era, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi memiliki tekanan reformasinya sendiri-sendiri. Menurutnya Presiden Soekarno juga melakukan reformasi, demikian pula halnya Presiden Soeharto. Kedua presiden pertama ini masing-masing melakukan reformasi pada bidang birokrasi. Presiden Soekarno melakukan reformasi birokrasi dengan cara *retooling* (penertiban ulang) aparatur yang kontra revolusi, sedangkan Presiden Soeharto melakukan reformasi birokrasi dengan pendekatan penyeragaman kebijakan yang memanfaatkan menguatnya stabilitas politik dan keamanan untuk tujuan pembangunan ekonomi.<sup>107</sup> Sedangkan, Era Reformasi sebagaimana yang kita maksudkan di sini adalah tatanan baru yang menekankan pada terbukanya iklim demokrasi yang lebih partisipatif dan transparan.

---

<sup>107</sup>Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 99-102.

Memasuki Era Reformasi merupakan masa yang dinantikan seluruh bangsa Indonesia. Selama 32 tahun masyarakat Indonesia dibungkam atau ditutup aksesnya dalam menyikapi persoalan bangsa. Salah satu catatan sejarah yang meruntuhkan Soeharto/Orde Baru adalah peristiwa Mei 1998.<sup>108</sup> Perjuangan mahasiswa se-Indonesia bergerak yang disebabkan krisis ekonomi, hutang negara yang melilit, kasus HAM serta kasus kekayaan intelektual atau bajakan. Masa yang menegangkan sekaligus berakhir dengan kesedihan, karena harus ditebus dengan kematian mahasiswa dan masyarakat. Kepiluan harus segera diatasi dengan melakukan perbaikan dari pelbagai bidang.

Pada aspek hukum menjadi pijakan utama dengan melakukan reformasi undang-undang yang diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni dikembalikannya sistem demokrasi secara pemisahan dengan merujuk pada tiga bagian penting, yakni; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penegakan Pancasila dengan mengimplementasikan setiap butir-butir Pancasila khususnya tentang keadilan yang diturunkan pada hak-hak manusia. Agenda reformasi harus dilakukan secara menyeluruh termasuk jaminan perempuan. Kesetaraan gender menjadi agenda yang harus segera disikapi, karena menyisakan problem secara holistik. Partisipasi perempuan yang dibatasi dan menyebabkan perempuan mengalami pendomestikan secara politik.

Perempuan di Era Reformasi mulai mendapat tempat yang luas. Organisasi perempuan bermunculan dalam pelbagai warna yakni; LSM, ormas, *women crisis center* dan *hotline*.

---

<sup>108</sup>D. Arotonang, *Runtuhnya Rezim Soeharto: Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 45-50.

Di awal reformasi, perempuan mengadakan kongres di Yogyakarta, dengan agenda melawan kekerasan dalam rumah tangga dan hak perempuan dalam parlemen. Perjuangan perempuan yang penuh semangat tersebut mendapatkan jaminan yang harus diafirmasi melalui kebijakan pemerintah. Sebagaimana keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum beranjak dari 10%. Keterwakilan perempuan yang diwadahi dengan munculnya partai, misalnya Partai Golkar yang memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KKPG), partai PKB, partai PAN yang masing-masing memiliki kesatuan perempuan.

Keberpihakan perempuan juga diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Amandemen tersebut memuat kesetaraan gender, yakni tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara dalam ranah publik maupun privat. Pada pembentukan draft Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan organisasi perempuan yang dikoordinir oleh Komite Perempuan Untuk Perdamaian Dan Demokrasi. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, pasal 46 tentang HAM yang menjamin representasi perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen mendeklarasikan afirmasi 30% untuk hak dipilih bagi perempuan. Tindakan afirmatif tersebut kemudian diterima dalam Undang-Undang Pemilu.

Era Reformasi di setiap elemen organisasi perempuan menyuarakan persoalan isu perempuan yang dibawa ke ranah kebijakan. Dari kebijakan tersebut akan berujung pada produk-produk legislasi atau undang-undang. Perjuangan perempuan harus didukung oleh lembaga lain, seperti; LSM, tokoh agama, tokoh Adat, kaum cendekiawan, agar tidak menghadapi hambatan atau kendala secara struktural maupun kendala kultural. Afiliasi antar lembaga terhadap perjuangan kesetaraan



gender memberikan kekuatan sekaligus bentuk kesepakatan untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan diskriminasi.

Posisi tawar perempuan dalam produk undang-undang dan kebijakan menjelaskan tentang transformasi perempuan yang dihasilkan dari undang-undang. Beberapa komodifikasi yang diatur dalam Undang-undang dan kebijakan diantaranya; Undang-undang tentang *trafficking* yang berdampak jelas pelanggaran yakni transaksi. Sementara Undang-Undang Pornografi menyisakan problem yang menuai kontroversi di masyarakat. Kontroversi produk Undang-undang dan kebijakan tersebut memperluas perdebatan yang multitafsir dan mengkaburkan masalah bagi masyarakat.

Pemahaman yang multitafsir di masyarakat dapat memicu perbedaan yang berujung pada konflik di pelbagai kalangan. Produk undang-undang harus dapat melindungi dan mengayomi seluruh elemen masyarakat, agar tidak terjadi pengkaburan dari esensi masalah. Kondisi ini dapat melahirkan politik identitas yang dapat memperkeruh suasana. Politik identitas menjadi alat politik suatu kelompok masyarakat yang berkaitan dengan ras, etnis, agama dan budaya dengan tujuan tertentu. Identitas dapat dipolitisasi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama, terutama politik identitas yang memarginalkan perempuan.

Inti dari pembahasan Pancasila dan perubahan Amandemen UUD 1945 adalah mengajak mahasiswa untuk memahami dan menganalisis pelbagai problem yang terjadi melalui kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus perlawanan perempuan dan kesetaraan hak-hak perempuan serta kuota perempuan dalam parlemen. Selain itu, keberpihakan dan sensitifitas mahasiswa terhadap kesetaraan gender dalam melihat fenomena sosial.

## **Setting Sosial-Politik Reformasi 1998**

Detik-detik runtuhnya presiden Soeharto menjadi peristiwa yang mengharu biru bagi bangsa Indonesia. Sejumlah problem nasional telah menyita waktu dan menguras tenaga, bahkan kematian sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat. Peristiwa penculikan sejumlah aktivis mahasiswa dan kasus Tri Sakti sampai kerusuhan 13-15 Mei 1998 mengharukan seluruh bangsa Indonesia dan berujung 22 Mei 1998 turunnya presiden Soeharto. Peristiwa bersejarah yang menegangkan menimbulkan kerugian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Krisis ekonomi, politik, etnis mewarnai proses perjuangan reformasi. Istilah reformasi digunakan sebagai bentuk perubahan dari sistem pemerintahan secara totalitas,<sup>109</sup> termasuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang melekat pada Orde Baru. Reformasi menuai peristiwa berdarah yang menyebabkan pelanggaran HAM berat dan melupakan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Jakarta menjadi tempat bersejarah dalam menegakkan demokrasi dengan didudukinya gedung DPR-MPR RI oleh mahasiswa yang menggugat Soeharto mundur dari jabatan presiden.

Seiring lengsernya Soeharto, mulai muncul beragam peristiwa yang membuat catatan sejarah sepanjang perjuangan reformasi masih bergulir dengan pelbagai caranya. Perjuangan yang ingin dicapai adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Masa transisi yang menyita perhatian masyarakat adalah isu dukun santet yang terjadi di Banyuwangi. Peristiwa dukun santet yang terjadi pada masa transisi reformasi 1998-1999 memiliki tujuan tersembunyi yakni, berupaya memecah-

---

<sup>109</sup>Said Agil Siradj, *Islam Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hal. 126.

belah warga Nahdliyin dan menggagalkan kongres PDI di Bali. Kekerasan dengan isu dukun santet merupakan peristiwa yang memilukan dalam sebuah kajian ontran-ontran demokrasi,<sup>110</sup> ditemukan bahwa isu santet menjadi alat kekerasan untuk melemahkan kesetabilan pemerintah yang masih rapuh. Kasus isu santet digunakan elit lokal Banyuwangi untuk menurunkan Bupati yang dianggap gagal dalam menentramkan warganya. Peristiwa ini menjadi pelajaran masyarakat, agar tidak mudah diperdaya oleh isu-isu santet yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan umat. Masa transisi reformasi juga masih terus bergulir dengan isu agama dan etnis di berbagai daerah di tanah air.

Peristiwa konflik berdarah di Poso Sulawesi Tengah tahun 1998 sampai 2001<sup>111</sup> menjadi fenomena sejarah yang diawali pemilihan Bupati dan dilandasi oleh sentimen keagamaan. Konflik yang disebabkan akibat perubahan pemerintahan dari sentralisasi menjadi disentralisasi kekuasaan. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Kerusakan akibat konflik dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak-anak, pelecehan dan kekerasan saat kerusakan terjadi. Konflik akibat perebutan kekuasaan antar elit politik lokal Poso yang kemudian dilibatkan massa dengan identitas agama dan etnis guna memperoleh dukungan yang berujung konflik berkepanjangan. Upaya perdamaian dapat reda dengan hadirnya Menko Kesra Jusuf Kalla sebagai mediator untuk damai di Poso. Bhinneka

---

<sup>110</sup>Latif Kusairi, *Ontran-Ontran Demokrasi: Kekerasan dengan Isu Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 1998-1999*. [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=87243&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=87243&obyek_id=4)

<sup>111</sup>Ignius Alganih, "Konflik Poso; Kajian Historis tahun 1998-2001." *Jurnal Pendidikan Sejarah*, no. 10, vol. 10 (2016): hal. 166-170.

Tunggal Ika harus terus menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan terus diperjuangkan untuk persatuan nasional. Perwujudan keadilan juga harus ditegakkan dalam rangka memperkuat pondasi persatuan nasional. Keadilan milik semua elemen masyarakat tanpa memandang strata sosialnya. Sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para buruh untuk mendapatkan hak-haknya salah satunya kisah memilukan buruh Marsinah.

Sejarah perjuangan perempuan buruh yang meninggalkan luka dalam untuk mendapatkan keadilan adalah kasus marsinah yang tewas terbunuh tahun 1993. Pejuang buruh di perusahaan Catur Putra Surya (CPS) yang berlokasi di Sidoarjo ingin mendapatkan hak-haknya untuk kenaikan gaji dari Rp. 1700 menjadi Rp. 2.250,- per harinya. Dasar kenaikan tersebut merujuk pada instruksi Gubernur kepala daerah tingkat satu Jawa Timur mengeluarkan surat edaran no. 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kenaikan gaji pegawainya sebesar 20%. Perjuangan untuk mendapat keadilan harus ditebus dengan meregang nyawa, tubuh penuh luka yang mengenaskan. Pejuang pahlawan buruh Marsinah diangkat dalam sebuah karya sastra yang ditulis oleh Ratna Sarumpaet.<sup>112</sup> Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terpampang nyata dilakukan oleh perempuan yang gigih, berani melawan ketidakadilan dan keangkuhan.

Perjuangan reformasi sekaligus tragedi 1998 telah melahirkan Komnas Perempuan yang pertama tanggal 22 Juli 1998 yang diketuai oleh Prof. Dr. Saparinah Sadli.<sup>113</sup> Pembentukan Komnas Perempuan dilakukan untuk mengidentifikasi kasus

---

<sup>112</sup>Atri Suci Maharani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Naskah Drama Monolog Marsinah Menggugat Karya Ratna Sarumpaet." *Jurnal Bahasa dan Sastra*, no. 2, vol. 5 (2018): hal. 16-18.

<sup>113</sup>Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas HAM*, [http://gelora45.com/news/TragediMei98\\_KomnasPerempuan.pdf](http://gelora45.com/news/TragediMei98_KomnasPerempuan.pdf)

pelanggaran HAM yang mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan reformasi terus menelan banyak korban, terutama misteri pemerkosaan etnis Tionghoa di Jakarta. Minimnya korban yang berani tampil di publik serta beredarnya foto *hoax* tentang pemerkosaan, membuat kepercayaan menipis terhadap tim relawan yang mendukung Komnas Perempuan. Selanjutnya Komnas Perempuan menemukan 15 bentuk pelecehan seksual yang dipantau sejak tahun 1998-2018.<sup>114</sup>

Kekerasan terhadap perempuan harus terus dipantau dan diawasi, agar tidak terjadi beragam bentuk kekerasan lainnya. Karena itu, perempuan Indonesia harus berubah untuk berani melawan tindak kekerasan dengan memproteksi diri dengan pelbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Perempuan Indonesia harus berubah untuk tidak tertekan dalam melakukan sesuatu apapun. Komnas perempuan merekomendasikan untuk penghentian kelaziman kekerasan terhadap perempuan. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak perempuan semakin terbuka lebar. Namun, capaian tersebut bukanlah titik akhir dari perjuangan reformasi, karena perjuangan harus terus dilakukan dengan cara-cara bijak dan elegan.

Perjuangan reformasi juga harus mengenang pahlawan reformasi yang telah berhasil membawa perubahan. Para pahlawan reformasi, di antaranya; *pertama*, Elang Mulia Lestana (Mahasiswa teknik Arsitektur angkatan 1996) lahir di Jakarta, 5 Juli 1978 putra dari pasangan Boy Bagus Yonadanita Rahman dan Hira Tety Yoga. *Kedua*, Hafidin Royan (mahasiswa Fakultas Teknik Sipil angkatan 1996) kelahiran Bandung 28 September 1978 putra dari Ir. Enus Yunus dan Ir. Sunami.

---

<sup>114</sup>Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

*Ketiga*, Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi, angkatan 1996) lahir di Balikpapan 3 Mei 1978. *Keempat*, Hery Hertanto (Fakultas Teknik Mesin, angkatan 1995). Empat mahasiswa yang wafat mendapatkan bintang jasa kehormatan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan reformasi, namun sayangnya belum mampu menguak siapa penembak peluru nyrasar yang bersarang di tubuh mahasiswa tersebut. Perjuangan demokrasi tidak boleh berhenti, dalam buku yang berjudul *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*<sup>115</sup> menjelaskan bahwa, reformasi harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik elit politik, birokrasi pemerintah, sistem yang dibangun serta undang-undang dan kebijakan berpihak pada reformasi yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk keadilan kesejahteraan dan persatuan bangsa.

### **Reformasi Undang-Undang dan Kebijakan**

Reformasi sebagai agenda utama pasca runtuhnya Orde Baru, perlu dievaluasi terhadap undang-undang atau kebijakan yang sudah ditetapkan, agar sejalan dengan ruh reformasi. Undang-undang menjadi payung hukum atau kerangka acuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dibagi menjadi beberapa bidang. Pada bidang ekonomi diatur dalam Undang-undang yakni, pasal 33 tentang Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Dalam pasal 33 mengandung prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan, pasal ini menjelaskan bahwa mengutamakan kemakmuran untuk orang banyak bukan kemakmuran orang-seorang.<sup>116</sup> Prinsip ekonomi tersebut belum

---

<sup>115</sup>Aisah Putri Budiatri dkk, *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019), hal. xxiv.

<sup>116</sup>Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, no. 1, vol. 9 (2012): hal. 51-60.

seungguhnya berdampak pada keberpihakan masyarakat karena itu, pesan konstitusi sangat jelas bahwa, bukan ekonomi kapitalis yang dikehendaki tetapi, ekonomi kebersamaan dan kekeluargaan. Paham kebersamaan dan kekeluargaan harus diimplementasikan secara nyata, sebagaimana bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Maksud pasal tersebut sangat jelas bahwa, pembangunan ekonomi harus mendukung ekonomi rakyat dan merasakan kesejahteraannya. Pembangunan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama namun, pemerintah harus melakukan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Kebijakan pemerintah terkait bidang ekonomi ataupun perdagangan harus melibatkan elemen masyarakat tanpa memandang strata sosial maupun diskriminasi gender. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam usaha ekonomi, harus sepenuhnya didukung oleh undang-undang. Bentuk perlindungan hukum ekonomi perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>117</sup>

Dari kesempatan baik tersebut, perempuan dapat mengambil peran di antaranya: *pertama*, melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi pembangunan. *Kedua*, menjadi konsultan atau pendamping dalam mengimplementasikan pengembangan ekonomi. *Ketiga*, mengembangkan programnya sendiri, namun mampu bersinergi dengan program pemerintah.

---

<sup>117</sup>Ida Fauziah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hal. 377.

*Keempat*, mewujudkan program pemberdayaan masyarakat perempuan atau dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Kesempatan yang luar biasa tersebut, perempuan harus mampu membaca peluang dalam melihat program pemerintah serta memiliki keterampilan membaca anggaran yang direncanakan negara. Kreativitas dan inovasi perempuan agar sejalan dengan program pemerintah menjadi tuntutan untuk kesempatan yang lebih terbuka.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melahirkan banyak regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara hak dan kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat dan pemerintah penyelenggara pendidikan nasional diatur pada pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.<sup>118</sup> Undang-undang tersebut juga memasukkan pesantren, *ma'had 'ali*, *roudhotul athfal*/taman kanak-kanak sebagai sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi paket turunan regulasi berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru Dan Dosen, mengatur merata baik pada Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, kedua pendidikan di bawah kedua kementerian tersebut mendapatkan hak yang sama. Kebijakan pemerintah Era Reformasi mengalami perubahan yang dapat berdampak pada kualitas

---

<sup>118</sup>Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



dan kuantitas masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan.

Penerapan *total quality management*, penguatan pendidikan agama dan ahklak serta penetapan pendidikan berskala nasional dan internasional<sup>119</sup> semakin memperkuat lembaga pendidikan dan kepercayaan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang diajarkan pada setiap lembaga pendidikan yang harus bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penanaman pendidikan karakter dan semangat kebangsaan dan cinta tanah air menjadi kebutuhan utama dalam setiap pembelajaran.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki keberpihakan terhadap siapapun tanpa diskriminasi. Namun demikian kebijakan pemerintah tersebut masih membebani masyarakat, karena wajib belajar 12 tahun secara gratis masih belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Terbukti sebagian masyarakat masih mengeluhkan tentang biaya yang harus dibayar untuk sekolah. Hal ini ironi dengan program pemerintah yang telah disiapkan sejumlah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan pendidikan gratis pada jenjang menengah masih terdapat problem yang harus disikapi, di antaranya; *pertama*, kebutuhan sumber daya anggaran. *Kedua*, pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan sekolah. *Ketiga*, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban serta keberhasilan dari penggunaan

---

<sup>119</sup>Afiful Ikhwan, "Kajian sosio Historis Islam Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Edukasi*, no.1, vol. 5 (2017): hal. 15-18.

dana pendidikan gratis.<sup>120</sup> Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang masih menyisakan masalah menjadi beban masyarakat. Sebagian masyarakat mengambil keputusan yang salah dengan putus sekolah atau menikah pada usia dini.

Undang-undang perkawinan telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan pada pasal 7 telah berubah bahwa usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat untuk dipahami dan dilaksanakan seluruh elemen masyarakat. Undang-undang perkawinan yang telah ditentukan pemerintah belum sepenuhnya dilakukan, karena masih terjadi kasus-kasus pernikahan dini yang berdampak pada risiko kehamilan muda. Kesiapan tubuh perempuan untuk memasuki kehamilan harus dipersiapkan dengan baik dan sehat. Dampak trauma psikologis bagi anak yang hamil pada usia dini dapat menimbulkan krisis percaya diri. Karena itu, Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya perlindungan anak disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>121</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas menjadi tanggungjawab orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak. KPAI (komisi perlindungan anak Indonesia) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-

---

<sup>120</sup>Ratna Yuliana, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Menengah di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Studi Politik dan pemerintahan*, no. 3, vol. 4 (2015): hal. 5-9.

<sup>121</sup>Eddy Fadlyana, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri*, no. 2, vol. 11 (2009): hal. 136-140.

undang tersebut disahkan pada tanggal 22 september 2002 melalui Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan KPAI untuk melindungi anak masih menyisakan problem yang signifikan, terjadi kasus pelecehan seksual, pernikahan anak usia dini, anak-anak bekerja. Anak-anak selalu menjadi korban kekerasan karena itu, jarang sekali setiapdaerah melaporkan tentang kesehatan anak, rendahnya putus sekolah atau tiadanya akta kelahiran anak yang lahir tanpa pernikahan.<sup>122</sup> Anak-anak menjadi aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana jaminan HAM yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sementara bagi pelanggar HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Terhadap Pelanggar HAM. Undang-undang yang mengatur tentang HAM sangat banyak, namun ironisnya pelanggaran selalu terjadi di mana-mana. Pelbagai kasus yang bergulir senantiasa lebih banyak dilakukan dengan pelanggaran HAM. Usaha untuk meminimalisir pelanggaran HAM di upayakan dengan kebijakan yang dapat memperkecil ruang pelanggaran HAM. Salah satunya wewenang Kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai kebijakan penegakan hukum dalam penecegahan kejahatan. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1. Tujuannya, memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum, guna melindungi hak azasi manusia.<sup>123</sup> Sayangnya kebijakan tentang diskresi masih

---

<sup>122</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 9.

<sup>123</sup>Agung Widodo, "Perlindungan Hak Azasi Manusia Melalui Diskresi

menyisakan problem dan belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Pengkajian terhadap kebijakan dan undang-undang harus terus dievaluasi agar, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat meresahkan masyarakat. Karena itu, undang-undang harus digodok secara terus menerus guna, melahirkan peraturan undang-undang yang memiliki keberpihakan pada masyarakat. Politik sebagai penggerak dan roda perjuangan dalam melahirkan undang-undang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan pencapaian kesejahteraan bagi orang banyak.

Undang-undang tentang politik yang berkaitan dengan pemilu juga terus dikawal dan berusaha ditekan implementasinya secara benar. Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas adalah tujuan bangsa Indonesia. Karena itu, rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) terhadap penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara independen. Kecurangan dalam pemilu seringkali terjadi, karena intervensi pemerintah dan partai politik.<sup>124</sup> Keterlibatan LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi agama menjadi bagian penting dalam mengawal pemilu. Produk pemilu yakni, terpilihnya wakil rakyat yang akan menghasilkan produk undang-undang yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Salah satu keberpihakan tersebut adalah undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31

---

Dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian.” *Jurnal Lex Et Societies*, no. 3, vol. 6 (2018): hal. 31-37.

<sup>124</sup>Endang Sulastris, “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang Berintegritas.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 1, vol. 28 (2017): hal. 2-11.

Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kendati demikian, keterwakilan perempuan kuota 30% dalam jabatan politik dan jabatan publik masih menyisakan problem, berdasarkan hasil kajian bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi perempuan di antaranya;<sup>125</sup>

1. Motivasi dan kepercayaan perempuan dalam mengikuti kontestasi politik;
2. Keterbatasan pemilikan modal ekonomi, sosial dan politik;
3. Budaya patriarki yang masih berkembang di Indonesia;
4. Pragmatisme partai politik yang menguatkan caleg yang memiliki finansial ataupun popularitas.

Kendala atau tantangan harus disikapi dengan kemampuan membaca dan merencanakan agenda yang akan dilakukan. Peluang dan tantangan menjadi dilemma perempuan ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit. Karena itu, peran perempuan tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan butir-butir Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi perempuan di pelbagai sektor melalui kebijakan pemerintah menjelaskan adanya afirmasi terhadap perempuan yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak setara dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender baik wilayah domestik maupun publik harus benar-benar meniadakan diskriminasi, akses dan kontrol yang harus selalu dijaga bersama.

---

<sup>125</sup>Esty kawati, "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru." *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam*, no.1, vol. 16 (2017): hal. 67-69.

Keberpihakan terhadap perempuan dapat dilihat pada Amandemen UUD 1945 yang memuat kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesetaraan dalam ranah publik maupun privat yang berkeadilan baik pada aspek hukum dan pemerintahan. Pada pembentukan Draft Amandemen UUD 1945 organisasi perempuan dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan Untuk Perdamaian dan Demokrasi. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46 tentang HAM yang menjamin representasi perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

### **Perempuan dan Jabatan Publik**

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen tersebut harus didukung dengan undang-undang dan tindakan nyata dari masyarakat. Salah satu hasil kajian gender di daerah-daerah masih menganggap perempuan menempati posisi subordinat terhadap laki-laki. Meskipun, gaya kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik memiliki cara-cara yang khas dan diidentifikasi sebagai gaya kepemimpinan yang lebih moralis.<sup>126</sup> Identifikasi ini meski belum bisa digeneralisir, setidaknya menjadi pertimbangan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki peran penjagaan moral yang penting dalam jabatan publik.

Keberadaan perempuan dalam kancah politik, menarik perhatian masyarakat. Kelincahan dan kepiawaiannya, bahkan kecantikannya sering menjadi pusat perhatian di parlemen. Keterwakilan perempuan kuota 30% telah memberikan

---

<sup>126</sup>Rahma Hidayati, "Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh." *Jurnal Community*, no. 2, vol. 4 (2018): hal. 236-240.

kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam persoalan negara, khususnya peraturan perundang-undangan. Namun menjadi satu pertimbangan besar bahwa, posisi tawar perempuan dalam politik telah mengundang diskusi, semenjak diberlakukannya kebijakan *affirmative action* perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Meningkatnya jumlah perempuan di panggung politik tidak dibarengi dengan budaya politik yang dapat menunjang performa perempuan.<sup>127</sup> Budaya politik merupakan pola perilaku masyarakat yang orientasinya difokuskan pada kehidupan berpolitik, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum dan lainnya.

Dinamika politik lokal dan perempuan Indonesia dalam berjuang di politik pemerintahan, semakin mewarnai pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiga politikus perempuan yakni: Siti Qomariah (Bupati Pekalongan), Rustriningsih (Wakil Gubernur Jawa Tengah) dan Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) merupakan srikandi yang mampu memenangkan pemilu di wilayah Jawa. Karakteristik tokoh perempuan tersebut sangat unik dengan latar belakang yang berbeda, namun ketiganya dianggap menegaskan sebagai perempuan pemimpin penjaga moral. Nama-nama politisi perempuan tersebut berurusan dengan hukum dengan kasus yang berbeda-beda. Beberapa tokoh perempuan kepada daerah lainnya seperti Walikota Surabaya memiliki efek penting bagi prestasi perempuan. Tri Rismaharini dikenal sangat piawai dan cemerlang membangun Surabaya dan berkali-kali mendapatkan penghargaan. Posisi tawar perempuan dalam

---

<sup>127</sup>Ani Purwanti, *Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan Dewan*, <https://www.neliti.com/id/publications/19380/peran-anggota-dprd-perempuan-dalam-pembentukan-kbeijakan-di-dewan-perwakilan-rak>

politik pemerintahan telah menginspirasi perempuan lainnya dengan mengubah cara pandangnya, bahwa perempuan mampu melakukan transformasi yang bernilai tinggi.

Perjuangan perempuan dalam politik pemerintahan harus mewarnai dan memberikan kontribusi bagi politik pemerintahan. Ketidakadilan gender dalam berpolitik masih menyisakan problem. Namun, posisi tawar perempuan dalam politik sebagai sesuatu yang integral dalam menciptakan semangat perjuangan kaum perempuan berani tampil untuk mengungkapkan pendapatnya serta mampu bersaing dan bisa bersikap bijak dan tegas. Transformasi perempuan dalam politik memberikan dampak pada komoditi atau nilai jual yang tinggi, bahwa perempuan mampu berkompetisi dengan lainnya. Daya saing dan daya jual perempuan dalam politik, tentu mengikuti ritme atau trend di masyarakat. Kemampuan perempuan dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat memiliki sensitifitas, lebih dari itu perempuan memiliki nilai keanggunan, kesantunan, kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menginspirasi perempuan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan perempuan dalam berpolitik tidak hanya bertumpu pada proses mekanisme, lembaga dan sistem politik, tetapi juga memperluas basis konstituen (*broadening base*). Usaha ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan melalui lembaga lembaga formal maupun non formal dan partisipasi langsung.<sup>128</sup> Transformasi perempuan memiliki kepekaan dalam membaca sekaligus posisi tawar yang bernilai jual, mampu bersaing secara kompetitif untuk memperjuangkan hak-haknya melalui politik.

---

<sup>128</sup>Khatijatussalihah, *Membaca Elektabilitas Perempuan Dalam Politik*, <https://www.acehtrend.com/2019/02/11/membaca-elektabilitas-perempuan-dalam-politik/>



Kemampuan perempuan dalam membangun masyarakat melalui pelbagai sektor, baik keluarga, ekonomi, budaya dan politik telah membuktikan bahwa, perempuan mampu membawa perubahan. Pilkada yang dimenangkan oleh 14 perempuan di pelbagai kota telah menarik perhatian masyarakat telah menunjukkan elektabilitas keterwakilan perempuan meningkat, namun keberpihakan terhadap agenda dan isu perempuan masih rendah. Posisi inilah yang dapat berdampak pada marginalisasi perempuan, bahwa bahkan pada pemimpin perempuan sendiri belum tentu ada pemahaman tentang sensitif gender.

Pada satu sisi, maraknya gerakan perubahan yang bergulir di masyarakat termasuk tentang partisipasi perempuan dalam politik menjadi kesempatan yang baik untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gerakan perempuan yang sensitif gender tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan entitas sosial yang memiliki kepekaan terhadap perempuan. Kesempatan yang baik serta kekuatan yang besar ini membutuhkan perencanaan yang sistematis, terprogram, dan berkelanjutan sesuai dengan karakter pembangunan. Masyarakat yang memberi kesempatan subjek untuk memainkan perannya berkiprah secara bebas namun arif dan bijaksana, diyakini akan mampu membawa perubahan konstruktif bagi bangsa.

Gerakan perempuan dengan beragam aktifitas dalam pelbagai organisasi adalah bagian dari warna perubahan ini. Gerakan perempuan pada organisasi-organisasi keagamaan Islam misalnya, secara ideal maupun secara faktual telah mendorong lahirnya landasan pendidikan karakter dengan penguatan moral kebangsaan. Gerakan-gerakan ini sebagai embrio sekaligus akar bagi identitas budaya bangsa dengan beragam nilai luhur. Fakta ini menjelaskan bahwa perempuan telah mampu menguasai

diskursus politisasi gender dengan cara membuktikan kiprahnya. Pesantren mulai mengalami banyak perubahan, salah satunya Pengasuh Pesantren Bondowoso Nyai Hj. Ruqoyyah Maksum, menjelaskan bahwa kultur patriarkhi di pesantren telah mengalami banyak pemudaran.<sup>129</sup>

Politisasi identitas gender dalam kontestasi elit pada pengelolaan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun lembaga politik menjadi persoalan baru bagi gerakan perempuan. Politisasi identitas gender membuat gerakan perempuan tidak berangkat dari inisiatif perempuan sendiri. *Setting* politik yang menempatkan perempuan pada posisi strategis tertentu membuat sebagian gerakan perempuan bergerak dalam bayang-bayang *setting*-an itu sendiri. Apa yang terjadi dalam pilkada dan pemilu serentak, di mana perempuan tampil, sebagiannya adalah politisasi identitas yang dibuat oleh elit partai politik untuk tujuan politik kekuasaan.

Kondisi seperti ini dalam beberapa contoh kasus berat justru dapat berdampak kepada marginalisasi perempuan dan gerakan perempuan. Salah satu contoh, ketika bupati perempuan terjerat korupsi, maka menjadi problem yang luar biasa karena citra gerakan perempuan ikut runtuh. Karena itu, tumbuhnya peran perempuan dalam bidang politik sebagai manifestasi tumbuhnya gerakan harus dibangun ulang dari inisiatif serta kemandirian perempuan. Kontribusi dan keterlibatan perempuan yang sejak awal untuk memperjuangkan transformasi politik yang lebih baik, berkesetaraan, dan berkeadilan harus tidak berasal dari sistem yang hendak ia kritik.

---

<sup>129</sup>Mufisah Ch, *Peta dan Isu Gerakan Perempuan Islam Indonesia*, [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=69/hl=id/Peta\\_Dan\\_Isu\\_Gerakan\\_Perempuan\\_Islam\\_Di\\_Indonesia](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=69/hl=id/Peta_Dan_Isu_Gerakan_Perempuan_Islam_Di_Indonesia)

Feminisme merupakan gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan di berbagai ranah kehidupan termasuk dalam politik, ekonomi, budaya baik pada ruang privat maupun ruang publik. Feminisme telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat sebagai gerakan yang mencita-citakan keadilan gender. Feminisme berkembang pesat sebagaimana perkembangan feminisme di Indonesia, dengan kekhasannya yakni, feminisme Islam. Ikhtiar yang dilakukan adalah membongkar sumber-sumber permasalahan ajaran Islam dan menanyakan dominasi laki-laki dalam penafsiran Al-Quran dan hadis.<sup>130</sup> Pengetahuan normatif tentang bias gender yang tertuang dalam Al-Quran menjadi orientasi kehidupan beragama.

Relasi gender dibongkar dan dikonstruksikan dengan semangat Islam dan dikembalikan pada ideologi pembebasan yang mengangkat harkat martabat manusia. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh-tokoh feminisme Islam Indonesia di antaranya; Siti Chamamah Soeratno, Wardah Hafidz, Lies Marcos Natsir, Zakiah Darajat, Musdah Mulia, Masdar Farid Mas'ud, Budhy Munawar Rachman, dan Nasaruddin Umar.<sup>131</sup> Gerakan feminisme Islam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan yang didasari nilai-nilai Al Quran dan Al Hadits. Gerakan feminis memberikan kontribusi bagi perempuan dalam kepemimpinan dan jabatan publik yang mampu menghilangkan diskriminasi dan budaya patriarki serta mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

---

<sup>130</sup>Shabana Fatma, *Woman and Islam* (New Delhi: Sumit Enterprises, 2007), hal. 37.

<sup>131</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam." *Jurnal al-Ulum*, no. 2, vol. 13 (2013): hal. 504.

## Penutup

Pada uraian di atas mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan sejarah reformasi yang diawali dengan turunnya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Mengidentifikasi pelbagai peristiwa sejarah reformasi dan latar belakang terjadinya perjuangan reformasi. Menjelaskan krisis ekonomi yang berdampak inflasi turunnya nilai rupiah, suhu politik yang memanas, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin pemerintahan. Titik klimaks yang menegangkan sekaligus menjadi kegembiraan bagi bangsa Indonesia pada 22 Mei 1998 mundurnya Soeharto dari Presiden Republik Indonesia.

Mahasiswa juga diharapkan berkompeten menjelaskan konflik politik yang berujung pada konflik etnis, bahkan isu sara atau agama. Konflik *horizontal* yang bermula dari perbedaan pandangan atau pemahaman dapat berakhir dengan pertumpahan darah. Sensitifitas masyarakat dalam menghadapi masalah harus ditelaah dengan baik dan diajak bicara dengan cara-cara yang bijak. Pendekatan persuasif dari pelbagai elemen masyarakat, bermusyawarah untuk mufakat harus dikedepankan sebagaimana penegakan butir-butir nilai Pancasila. Azas kemufakatan, persatuan dan kesatuan dalam NKRI harus tetap terjaga dengan mengesampingkan egoisme masing individu maupun golongan.

Perjuangan perempuan di Era Reformasi yang diawali dengan kongres pertama yang melahirkan pelbagai organisasi LSM, *women crisis center* dan *hotline*. Partisipasi perempuan dalam perjuangan pendampingan dan pemberdayaan perempuan dipelbagai posisi. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Juga bagaimana negara mampu melindungi dan memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan anak-anak bangsa.

Mahasiswa diharapkan bisa menerangkan perubahan Amandemen Undang-Undang 1945 yang terjadi pada pelbagai bidang dengan pasal-pasalanya. Undang-undang tentang ekonomi yang bertumpu pada asas kemakmuran dan kekeluargaan, bidang pendidikan yang mewajibkan belajar bagi warganegara selama 12 tahun, serta bagaimana Undang-Undang Perkawinan dapat membantu negara menginisiasi lahirnya keluarga berkualitas. Demikian halnya dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana warga negara dapat menjaga hak-haknya. Pada bidang politik yang mengatur tentang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kemudian bidang sosial budaya yang membawa peradaban bangsa, serta paa semua undang-undang yang menjadi bagian penting sebagai kerangka acuan hidup berbangsa dan bernegara, maka mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis amandemen dengan interpretasi dan argumentasinya sesuai rujukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keterlibatan perempuan dalam kuota pemilu dan jabatan publik. Kesempatan perempuan berkompetisi dan bersaing untuk maju dalam pemilu. Afirmasi kuota 30% yang masih belum terpenuhi dan kemampuan perempuan dalam memimpin pemerintahan. Munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di berbagai daerah, dengan kecakapannya dan kesuksesannya. Meskipun sebagian yang lain, juga harus masuk hotel prodeo karena, kasus korupsi yang belum jauh dari kesan melekat pada kebanyakan pejabat negara. Mengkritisi pejabat-pejabat publik dalam memimpin dan menata pembangunan daerah. Menyikapi gerakan perempuan syang memiliki misi anti diskriminasi dan bias gender serta mengusung keadilan dan sensitif gender. Gerakan feminisme dan peran tokoh-tokoh feminist Islam menjadi pengurai pengetahuan kesalah

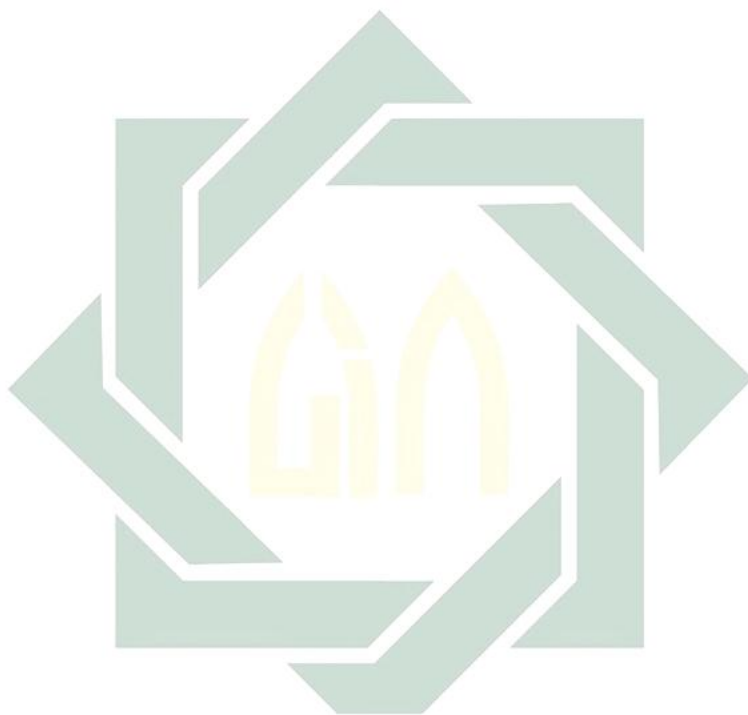
pahaman mengenai interpretasi agama yang bias gender dalam Al-Quran dan Al-Quran dan Hadis menjadi pemahaman Islam yang mengangkat harkat martabat manusia tanpa bias gender.

Secara singkat mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis implementasi Pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Era Reformasi menjadi pijakan awal dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara nyata. Mahasiswa juga mampu menganalisis pelbagai perjuangan reformasi dan mengkritisi kasus-kasus yang bergulir di Era Reformasi. Lebih dari itu, juga menjelaskan perkembangan keberhasilan yang dicapai perempuan dalam menuntaskan pemahaman tentang gender. Mahasiswa melakukan refleksi dengan memperkaya diskusi dengan kasus-kasus tambahan yang belum diungkap pada kasus-kasus di atas. Pembahasan feminisme di Era Reformasi dapat diperdalam dengan diskusi-diskusi kritis oleh mahasiswa.

### **Latihan**

1. Bagaimana terjadinya detik-detik turunya Orde Baru?
2. Bagaimana perbedaan masa Orde Baru dan Era Reformasi?
3. Bagaimana saudara memahami perjuangan mahasiswa yang wafat pada peristiwa 22 Mei 1998?
4. Bagaimana saudara memahami konflik politik yang berujung pada konflik agama atau isu sara dan etnis?
5. Bagaimana perubahan Amandemen Undang-Undang 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
6. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang Perkawinan yang masih menyisakan problem di masyarakat?
7. Bagaimana perempuan menyikapi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga?

8. Bagaimana perempuan memimpin dalam jabatan publik?
9. Bagaimana perjuangan perempuan dalam mengembangkan gerakannya di sepanjang Era Reformasi?
10. Bagaimana mahasiswa menjaga dan mengembangkan perjuangan reformasi di masa mendatang?





## BAB 5

### Membumikan Pancasila

- Kemampuan mahasiswa** : Memahami Pancasila sebagai produk elit yang menuntut dibumikan.
- Indikator** :  
- Mampu menerangkan bagaimana perubahan Pancasila dari produk elit ke produk populer yang membumi.  
- Mampu menerangkan konsekuensi turunan Pancasila sebagai produk yang membumi di era kebebasan.  
- Mampu menerangkan perempuan memanfaatkan era kebebasan ini.
- Bahan kajian** :  
- Perubahan Pancasila dari ideal ke faktual.  
- Konsekuensi turunan Pancasila sebagai produk populer yang dibumikan.  
- Peran perempuan di era nalar populer.
- Metode belajar** : Menonton video, melihat gambar sejarah, gambar tokoh, gambar kongres perempuan,  
- Diskusi, poin penilaian, *Discovery Learning, Self-Directed Learning, Contextual Instruction*
- Waktu belajar** : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.



- Pengalaman belajar : - *Discovery Learning*, mahasiswa mencari, mengumpulkan, dan membangun ulang informasi secara deskriptif. Dosen memberi ulasan hasil deskripsi ulang mahasiswa. *Self-Directed Learning*, membuat perencanaan kegiatan belajar mandiri, mensimulasikan pelaksanaannya, sekaligus memberi asesmen pada pola belajarnya sendiri. Dosen memberi apresiasi. *Contextual Instruction*, memahami ulang teori yang akan dipelajari mengaitkannya
- Kriteria/bobot penilaian : Penilaian proses belajar (40%), penilaian produk belajar (30%), penilaian etika belajar (30%).
- Indikator materi RG : Perempuan belum optimal memanfaatkan peluang ini.
- Indikator strategi RG : Rekonstruksi Pancasila, rekonstruksi ideologi gender.

## **Pendahuluan**

Memahami Pancasila tidak hanya sekedar menghafalkan tiap butirnya dari kelima sila, namun mampu mengimplementasikan maksudnya dalam kehidupan nyata. Sebagai warisan bangsa yang bernilai sejarah, memuat prinsip dasar, dan tidak mudah diubah, Pancasila adalah sumber dari seluruh tafsir arah bangsa. Pancasila bernilai dan signifikan karena di dalam dirinya terdapat konsep yang mengayomi semua kepentingan anak bangsa, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Pengayoman yang dimaksud tidak hanya bersifat melindungi dari hal-hal yang mengancam, namun juga bersifat mengarahkan ke perikehidupan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Secara ideal, Pancasila adalah alat untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke kondisi kesejahteraan, kecerdasan, keadilan, dan perdamaian.

Pancasila sebagai sumber inspirasi bangsa dapat dipelajari dan diambil nilai-nilai pengetahuannya. Secara kefilosofan, prinsip dasar umum mengenai ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, persatuan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan dalam Pancasila adalah nilai universal yang mudah diterima. Tidak mengherankan jika kepopuleran Pancasila sebagai ideologi tidak hanya bisa dimengerti nasional tetapi dikenal pula oleh dunia internasional. Nilai-nilai kontemporer yang bisa dikembangkan dari prinsip dasar ini tidak terbatas, mulai dari perlindungan HAM, keragaman etnis, perubahan iklim, disrupsi kemajuan teknologi, serta berbagai antisipasinya selalu terbuka dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila yang digagas oleh para pemimpin bangsa dapat menjadi haluan dalam kehidupan, tidak sebatas slogan kebanggaan.

Latihan mengenal Pancasila telah dimulai sejak PAUD (Pendidikan Usia Dini) sampai PT (Pendidikan Tinggi). Latihan praktis harian seperti melaksanakan ibadah, dekat

dengan pembicaraan akan Tuhan, sikap gotong royong, saling menghargai, bebas berpendapat, serta sifat berbagi manfaat dengan sesama merupakan contoh yang bisa kita temukan dalam praktik kehidupan. Ajaran Pancasila bukan sekedar teori atau ideologi bangsa tetapi mampu dibumikan mewujudkan nyata dalam pengamalan hidup faktual.

Media televisi, media sosial, dan media cetak menginformasikan sendi-sendi kehidupan yang berazaskan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari tingkat elit hingga akar rumput mengenal Pancasila secara merata. Bentuk-bentuk implementasi Pancasila dapat dilihat dari keteladanan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keteladanan yang lahir dari masyarakat bawah. Kita lihat bagaimana orangtua mengajarkan anak-anaknya mengenal Tuhan yang menciptakan isi dunia dan mengajarkan lingkungan keluarga serta tetangganya. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang telah dikenalkan sejak kecil akan menjadi pondasi dan memperkokoh identitas bangsa serta melestarikan nilai-nilai cinta Tanah Air.

Refleksi setia pada Pancasila pada setiap jiwa warga negara menjelaskan betapa kecintaan terhadap tanah air dan semangat nasionalisme masih tumbuh subur di tengah bangsa Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam momentum hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni misalnya, merupakan momentum untuk membuktikan betapa kuat rasa kebangsaan. Ada perasaan satu meski faktanya beragam, sebuah keragaman yang dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila bahwa manusia Indonesia wajib saling menghargai. Antusiasme luar biasa masyarakat terhadap Pancasila, dengan demikian berarti menandakan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebhinekaan tunggal ika, sebagai bentuk keragaman bangsa

yang harus dirawat agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa mengaluskan paham antara minoritas dan mayoritas agar segenap warga negara terus merasa satu dan melupakan jurang perbedaan demi tetap teguhnya persatuan bangsa. Kesetiaan Pancasila dapat dilakukan dengan beragam bentuk kegiatan yang meletakkan pondasi atau komitmen untuk menjaga dan merawat Pancasila sebagai ideologi negara. Memahami Pancasila perspektif gender menjadi salah satu kiat untuk meniadakan diskriminasi sebagaimana ajaran Pancasila yakni, nilai-nilai kebersamaan dan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan dan kesetaraan gender menjadi instrumen penting dalam mengaktualisasikan Pancasila. Keadilan dan kesetaraan gender menjadi kerangka berpikir dalam melihat fenomena sosial agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat. Berpikir dengan menggunakan perspektif gender akan menghasilkan cara pandang yang mengedepankan keadilan, kesetaraan tanpa diskriminatif pada salah satu pihak karena alasan jenis kelamin atau alasan lainnya. Perspektif gender dapat melekat pada setiap pribadi atau warga negara yang penting sebagai kerangka berpikir pada setiap individu masyarakat.

Pada bahasan membumikan Pancasila dalam kehidupan faktual, secara umum mengharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai produk implementatif yang meliputi; gagasan Pancasila dari kesepakatan elit menjelma signifikan menyentuh akar rumput dan terpatery di hati masyarakat Indonesia. Kebumian Pancasila dapat ditemukan pada euforia di tengah masyarakat melalui berbagai bentuk. Era kebebasan memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mengekspresikan diri sebagai warga negara yang terhubung

dengan proses aktualisasi Pancasila. Namun demikian, terutama bagi perempuan, nilai-nilai Pancasila hingga di era kebebasan ini belum dapat sepenuhnya diperoleh asas manfaatnya secara baik oleh seluruh perempuan di bumi Indonesia. Sebagian perempuan yang berada dalam kondisi rentan dan marginal membutuhkan perlindungan dan penguatan dari negara dan masyarakat sekitarnya. Karena itu, upaya membumikan Pancasila dengan perspektif gender melalui konsep-konsep yang praktis dan dinamis sangat diperlukan. Perjuangan gender menjadi solusi dalam membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan dengan bertumpu pada pandangan yang lebih serius dalam memperhatikan hak-hak perempuan, anak, difabel, kelompok minoritas dan marginal, serta kelompok rentan lainnya.

### **Membumikan Pancasila**

Gagasan Pancasila lahir dari tokoh-tokoh pemikir bangsa yang memiliki tujuan untuk meletakkan kerangka berpikir komprehensif bagi eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan karya tokoh-tokoh elit yang mampu diterjemahkan ke dalam pikiran-pikiran masyarakat menengah hingga masyarakat marginal. Meskipun Pancasila sering dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok, namun mampu memproteksi dengan mengedepankan integrasi nasional.<sup>132</sup> Pancasila menjadi parameter untuk proses penyatuan dan pembauran dengan berbagai aspek budaya, sosial, agama dan ekonomi bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman boleh berubah namun, Pancasila sebagai dasar negara tak akan pernah berubah. Ideologi bangsa yang

---

<sup>132</sup>Andi Aco Agus, "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Republik Indonesia." *Jurnal Sosialisasi*, no. 3, vol.3 (2016): hal. 19-24. <http://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>

akan terus menjadi pondasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Perjalanan Pancasila yang diawali dari masa kemerdekaan, orde lama, Orde Baru dan masa reformasi mengalami pasang surut dalam mengimplementasikan Pancasila. Masa awal kemerdekaan Pancasila baru dikenal oleh sekelompok elitis yakni para pemimpin dan orang-orang dari sekelompok tertentu. Gelora kemerdekaan ideologi Pancasila dikeramatkan dan disebut sebagai azimat yang tidak akan pudar. Perkembangannya Pancasila menjadi lambang kebanggaan dengan munculnya multi partai untuk menggelorakan semangat Pancasila. Pada pemerintahan Soekarno Pancasila menjadi ideologi negara dengan mewujudkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kekuasaan presiden sebagai penguasa tertinggi negara, sebagaimana pernah dilakukan dengan dekrit presiden 5 juli 1959;
2. Peran partai Politik terbatas, karena keberadaan partai seolah-olah hanya sebagai partai pendukung saja;
3. Peran militer semakin besar, yang memiliki fungsi ganda yakni, sebagai pertahanan negara dan berperan dalam pemerintahan;
4. Paham komunis berkembang, karena hubungan yang baik dengan presiden serta parta komunis mendukung presiden sehingga kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh komunis;
5. Anti kebebasan pers, artinya pers hanya sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik namun, dibatasi oleh pemerintah.

Pada masa Soekarno, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan. karena tidak ada kontrol dari partai-partai, dan DPR tidak mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Situasi memburuk karena disusul dengan pertentangan politik serta pecahnya komunisme yang menimbulkan peristiwa yang dikenal dengan tragedi G30S PKI

yakni, gerakan 30 September partai komunis Indonesia. Masa orde lama berlalu dengan penyerahan kekuasaan kepada jenderal Soeharto untuk mengemban amanah rakyat.

Ideologi Pancasila masih menyisakan problem dalam implementasinya, menjadi pekerjaan untuk mengevaluasi kembali pada masa pemerintahan berikutnya. Awal kepemimpinan presiden Soeharto ideologi Pancasila mulai berkibar dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Diawal era Orde Baru, stabilitas pemerintah cenderung kondusif, Pancasila memiliki peran besar untuk pembangunan bangsa. Pancasila menjadi simbol kejayaan bangsa melalui implementasi P4 (pedoman penghayatan pengamalan Pancasila) yang diberikan di sekolah-sekolah sampai pendidikan tinggi saat orientasi belajar. P4 diturunkan dalam butir-butir Pancasila yang berisi tentang nilai-nilai setiap sila Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>133</sup> Turunan butir-butir Pancasila pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, diejawantahkan dalam turunan yang harus dilaksanakan dalam berkehidupan sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Percaya kepada Tuhan Yang maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama yang berbeda;
4. Membina kerukunan hidup diatara sesama umat;
5. Agama merupakan urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya;

---

<sup>133</sup>Dwi Yanto, "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Sehari-Hari." *Jurnal Ittihad*, no. 25, vol. 14 (2016): hal. 40-43.

6. Mengembangkan sikap saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadahnya;
7. Tidak memaksakan kepercayaan agamanya.

Penjelasan butir-butir Pancasila sila pertama, merupakan antisipasi masyarakat yang memiliki keragaman agama. Pemerintah mengaturnya dalam bentuk kebijakan yang harus diimplementasikan oleh setiap warga negara.<sup>134</sup>

Butir-butir Pancasila pada sila pertama difokuskan pada praktik kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, turunan dari butir-butir tersebut adalah sebagai berikut;

1. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia tanpa diskriminatif;
3. Memiliki sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa dan tepo seliro serta tidak semena-mena terhadap orang lain;
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.
5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Butir Pancasila sila kedua, menggambarkan kehidupan manusia yang guyub rukun. Implementasi butir-butir kemanusiaan yang adil dan beradab harus dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hak azasi manusia ditegakkan sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang mengaturnya.

---

<sup>134</sup>J. Tjiptabudy, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi." *Jurnal SASI*, no. 3, vol. 16 (2010): hal. 4-7.



Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia dapat dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut;

1. Setiap warga negara mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara;
3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa kebangsaan berkebangsaan bertanah air Indonesia;
4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Butir-butir Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang menjelaskan cara menjaga dan merawat keragaman bangsa agar tetap bersatu dan tidak bercerai berai. Butir sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Butir-butir Pancasila yang dapat dijelaskan dalam beberapa butir sebagai berikut;

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;

7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila keempat merupakan perwujudan masyarakat atau bangsa Indonesia layak dipercaya untuk menjadi wakil rakyat yang mampu bersikap bijaksana. Partisipasi masyarakat dalam politik dan menjadi wakil rakyat merupakan perwujudan pembangunan bangsa yang harus terlibat secara aktif.

Pada sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat dijabarkan dalam beberapa butir-butir sebagai berikut;

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain;
3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
4. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
5. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
6. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pengamalan butir-butir Pancasila di atas, menjadi modal untuk membangun pondasi yang kuat untuk generasi bangsa

yang ditanamkan di sekolah sejak usia sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Penanaman pendidikan karakter Pancasila khususnya implementasi penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai modal awal untuk senantiasa cinta tanah air dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pengamalan Pancasila perlu dilakukan revitalisasi untuk menjaga generasi milenial.<sup>135</sup> Generasi milenial aset bangsa yang harus diberikan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menjaga dan merawat ideologi Pancasila harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Warisan para pejuang dan pemimpin bangsa Pancasila menjadi simbol kebanggaan negara. Pancasila harus membumi di hati masyarakat dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Pasang surut Pancasila senantiasa terjadi dengan munculnya konflik di berbagai daerah. Keragaman suku, daerah, etnis, ras, dan agama sangat potensi untuk terjadinya konflik. Kondisi objektif Indonesia keragaman keyakinan yang komplek sering menimbulkan ketegangan karena, perbedaan pandangan. Pandangan Pancasila melahirkan teoritisasi Pancasila yang dikategorikan dengan paham ideologi. Pandangan ideologi Pancasila menjadi kerangka berpikir manusia dalam membumikan Pancasila.

Dalam perspektif Althusser, ideologi terdiri dari empat aspek penting,<sup>136</sup> di antaranya;

---

<sup>135</sup>I. Komang Wisnu Budi Wijaya, "REVITALISASI PROGRAM PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) UNTUK MEMBENTUK GENERASI EMAS 2045 BERMORAL PANCASILA," *Prosiding Nasional* (March 30, 2018), accessed October 20, 2019, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/PN/article/view/27>.

<sup>136</sup>Arif Rachman, "Wacana Pancasila dalam Era Reformasi." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, no. 2, vol. 1 (2012): hal. 21-27.

1. Ideologi memiliki fungsi untuk membentuk subjek;
2. Ideologi sebagai pengalaman yang dialami tidaklah palsu;
3. Ideologi sebagai pemahaman yang keliru tentang kondisi nyata eksistensi adalah palsu;
4. Ideologi terlibat dalam reproduksi formasi-formasi sosial dan relasi mereka terhadap kekuasaan.

Ideologi Pancasila menjiwai seluruh bangsa Indonesia yang tidak hanya sebagai kerangka berpikir tetapi juga bertindak. Perkembangan ideologi Pancasila menapaki pasang surut. Kerikil tajam dan tantangan tantangan juga terjadi di era reformasi dengan munculnya serangkaian bom yang meledak di mana-mana, munculnya aliran intoleran dan kelompok radikal dan terlihat menguat di awal tahun 2000 hingga tahun 2016. Fenomena lain adalah tantangan kesenjangan ekonomi antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok ekonomi lemah.

Kesenjangan dari implementasi Pancasila yang tidak konsisten bisa mengancam ikatan-ikatan kebangsaan, berpotensi memudarkan semangat persatuan sehingga dapat berdampak pada munculnya konflik. Kondisi ini segera diantisipasi pemerintah dengan membentuk unit kerja yakni, UKPPIP (Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila) yang digagas oleh Binsar Luhut Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan pemikir kebangsaan, Yudi Latif. Tugas dari unit kerja tersebut adalah mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.<sup>137</sup> Pancasila menjadi solusi setiap problem yang bergulir, karena itu perubahan Pancasila dari produk elit akan tergerus menjadi produk populer.

Perubahan ini tentu memberikan pengaruh besar bagi

---

<sup>137</sup>Heru Margianto, *Strategi Baru Untuk Pancasila*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/07/14304971/strategi.baru.untuk.Pancasila>

masyarakat Indonesia, kontribusi masyarakat terhadap bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Perubahan Pancasila yang merupakan produk elit telah berubah menjadi produk populer mewarnai proses demokratisasi bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya. Karakteristik pembentukan bangsa Indonesia mengacu pada empat pilar bangsa di antaranya: ideologi Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut menjadi referensi utama dalam membangun bangsa, sehingga setiap perubahan yang terjadi dalam proses demokratisasi merujuk pada kepentingan negara untuk masyarakat. Empat pilar bangsa menjadi produk populer dan melekat pada setiap pribadi bangsa yang dapat disampaikan dengan cara-cara yang bijak dalam menegakkan NKRI.

Partisipasi masyarakat di era disrupsi menjadi langkah yang tepat dalam menyumbangkan pemikiran tentang kebhinekaan atau yang tertera dalam Pancasila telah menjadi produk populer. Berbagai media sosial menjadi cara yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi dalam mengimplementasikan Pancasila. Popularitas Pancasila yang hadir pada setiap warga negara menjadi modal besar, bahwa cinta terhadap dasar negara merupakan aset sekaligus pondasi setiap pribadi masyarakat yang tak akan terkikis di manapun berada.

Ideologi Pancasila yang telah mengakar pada pribadi setiap bangsa akan berdampak pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa memiliki sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat karena itu, sistem pembangunan Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila baik secara vertikal maupun *horizontal*. Perubahan Pancasila dari produk elit menjadi produk populer semakin menginspirasi bagi generasi-generasi bangsa. Pemerintah dan masyarakat secara

aktif dan berkelanjutan membuat program-program kegiatan yang mengajak pada pencapaian popularitas Pancasila yang menginspirasi masyarakat. Salah satu kontribusi masyarakat pada aspek budaya dapat diunggah melalui laman *website* atau atau berbagai media sosial yang mewarnai keragaman dan kebhinekaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai produk populer tidak hanya melekat pada masyarakat tetapi, memiliki nilai-nilai kebangsaan yang menginternalisasi<sup>138</sup> setiap warga masyarakat. Dengan demikian popularitas Pancasila sebagai produk populer menjadi kunci setiap warga masyarakat untuk memiliki budi, hati dan kehendak yang teraktualisasi pada nilai-nilai Pancasila. Masyarakat merasakan nilai-nilai manfaat yang diperoleh dari Pancasila baik dalam konsep pemahaman maupun implementasi dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hadinya Pancasila sebagai ideologi negara memberikan spirit bagi kehidupan bangsa yang dapat menjadi simbol dan lambang negara. Karena itu, pada era reformasi menjadi upaya penataan dan peningkatan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, menghargai hak-hak asasi manusia serta membangun suasana masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dalam bidang politik harus membangun suasana yang elegan yang menumbuhkan kedewasaan dan kematangan dalam demokrasi. Perilaku politik harus memiliki respon/peduli, cerdas, bersih, toleran dan santun menghargai kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa. Menjaga etika politik<sup>139</sup>, berarti berperilaku politik perlu bimbingan dan

---

<sup>138</sup>Kasdin Sihotang, *Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan* (Jakarta: Atmajaya, 2019), hal. 97.

<sup>139</sup>Budiyono, "Menjaga Etika dalam Berpolitik." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 1, vol. 1 (2012): hal. 52-58. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/3736>

memiliki nilai-nilai moral yang bertumpu pada ideologi negara yakni, Pancasila. Popularitas Pancasila dapat dilihat pada partisipasi budaya yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia dengan berbagai budaya. Usaha yang dilakukan membudayakan masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.<sup>140</sup> Budaya masyarakat Indonesia harus mencerminkan Pancasila sebagai sendi kehidupan masyarakat. Budaya gotong royong, bekerjasama saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila tertanam pada setiap warga negara yang dapat menjadi filter dan pondasi hidup dalam pergaulan di masyarakat maupun di negara asing.

Pancasila sebagai produk populer, dapat hadir memenuhi setiap ruang-ruang dalam dunia disrupsi maupun dunia global. Peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam berbagai kesempatan. Keterlibatan perempuan dalam kemajuan ekonomi dan globalisasi menjadi produk populer yang dapat mengantarkan pembangunan manusia Indonesia. Sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, bukanlah sekedar mencari persamaan hak, namun menjalankan fungsinya agar memiliki arti untuk pembangunan manusia. Pancasila sebagai produk populer melahirkan pembangunan manusia yang tidak hanya bertumpu pada satu bidang, tetapi berbagai aspek yang dapat mendukung program pemerintah.

---

<sup>140</sup>P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 5.

## ***Euforia Pancasila di Era Kebebasan***

Gegap gempita Pancasila di Era Orde Baru, memiliki sejarah yang spesifik. Masyarakat dalam aktifitasnya sehari-hari diawasi agar selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Konsekuensi dari pengawasan ini melahirkan fenomena kesetiaan dan kecintaan terhadap Pancasila, meskipun pertentangan atas tafsir Pancasila dari penguasa juga bermunculan. Artinya, masyarakat Indonesia Era Orde Baru menaruh perhatian luar biasa terhadap Pancasila melalui bermacam ekspresi, konstruktif maupun kritis. Nilai-nilai Pancasila menjadi perbincangan dalam segala aspek kehidupan, diperbincangkan implementasinya dalam setiap kebijakan.

Pasang surut Pancasila di era Orde Baru mengalami perubahan khususnya dalam menerjemahkan Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sendi kehidupan yang harus dipedomani dan sumber pemikiran untuk ditegakkan, tetapi pada faktanya Pancasila juga diselewengkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru di antaranya;<sup>141</sup>

1. Adanya upaya melanggengkan presiden Soeharto selama 32 tahun;
2. Terjadi penafsiran sepihak adanya program P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila;
3. Adanya penindasan ideologis, yang dapat membuat orang-orang takut bersuara;
4. Adanya penindasan secara fisik atau pelanggaran HAM;
5. Perlakuan diskriminasi bagi *non* pribumi atau kalangan minoritas.

Penyelewengan terhadap keluhuran Pancasila harus segera

---

<sup>141</sup>Andre Utama, *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/7y9wn/>



diselamatkan, yakni ketika tahun 1998 menjadi peristiwa sejarah penegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Awal era reformasi menjadi peristiwa untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang tergerus oleh rezim yang berkuasa. Karena itu, Pancasila harus terus dijaga dan dirawat secara terus menerus.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kebangsaan dan berideologi Pancasila, memiliki cita-cita luhur sebagaimana para pejuang kemerdekaan. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemakmuran masyarakat harus dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Cara-cara yang harus ditempuh dengan mewujudkan demokrasi ekonomi Pancasila sebagai karakter dan ideologi bangsa. Perekonomian nasional harus menggunakan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Asas dasar perekonomian nasional adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yakni, diberlakukannya etika dan moral agama, yang dapat menjadikan keberkahan bagi penganut agama;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa dalam membangun ekonomi menggunakan prinsip keadilan tidak melakukan pemerasan atau riba', intinya halal dan baik;
3. Persatuan Indonesia, bahwa prinsip ekonomi mengedepankan asas kebersamaan, gotong royong, bekerjasama tidak saling membunuh atau menjegal;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskan dalam prinsip ekonomi membangun demokrasi Pancasila untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjelaskan

prinsip ekonomi itu kemakmuran orang banyak bukan golongan atau perseorangan.

Inti demokrasi Pancasila menjelaskan bahwa, kegiatan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi pada setiap individu dan adanya pemerataan pembagian kerja dan pemerataan pembagian hasil bagi pemenuhan hak setiap masyarakat. Pemenuhan kebutuhan manusia sangat kompleks, termasuk keinginan dan cita-citanya.

Salah satu sendi kehidupan masyarakat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan manusia guna, melestarikan generasinya maka, kebutuhan dalam perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berkeluarga. Agama dan negara mengaturnya secara baik berdasarkan Pancasila. Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari dasar sila pertama tersebut, bahwa perkawinan diatur dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak dipandang sebagai urusan yang bersifat pribadi melainkan harus dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan Pancasila falsafat hidup bangsa Indonesia.

Pernikahan merupakan kebutuhan fisiologis dalam perspektif Abraham Maslow, bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari lima bagian di antaranya; 1) kebutuhan fisiologis. 2) kebutuhan rasa aman. 3) kebutuhan rasa kasih sayang. 4) kebutuhan harga diri. 5) aktualisasi diri.<sup>142</sup> Pada faktor kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan pemenuhan awal di antaranya; makan minum, tempat tinggal, serta kebutuhan seksual yang

---

<sup>142</sup>Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1, vol. 3 (2012): hal. 3-8.

diatur oleh negara melalui undang-undang perkawinan dan agama. Perkawinan menjadi perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang sangat suci dan sakral. Kedua belah pihak harus saling menghormati dan menghargai serta saling melengkapi. Pernikahan dalam aturan agama harus seagama, namun seiring perkembangan aturan tersebut menimbulkan perdebatan karena alasan HAM (hak azasi manusia). Indonesia sebagai negara pluralis sangat mungkin terjadi pernikahan beda agama.<sup>143</sup> Negara dan agama harus dapat melindungi masyarakatnya dalam ikatan pernikahan. Pancasila menjadi pijakan dalam mengatur undang-undang pernikahan termasuk problem-problem yang dihadapi dalam keluarga. Turunan Pancasila lebih dipertajam dengan kajian akademik, khususnya dalam mencari dan menemukan format yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Turunan Pancasila juga diterjemahkan dalam ragam kegiatan akademik, dalam sebuah konsep teori yang menggunakan kerangka berfikir atau paradigma Pancasila. Konsep teori akuntansi Pancasila dibangun merujuk pada kemerdekaan sistem akuntansi Indonesia agar, terlepas dari kapitalis. Konsep tersebut merupakan cara-cara yang efektif untuk membangun bangsa berbasis Pancasila. Konsep Pancasila *enterprise theory* merupakan strategi dalam membangun akuntansi yang berorientasi pada kepentingan holistik sehingga, ada pergeseran dari paradigma sekularisme menuju spiritualisme atau paradigma antroposentris menuju paradigma biosentris.<sup>144</sup> Menerjemahkan Pancasila dalam ragam

---

<sup>143</sup>Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (January 18, 2016): hal. 289-302-302.

<sup>144</sup>Arrayan Firdaus, "Pancasila Enterprise Theory and Pancasila Botton Line: Suatu Kajian Mengakuasi Akutansi Ke-Indonesiaan dari Jeratan

aktifitas memperkaya khasanah pengetahuan dan pengalaman yang dapat dirasakan masyarakat. Kajian akademik berbasis riset atau penelitian dapat menciptakan pengetahuan baru yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan implementasinya.

Antusiasme terhadap Pancasila melekat pada setiap warga masyarakat melalui ragam postingan diberbagai media. Kecintaan yangberlebih-lebihandapat dilihat setiap perayaan kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila dan hari-hari nasional lainnya. Era globalisasi, peran Pancasila memegang peranan penting sebagai filter masuknya arus budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi solusi untuk permasalahan yang berkembang di antaranya; persoalan etnis, budaya, ras, bahasa dan agama.<sup>145</sup> Keberagaman dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang sangat kompleks sering menjadi pemicu konflik, maka euforia Pancasila menjadi salah satu solusinya. Euforia Pancasila menjadi kekuatan bangsa dan negara Indonesia ditengah arus globalisasi dan pergaulan dunia. Turunan Pancasila dapat diterjemahkan dalam berbagai aktifitas masyarakat, dengan menciptakan berbagai karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Salah satu euforia pemahaman atas Pancasila di era kebebasan adalah keterkaitan Pancasila terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia, seperti: kompilasi hukum Islam dalam bidang peradilan dan kompilasi hukum perbankan Islam dengan bidang ekonomi. Euforia Pancasila memiliki magnet pada setiap aspek untuk senantiasa dikaitkan dan dimaknai

---

Kapitalis." *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 8 (2017): hal. 274-277. <https://jurnal.polban.ac.id/index.php/proceeding/article/view/735>

<sup>145</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 305.

bahwa, beragam aktifitas kegiatan harus bernilai Pancasila. Tafsir Pancasila mulai bergulir di mana-mana, misalnya penerapan demokrasi Pancasila, kampung Pancasila termasuk kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia juga dikaitkan dengan Pancasila, khususnya masyarakat Jawa kuno.<sup>146</sup> Era reformasi euforia Pancasila melanda bangsa Indonesia yakni, kebebasan untuk senantiasa menyertakan setiap aktifitas kegiatan atas nama Pancasila.

Euforia Pancasila yang tercermin pada setiap aktifitas kegiatan merupakan cerminan produk populer, sekaligus menjadi resonansi kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Era globalisasi Pancasila harus menjadi pilar yang mampu menjawab tantangan dunia, dan menjadi produk populer. Bergulirnya paham radikalisme yang melanda bangsa Indonesia menjadi kerikil tajam yang harus segera diatasi, Pancasila menjadi solusi di pusaran globalisasi harus menjadi prinsip dan ideologi kebangsaan yang dapat membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri.<sup>147</sup> Pancasila akan terus mewarnai dan menjadi perekat antar suku bangsa, agama dan ras serta budaya. Melalui Pancasila jauh dari diskriminasi, ketidakadilan bahkan kebebasan. Pancasila menjadi produk populer yang mampu menciptakan suasana keharmonisan dan rasa satu kebangsaan, serta selalu siap untuk memfilter dari serangan manapun. Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting untuk menciptakan keharmonisan dan semangat kekeluargaan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh bangsa Indonesia.

---

<sup>146</sup>Al-Habieb Muhammad Rizieq Husein Shihab, *Pengaruh Pancasila pada Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Thesis 2012, Universitas of Malaya, <http://studentsrepo.um.edu.my/5038/>

<sup>147</sup>Suhardi Alius, *Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Jurnal Kemanaan Nasional, 2016. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/41/34>

Euforia Pancasila di era kebebasan dapat dijadikan kebanggaan dengan karya-karya nyata yang hadir di berbagai sektor. Pada sektor pendidikan menjadi inspirasi untuk menghadirkan model atau metode pembelajaran yang inklusif bagi siapapun. Pada sektor politik mampu melahirkan undang-undang yang berbasis pada nilai-nilai keadilan. Pada sektor ekonomi mampu menciptakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada bidang sosial budaya, mampu menjaga tatanan masyarakat yang beraneka ragam dengan terus mengupayakan nilai-nilai integritas kebangsaan Indonesia.

## **Perempuan dan Gender di Era Keterbukaan Publik**

Konstruksi gender yang membedakan perlakuan pada laki-laki dan perempuan secara kaku menjadi penting dilihat dalam kerangka membuka benang kusut yang mengungkung sebagian besar adat atau tradisi Indonesia. *Stereotype* yang melekat pada kultur Jawa, sebagai contoh, menjadi pembatas gerak langkah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perempuan yang hanya bertumpu pada tradisi, untuk hanya berperan dan bisa *macak, masak lan manak* (berhias diri, memasak dan melahirkan anak) dan laki-laki yang hanya dituntut mencari nafkah adalah realitas yang perlu direfleksikan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Konstruksi budaya yang tidak berkeadilan gender harus diubah dengan kultur keadilan peran dan kedudukan bagi laki-laki dan perempuan. Konstruksi budaya Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki idealnya merujuk pada azas dan prinsip Pancasila. Kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan dan keadilan menjadi rujukan dalam membangun kehidupan yang responsif gender. Konstruksi gender menjadi jendela untuk

memperkuat dan menemukan nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Era kebebasan menjadi peluang bagi perempuan untuk mengeskpresikan diri dengan seluruh potensi yang dimiliki tanpa harus dikungkung oleh berbagai alasan yang menjerat perempuan karena alasan kedudukannya sebagai istri atau sebagai ibu bagi anak-anaknya. Demikian juga pada laki-laki, era kebebasan sejatinya menguatkan diri laki-laki untuk terus bersama perempuan menguatkan proses pembangunan yang sejalan dengan Pancasila.

Pancasila tidak hanya membahas atau mengkaji tentang keadilan, kemakmuran ataupun kesejahteraan, tetapi Pancasila juga menjelaskan tentang kesetaraan dan keadilan. Pada butir Pancasila sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki nilai-nilai luhur dan bermartabat untuk menjaga hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Memaknai kemanusiaan berarti tidak melakukan diskriminasi karena alasan jenis kelamin atau peran gendernya, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Gender yang pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller ini digunakan tidak hanya untuk memisahkan perbedaan secara fisik biologis antara laki-laki-dan perempuan, namun gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) yang tujuannya untuk mengetahui dan memahami aspek keadilan dalam pembagian kerja di masyarakat. Keadilan gender difokuskan pada perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hal ini penting karena hingga saat ini masih dijumpai pandangan masyarakat yang bermuatan ketidakadilan gender. Beberapa bentuk ketidakadilan gender adalah:

1. Marginalisasi, proses peminggiran/pemiskinan terhadap hak-hak masyarakat karena alasan jenis kelaminnya. Praktik marginalisasi ini dapat berupa penggantian peran pekerjaan yang sebelumnya dilakukan salah satu jenis kelamin tertentu, digantikan dengan mesin yang dioperasikan oleh jenis kelamin lainnya. Akibat praktik ini berdampak pemiskinan pada jenis

kelamin yang sebelumnya bisa berperan penting dalam aktivitas tersebut;

2. Sub-ordinasi, keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dari pada yang lainnya, misalnya pandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki;
3. Pandangan *Stereotype* (pelabelan), yakni citra baku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan empiris atau kenyataan yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Pada umumnya pelabelan ini dapat melahirkan stigma negatif, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.
4. *Violence* (kekerasan), berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena alasan jenis kelaminnya, misalnya kekerasan terhadap perempuan.
5. Beban kerja ganda, yaitu beban tugas dan tanggung jawab yang tidak seimbang dengan beban tugas dan tanggung jawab pasangannya. Beban kerja ganda ini sering dialami perempuan karena perempuan secara budaya masih dianggap bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. karena itu, ketika perempuan bekerja di ranah publik, dia juga harus bekerja di sektor domestik.

Ketidakadilan gender menjadi pekerjaan besar pemerintah sehingga perlu memaksimalkan kinerja PUG (pengarustamaan gender) yang terintegrasi dalam semua kebijakan di berbagai bidang. Salah satu upaya pemerintah dapat dilihat pada BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) adalah menyukseskan pemberdayaan perempuan.<sup>148</sup> Program pemerintah dalam merespon ketidakadilan gender perlu

---

<sup>148</sup>Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarustamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* 2, no. 1 (March 17, 2017): hal. 93-108."abstract": "Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB



dilakukan evaluasi dengan mengkonstruksi berbagai kebijakan di antaranya dengan memperkuat misi BP3AKB<sup>149</sup> yakni;

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
3. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan dan perlindungan untuk perempuan dan anak;
4. Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera;
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan;
6. Meningkatkan pengelolaan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan anak dan perlindungan keluarga berencana yang akuntabel.

Upaya pemerintah dalam kebijakan tersebut tidak dapat berhasil tanpa melibatkan perempuan dan laki-laki secara bersinergi. Perubahan budaya yang sudah mengakar dengan memosisikan perempuan hanya bertanggungjawab untuk mengurus anak dalam rumah tangga harus diubah. Era perubahan harus mampu dimaksimalkan untuk kepentingan penguatan peran penting perempuan yang setara dengan laki-laki di berbagai sektor pembangunan.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan akses dan hak yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pembentukan organisasi merupakan wujud kepedulian dan perlindungan negara terhadap bangsanya. Perempuan dan laki-laki harus mampu memanfaatkan era kebebasan sebagai tempat untuk berkiprah dan berperan untuk demokrasi Pancasila yang berkeadilan sosial. Pemerintah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkarier sesuai profesi atau keahlian yang dimiliki. Sebagai contoh, profesi jurnalis tidak lagi

---

149 Ibid."abstract": "Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB

didominasi oleh laki-laki, namun perempuan juga telah menunjukkan kemampuannya di dunia informasi. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan di media informasi masih menyisakan problem karena pekerja di media informasi masih dianggap sebagai pekerjaan maskulin. Hal yang sama juga masih dijumpai di berbagai sektor pembangunan. Perempuan masih belum sepenuhnya dilihat sebagai entitas yang setara dengan laki-laki. Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang penting dipikirkan bersama.

Keterbukaan akses informasi dan teknologi sejatinya menjadi peluang bagi seluruh laki-laki dan perempuan untuk terus berkiprah membangun bangsa dengan membumikan Pancasila secara lebih kongkrit dan riil. Prinsip Pancasila harus menjadi landasan dalam mengubah paradigma budaya yang tidak berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, peran penting perempuan dilihat sebagai bagian penting dalam pembangunan, yang sama pentingnya dengan partisipasi laki-laki dalam membangun Indonesia.

## **Penutup**

Pancasila bukanlah milik sekelompok manusia kelas elit yang memiliki kekuasaan, tetapi, Pancasila telah menjiwai seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Partisipasi masyarakat dalam mempopulerkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat diamati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang semakin populer terpampang diberbagai media sosial. Popularitas Pancasila telah meneguhkan semangat cinta tanah air yang diajarkan, baik dari pendidikan formal maupun non formal. Berbagai kegiatan dan tradisi masyarakat Indonesia yang memiliki nilai keragaman budaya, suku, bahasa, makanan dan agama serta aliran

kepercayaan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Keindonesiaan tidak hanya dapat dilihat di negara Indonesia tetapi pada setiap kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena itu, Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia popularitasnya telah merambah pada dunia internasional. Setiap jiwa bangsa Indonesia telah memproteksi diri dengan pondasi ideologi Pancasila, agar mampu memfilter budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Popularitas Pancasila menjadi tantangan bagi orang-orang jahat yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila, melalui keragaman suku, bahasa, ras dan agama menjadi sasaran mereka. Peristiwa konflik antar etnis seringkali terjadi di berbagai daerah, yang kemudian merambah pada konflik antar agama.

Euforia Pancasila menjelaskan adanya partisipasi dan kecintaan masyarakat terhadap ideologi negara yakni, Pancasila. Sumber dari segala sumber pemikiran yang harus bertumpu pada Pancasila. Popularitas Pancasila menjadi euforia karena, kebebasan kemerdekaan yang harus diisi dengan berbagai aktifitas untuk pembangunan bangsa. Pemantapan terhadap nilai-nilai Pancasila harus menjadi turunan dalam setiap perbuatan atau tindakan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Pendidikan menjadi pilihan utama dalam mengimplementasikan Pancasila melalui program pemerintah yakni, penataran P4 (Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila) dibawah koordinasi BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila). Implementasi Pancasila mengakar dari tingkat elit hingga akar rumput. Pedesaan dan kota menjadi bidikan pemerintah untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila menjadi pondasi untuk memproteksi diri dari berbagai ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Turunan Pancasila yang diterjemahkan dalam butir-butir Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia yang bersifat privat seperti pernikahan diatur dan dilindungi dalam hukum, baik hukum negara dan maupun hukum keagamaan. Pada sektor ekonomi bertumpu pada nilai-nilai kemakmuran dan kesejahteraan sosial dengan menghilangkan model ekonomi kapitalis menuju ekonomi demokrasi Pancasila. Turunan Pancasila di era kebebasan lebih mementingkan kepentingan masyarakat, penegakan hukum harus berbasis keadilan tanpa diskriminasi. Ideologi Pancasila menjadi pedoman dan pondasi kehidupan masyarakat terutama paham radikalisme dan liberalisme keagamaan harus dicegah bahkan dihindari.

Mahasiswa mampu menerjemahkan Pancasila sebagai produk populer dan turunan Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Era kebebasan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengekspresikan diri atau mengaktualisasikan diri dalam membangun bangsa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebagai generasi bangsa memiliki peluang atau kesempatan untuk mengukir sejarah negara Indonesia yakni, mewujudkan cita-cita luhur para pejuang kemerdekaan. Pancasila menjadi pilar bangsa Indonesia yang mampu menggerakkan mahasiswa dalam tindakannya yang mengedepankan nilai-nilai luhur menjiwai kepribadiannya yang teguh, jujur dalam akademik dan berprestasi. Butir-butir Pancasila menjelaskan adanya responsif gender yang senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, keberagaman dan persatuan bangsa. Pancasila memberikan akses kepada siapapun yang mampu

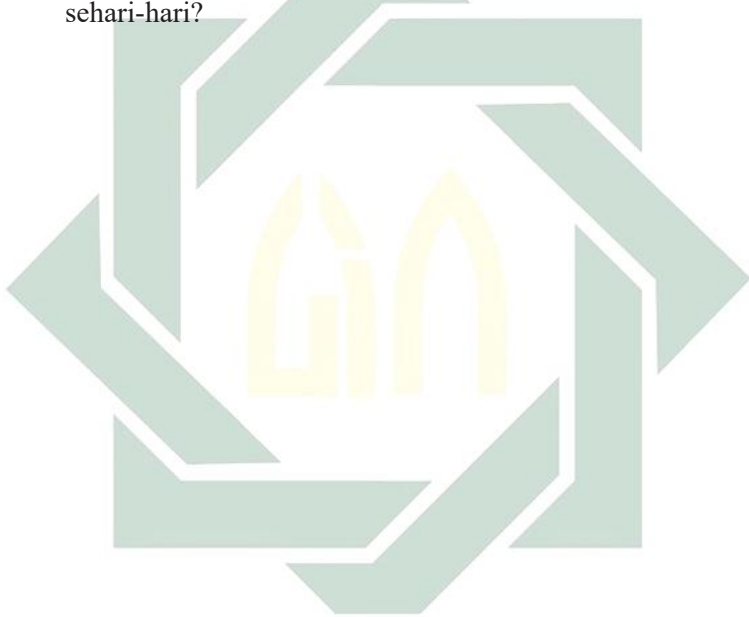
berkiprah secara kompetitif, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga penting terlibat secara aktif memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam membangun bangsa dan negara melalui peran-peran publik yang dijalani. Keadilan dan kesetaraan gender mewarnai cara berpikir mahasiswa dan dapat dijadikan bekal dalam menata kehidupan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan dan produk populer, tetapi Pancasila menjadi pijakan dalam melakukan berbagai aktifitasnya baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, dengan memegang prinsip penghormatan dan penghargaan pada semua pihak, tanpa membedakannya karena alasan jenis kelamin, ras, suku, keyakinan, status perkawinan, dan lainnya.

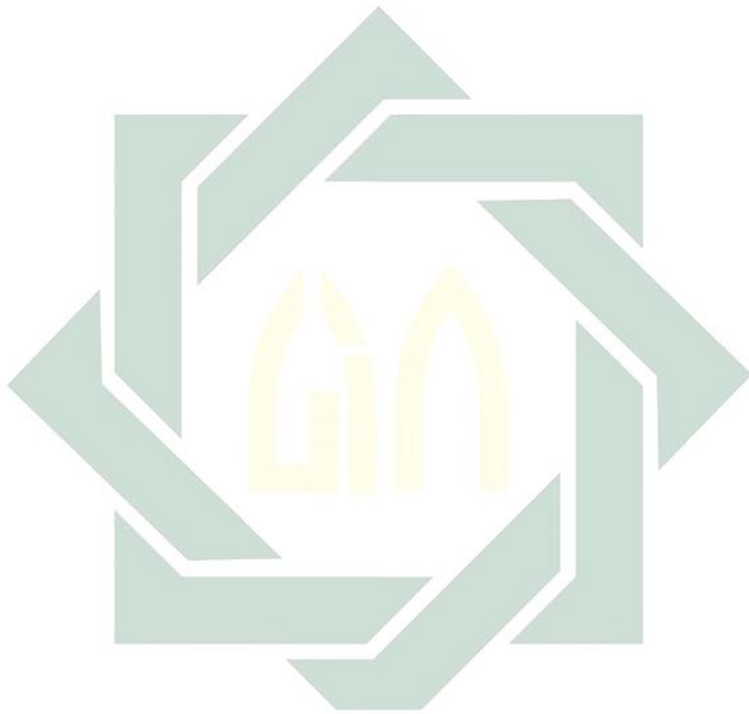
### **Latihan**

1. Mengapa Pancasila menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional?
2. Bagaimana bangsa Indonesia mampu membawa dan menjaga Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa sampai saat ini?
3. Bagaimana mempopulerkan Pancasila yang dikenalkan masyarakat melalui media sosial atau dunia maya?
4. Bagaimana turunan Pancasila dalam setiap silanya dapat dipahami oleh masyarakat?
5. Mengapa butir-butir Pancasila yang digagas dalam penataran P4 (pedoman penghayatan pengamalan Pancasila) tidak lagi dilaksanakan di sekolah maupun di Pendidikan Tinggi?
6. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
7. Bagaimana mahasiswa mewujudkan Pancasila yang responsif

gender?

8. Bagaimana perempuan dan laki-laki memanfaatkan peluang di era kebebasan?
9. Mengapa di era kebebasan masih menyisakan problem bagi perempuan khususnya dihadapkan pada problem keluarga, dan bagaimana mengubahnya?
10. Bagaimana mahasiswa mampu berkiprah di era kebebasan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?







## BAB 6

### Dinamika Pancasila di Era Globalisasi

- Kemampuan mahasiswa : Memahami dinamika nilai Pancasila di era globalisasi
- Indikator :
  - Mampu menerangkan Pancasila sebagai jawaban atas perubahan.
  - Mampu menerangkan Pancasila sebagai dasar *gender citizenship*.
  - Mampu memahami Pancasila sebagai ideologi melawan ideologi transnasional.
- Bahan kajian :
  - Pancasila sebagai jawaban perubahan.
  - Pancasila sebagai gerakan *gender citizenship*.
  - Pancasila sebagai ideologi penyeimbang transnasionalisme
- Metode belajar : *Menonton video, melihat gambar sejarah, gambar tokoh, gambar kongres perempuan,*  
  - *Diskusi, poin penilaian, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Contextual Instruction.*
- Waktu belajar : 150' kelas, 180' tugas terstruktur, 180' tugas mandiri.



Pengalaman belajar : - Mahasiswa mencari, mengumpulkan, dan membangun ulang informasi secara deskriptif. Dosen memberi ulasan hasil deskripsi ulang mahasiswa.

Penugasan Terstruktur:

*Self-Directed Learning*, membuat perencanaan kegiatan belajar mandiri, mensimulasikan pelaksanaannya, sekaligus memberi asesmen pada pola belajarnya sendiri. Dosen memberi apresiasi.

Kegiatan Mandiri:

*Contextual Instruction*, memahami ulang teori yang akan dipelajari mengaitkannya dengan konteks faktual. Dosen memancing tanya-jawab

Kriteria/bobot penilaian : Penilaian produk: kemasan laporan, muatan isi laporan, aksesibilitas informasi.

Indikator materi RG : Islam radikal, transnasional, perempuan sebagai agen infiltrasi asing (keagamaan dan lainnya).

Indikator strategi RG : - Indikator strategi: perilaku tokoh, keteladanan, pelajaran sekolah, melalui banyak media.  
- Perempuan harus diinklusi dalam proyek kebangsaan.  
- Perempuan mendapat hak dasar misalnya pada orientasi seksual, bertanggung jawab, dan ikut pada aktifitas kebangsaan

## **Pendahuluan**

Kecanggihan teknologi mengenal lebih cepat melalui dunia media sosial atau dunia maya merupakan bentuk perkembangan dunia modern. Masuknya budaya asing dan era kebebasan harus mampu memfilter masuknya aliran agama garis keras atau radikalisme dan transnasional yang menghegemoni budaya bangsa. Pancasila harus mampu menjawab tantangan dunia modern dan arus globalisasi. Setiap perubahan sosial dan tuntutan zaman, Pancasila dapat dijadikan filter untuk memperkuat pondasi diri dalam memperteguh nasionalisme dan cinta tanah air. Perkembangan zaman senantiasa berdampak pada perubahan sosial yang dapat mengakibatkan beragam peristiwa. Integrasi dan konflik di masyarakat akan selalu mewarnai perubahan sosial, karena itu pemahaman dan implementasi Pancasila harus terus didiseminasikan pada setiap generasi.

Islam radikal yang muncul di masyarakat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah telah mengidentifikasi ajaran agama yang memiliki pemahaman garis keras dan bertentangan dengan Pancasila maka, harus dibekukan dan dianggap musuh negara. Salah satunya gerakan hizbut tahrir, secara tegas harus dibubarkan, karena mengancam kedaulatan negara. Misi yang ditawarkan mengubah ideologi Pancasila menjadi khilafah, tawaran tersebut menjadi ancaman dan rintangan bagi bangsa Indonesia. Kekhawatiran pada organisasi Islam garis keras, adalah; terjadinya penyusupan terhadap organisasi masyarakat dengan gerakan sembunyi, bawah tanah. Gerakan tersebut dapat menimbulkan keretakan dan disintegrasi bangsa, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pihak asing. Pancasila menjadi filter untuk menghadapi radikalisme Islam yang membahayakan bagi kesatuan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, munculnya

transnasional harus diantisipasi, dengan tindakan cepat melalui pemahaman dan implementasi Pancasila secara utuh.

Memasuki era kebebasan, perempuan memiliki peluang besar untuk berkiprah, melakukan kreativitas tanpa batas dan berinovasi. Kebebasan merupakan ekspresi diri untuk berkarya dan berpartisipasi dalam dunia media sosial dengan berinteraksi melalui dunia maya. Dunia literasi menjadi pijakan untuk mengetahui informasi yang seluas-luasnya tentang perkembangan zaman. Perempuan harus menginklusi dengan dunia sekitar agar, cepat beradaptasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era kebebasan. Agama sebagai kepercayaan atau keyakinan masyarakat sekaligus bentuk implementasi Pancasila pada sila pertama. Seluruh bangsa Indonesia mengakui agamanya dengan beragam pilihan agama (Hindu, Budha, Kristen, Islam, Khonghucu) dan kepercayaan kebatinan. Agama menjadi filter untuk memproteksi diri dari pengaruh radikalisme agama, termasuk radikalisme Islam serta gerakan transnasional yang dapat membahayakan NKRI (negara kesatuan republik Indonesia). Perempuan muslim harus mampu menjaga negaranya dengan merajut Pancasila dari radikalisme dan transnasional yang membahayakan Indonesia.

Memahami dan menyikapi perkembangan zaman dan kebebasan dalam menghadapi persaingan dunia luar. Ideologi Pancasila menjadi landasan dan dasar negara sebagai pijakan utama dalam menghadapi perubahan. Pancasila mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir keindonesiaan. Gerakan kewarganegaraan gender sebagai penyeimbang untuk melawan gerakan atau ideologi yang mengancam dan membahayakan negara. Gerakan radikalisme dan gerakan transnasional harus dilawan dengan kekuatan Pancasila. Karena itu, *gender citizenship* harus menjadi gerakan yang dapat menepis berbagai

ancaman dari dunia luar. Bangsa Indonesia mampu melakukan usaha-usaha yang mampu menjawab tantangan dunia modern dan arus globalisasi akan terus mewarnai setiap zamannya.

Pembahasan tentang dinamika Pancasila di era globalisasi diharapkan mahasiswa akan belajar banyak tentang tantangan dan perubahan sosial yang akan dihadapi. Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi dan posisi Pancasila dalam menghadapi era global. Mahasiswa dapat mengkaji dan menelaah berbagai kasus radikalisme dan transnasional melalui media sosial dan video. Pola berpikir masyarakat yang harus dikritisi dalam mencari dan menemukan kehidupan yang adil dan sejahtera dari pelosok desa dan kota. Ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial sering memicu terjadinya konflik horizontal antar suku, yang dapat berujung pada konflik antar agama. Pola perubahan sosial yang instan yang tidak diikuti dengan kepedulian sebagai warga negara yang baik akan melahirkan sikap-sikap yang anarkis. Perspektif gender menjadi alat analisis mahasiswa agar, dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menelaah kasus-kasus sosial di masyarakat.

## **Pancasila dan Perubahan**

Awal mula lahirnya Pancasila telah memberikan perubahan pada problem-problem yang muncul setelah kemerdekaan. Kontribusi para pejuang untuk membela negara dengan pemikiran yang tajam dan kritis. Merumuskan ideologi negara, sekaligus menjadi sumber rujukan masyarakat. Pancasila menjelaskan beragam pengetahuan, di antaranya; tentang keyakinan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Lima sila tersebut menjelaskan tentang agama dan cara hidup manusia yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai paham yang berpendirian untuk membentuk masa depan bersama dibawah perlindungan negara yang tanpa

membedakan suku, ras, agama maupun golongan. Pancasila bukan sekedar ideologi negara tetapi, melainkan *vision of state* yang dimaksud, memberikan landasan filosofi bersama (*common philosophy ground*) sebuah masyarakat plural yang modern. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural, akan mengalami proses perubahan sosial, baik pada individu, struktur sosial maupun dinamika interaksi sosialnya,<sup>150</sup> karena itu Pancasila akan mampu menjawab setiap perubahan tersebut.

Lahirnya Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016, memiliki argumentasi yang didasarkan pada historisitas dan yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), merupakan badan khusus yang disepakati oleh pendiri negara untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Merancang Undang-Undang Dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>151</sup> *Kedua*, sidang BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, memiliki agenda tunggal yakni merumuskan dasar negara. *Ketiga*, Soekarno merupakan anggota resmi BPUPKI. *Keempat*, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan gagasannya sidang di depan BPUPKI tentang lima prinsip dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Istilah Pancasila ditemukan dalam pidatonya dan tidak ditemukan dalam naskah UUD 1945, sebelum perubahan ataupun sesudah perubahan. *Kelima*, pidato Soekarno secara aklamasi diterima oleh seluruh peserta

---

<sup>150</sup>Ujjianto Singgih Prayaitno, *Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur Dalam Dinamika Interaksi Sosial*, 2014. <https://jurnal.dpr.go.id>

<sup>151</sup>Nana Setialaksana, "Peranan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Menuju Proses Kemerdekaan." *Jurnal Artifak*, no. 2, vol. 4 (2017): hal. 110-113. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/904/798>

sidang BPUPKI.<sup>152</sup> Argumen tersebut menjadi pijakan bahwa, kelahiran Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni, menjadi jawaban atas kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan dalam menyambut kemerdekaan. Kelahiran Pancasila menjadi dasar negara sekaligus sebagai sumber pengetahuan untuk menjawab setiap persoalan yang muncul.

Pancasila memiliki fungsi yang sangat luas untuk menjawab setiap perubahan yang terjadi, di antaranya; *pertama*, fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni memiliki fungsi untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus didasarkan kepada Pancasila sebagai dasar kesatuan yang menyatukan bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai keragamannya. *Kedua*, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dapat dimaknai bahwa Pancasila menjadi petunjuk untuk kehidupan sehari-hari, seperti bermasyarakat atau beraktifitas sosial. *Ketiga*, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian Bangsa Indonesia, artinya perilaku dan sikap mental Bangsa Indonesia harus memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya. *Keempat*, Pancasila berfungsi sebagai jiwa Bangsa Indonesia, artinya Pancasila selalu hadir pada setiap jiwa Bangsa Indonesia yang selalu menerangi setiap problem bergulir. *Kelima*, sumber dari segala sumber, Pancasila menjadi sumber pengetahuan untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang cakrawala budaya Indonesia. *Keenam*, perjanjian leluhur Bangsa Indonesia, yakni mampu menjaga Pancasila sebagai

---

<sup>152</sup>Ahmad Basarah, *Eksistensi Pancasila Sebagai tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*, <https://ahmadbasarah.id/2019/01/riset-soal-Pancasila-jadi-disertasi-ahmad-basarah/>

pusaka yang memuat perjanjian untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai warisan ‘jenius nusantara’ yang merefleksikan sifat kelautan yakni, menyerap tanpa mengotori dan membersihkan lingkungannya serta mampu menampung segala keragamannya.<sup>153</sup> Pancasila menjadi sendi kehidupan untuk mempersatukan berbagai keragaman yang ada dan mampu menjadi solusi setiap permasalahan.

Pancasila menjawab segala perubahan yang mengakomodasi pemikiran yang bersifat konstruktif maupun progresif. Problem keagamaan, budaya, sosial, pendidikan maupun politik, bahkan segala yang berkaitan dengan kemanusiaan Pancasila menjawab semuanya. Problem keagamaan diatur dijelaskan butir pertama, bahwa bangsa Indonesia harus menyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila mengakomodir persoalan keagamaan yang dapat diinterpretasikan dengan tafsir tunggal, sampai disebut dengan desakralisasi Pancasila, yang berarti Pancasila menjawabnya dengan beragam perspektif termasuk urusan agama. Karena itu, Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, memiliki sifat dasar monodualistik atau kedwitunggalan, yakni; personalitas dan sosialitas, antara ke-apa-an dan ke-siapa-an, antara dinamika dan keterbatasan, antara materialitas dan spiritualitas serta antara kesinambungan dan pembaharuan.<sup>154</sup> Ideologi terbuka dapat dilakukan dengan interpretasi dengan cara tekstualisasi maupun kontekstualisasi yang dapat memberikan kunci-kunci jawaban setiap permasalahan yang dihadapi. Islam dan Pancasila memiliki keselarasan dalam memahami sila-sila

---

<sup>153</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 2.

<sup>154</sup>Ngainun Naim, “Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurkholis Madjid.” *Jurnal Episteme*, no. 10, vol. 2 (2015): hal. 436-440. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/90>

Pancasila, tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan tertuang dalam Al-Quran. Kelengkapan dan kesempurnaan dalam butir-butir Pancasila dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.

Perubahan tentang kultur bangsa Indonesia yang mengajarkan perempuan Indonesia dapat kesempatan berkiprah di sektor domestik maupun publik, tetap harus menjaga citranya sebagai perempuan Indonesia. Pancasila memberikan solusi untuk perempuan, agar dapat kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki, dengan merujuk pada keadilan tanpa diskriminasi. Keadilan gender sesuai dengan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi persamaan dan kesamaan hak sebagai warga negara. Cita-cita luhur yang dituangkan dalam Pancasila, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan zaman menuntut perubahan bagi kesetaraan gender yang memiliki hak yang sama untuk beraktifitas di publik. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara mengakomodir seluruh kepentingan untuk pembangunan sumber daya manusia. Wilayah domestik, rumah tangga menjadi ruang bersama yang mengedepankan cinta kasih, perlindungan dan terpenting kebahagiaan bersama keluarga. Ruang publik dengan berbagai bidang; politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, bahkan pertahanan keamanan membuka kesempatan bagi siapapun tanpa diskriminasi gender. Perkembangan zaman yang diiringi dengan perubahan memerlukan aktifitas dan kreatifitas sumber daya manusia, dengan merujuk pada Pancasila sebagai jawaban untuk setiap perubahan.

## **Melawan Radikalisme dan Transnasional**

Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan, baik pada aspek ideologi maupun gerakannya. Perkembangan



ideologi Islam menjadi peristiwa penting dimulai tahun 1980 sampai tahun 1998 pasca tumbangannya rezim Orde Baru Soeharto. Perkembangan Ideologi Islam masuk kampus-kampus umum melalui dakwah di masjid-masjid yang dilakukan secara serentak. Kampus-kampus tersebut adalah; kampus ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor), UI (Universitas Indonesia), UNAIR (Universitas Airlangga), UNIBRA (Universitas Brawijaya). Kelompok pengajian kampus disebut dengan gerakan Dakwah kampus, jamaah musholla, *usrah-usrah*, kelompok *tarbiyah* dan *halaqoh*. Kelompok ini berkembang menjadi gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi mungkar* seperti Muhammadiyah dan NU, yang sesungguhnya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang didirikan oleh Taqiyuddin Nabhani di Yordania.<sup>155</sup> Gerakan ini menjadi ancaman pemerintah, karena sesungguhnya mereka melakukan politik kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematif dan masif. Gerakan HTI berhasil berkembang pesat yang melahirkan gerakan Islam radikal, namun pemerintah membubarkan organisasi tersebut karena, membahayakan negara.

Radikalisme merupakan gerakan politik Islam yang memiliki konotasi negatif. Karena, dimaknai sebagai sebuah gerakan militan, tidak toleran, ekstrim dan anti Barat, terutama anti Amerika.<sup>156</sup> Radikalisme yang bermakna positif dimaknai sebagai perubahan menuju yang lebih baik atau pembaharuan atau *tajdid*. Sementara radikalisme bermakna negatif, yakni perubahan yang melampaui batas atau berlebihan dapat membahayakan siapapun. Karena itu, pemahaman radikalisme dapat dijelaskan melalui empat karakter, di antaranya;

---

<sup>155</sup>Zuly Qodir, "Gerakan Salafi Radikal Dalam konteks Indonesia." *Jurnal Islamica*, no. 1, vol. 3 (2008): hal. 5-6.

<sup>156</sup>Afadhal, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 37.

1. Sikap tidak toleran atau tidak menghargai orang lain;
2. Sikap fanatik, selalu merasa benar dan yang lain salah;
3. Sikap eksklusif, sikap yang membedakan dengan kebiasaan dari kebanyakan;
4. Sikap revolusioner, cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut dapat berdampak pada agama yang sering dijadikan politisasi dalam agama. Termasuk gerakan radikalisme yang berkembang di Indonesia dan berakar dari sejarah Indonesia.

Gerakan ini, mulai muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, dan akar gerakan Islam garis keras pada masa reformasi. Gerakan radikalisme pada masa kemerdekaan dapat ditelusuri gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan gerakan lainnya yang kemudian mampu diredam atau dihilangkan. Beberapa alasan munculnya gerakan radikalisme adalah; *pertama*, pada awalnya sebagai perlawanan terhadap gerakan komunis dan ketidakpuasan pada politik lokal. *Kedua*, radikalisme juga dapat disebabkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sangat dangkal. *Ketiga*, warisan sejarah umat Islam konflik dengan rezim, yakni adanya penindasan politik Islam pada fragmen sejarah Orde Baru. *Keempat*, fenomena ekonomi-politik, radikalisme muncul karena eksekutif kapitalisme, yakni respon kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarki dengan negara.<sup>157</sup> Radikalisme menurut Van Bruinessen lahir dari munculnya Islam radikal yang dapat dilacak dari munculnya Darul Islam seperti, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang membangun jaingan

---

<sup>157</sup>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): hal. 169-186.

transnasional di beberapa negara di Timur Tengah (gerakan wahabi di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Hizbut Tahrir di Yordania).

Secara historis, radikalisme muncul karena adanya kesenjangan bagi kelompok yang menguasai akses modal pada kekuasaan sejak pergerakan nasional. Kelompok Islam politik yang terakomodasi dalam struktur politik Indonesia mengambil langkah-langkah radikal dan berkarakter militeristik. Sementara pada aspek ekonomi-politik, akar dari Islam radikal adalah kesenjangan antar kelas borjuasi yang bermuka 'moderat' dan 'pro-pemerintah' melawan yang termaginalisasi.<sup>158</sup> Secara general, radikalisme bukan persoalan agama tetapi, kesenjangan-kesenjangan yang masuk pada ranah ekonomi, sosial dan politik. Berbagai kasus bom bunuh diri yang bergulir di tanah air, menjadi fenomena radikal yang dapat membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Kasus-kasus bom bunuh diri yang dilakukan para teroris merupakan orang-orang Islam yang memahami Islam secara radikal. Karena itu, radikalisme berdampak besar bagi agama. Agama sangat potensial untuk menyulut kekerasan radikal, karena itu radikalisme Islam juga berkembang di Indonesia, hal ini salah satunya tawaran tentang konsep 'syariat Islam' yang diusung oleh kelompok Islam garis keras.

Kelompok Islam garis keras yang diusung oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. ISIS sebagai gerakan radikal Islam tidak saja menjadi ancaman Bangsa Indonesia tetapi juga menjadi ancaman negara-negara di Asia tenggara. Gerakan radikalisme Islam di Malaysia<sup>159</sup> menjadi problem besar dan mengancam stabilitas

---

<sup>158</sup>Ibid.

<sup>159</sup>Siti Naqiyah Mansor, "Ideologi Gerakan ISIS di Malaysia." *Jurnal Islamiyyat*, no. 2, vol. 40 (2018): hal. 96-98.

nasional. Indonesia menjadi sasaran ISIS sebagaimana telah terjadi perekrutan terhadap pemuda Indonesia untuk berjuang atas nama jihad Islam. Tindakan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan organisasi masyarakat untuk segera disikapi dengan tindakan preventif. Pemuda Indonesia sebagai generasi bangsa dan masa depan harus ditanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk menangkal tindakan radikalisme. Beberapa kajian penting yang harus ditanamkan bagi pemuda Indonesia agar, terhindar dari gerakan radikalisme dan transnasional adalah;<sup>160</sup>

1. Menanamkan semangat nasionalisme serta setia kebangsaan melalui empat pilar bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Menanamkan jiwa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara semangat patriotisme melalui lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan instansi pemerintah dan swasta;
3. Menanamkan pendidikan karakter dan peran pemuda untuk pemberdayaan dan pendampingan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia;
4. Menumbuhkan kesadaran diri berani mengambil sikap yang tegas dan rasa memiliki.

Pemuda Indonesia sebagai generasi bangsa harus dipersiapkan untuk menjadi pemuda yang hebat dan mandiri. Pendidikan karakter di sekolah maupun di pendidikan tinggi harus ditanamkan sebagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini untukantisipasi terjadinya merebaknya paham radikalisme yang sudah merambah pada dunia kampus.

Radikalisme yang berkembang di kampus lebih mengarah kepada penanaman ideologi. Persentuhan ideologi radikalisme

---

<sup>160</sup>Suwito, "Membangun Integritas Bangsa di Kalangan Pemuda Untuk Menangkal Radikalisme." *Jurnal Civis*, no. 2, vol. 4 (2014): hal. 585-589.

pada mahasiswa tentu datang dari luar kampus dengan melalui proses yang cukup panjang. Sementara pola rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok radikal terhadap mahasiswa bersifat lembut dan tidak kasat mata.<sup>161</sup> Kampus harus mewaspadai pola rekrutmen yang dilakukan oleh Islam garis keras. Sistem indoktrinasi ideologi kepada mahasiswa dapat mengubah pola berpikir yang ekstrim dan radikal. Karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus melakukan kewaspadaan terhadap mahasiswanya dengan berbagai pendekatan untuk menetralsir radikalisme melalui kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan para dosen.<sup>162</sup>

Antisipasi tersebut menjadi tanggung jawab bersama, baik orangtua mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi. Ancaman radikalisme bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa adalah tindakan anarkhis karena doktrinasi. Lebih dari itu, ideologi garis keras telah menghancurkan kedamaian masyarakat. Pelaku bom bunuh diri disebut sebagai teroris yang meresahkan masyarakat, namun bagi pelaku bom bunuh dianggap sebagai jihad yang memiliki identik dengan perjuangan di medan perang. Perjuangan yang dimaksud diyakini sebagai upaya untuk menyerang musuh tertentu yang mengancam eksistensi keyakinan atau kebenaran yang diyakini. Sementara konsekuensi dari perjuangan tersebut ada dua hal, yakni *pertama*, kemenangan atau keberhasilan, berarti mampu mempertahankan diri. *Kedua*, mati syahid yakni mujahid yang mati karena, berjihad di jalan Allah.<sup>163</sup> Perjuangan

---

<sup>161</sup>Saifuddin, "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Studi Metamorfosa Baru)." *Jurnal Analisis*, no. 1, vol. 11 (2011): hal. 19-20.

<sup>162</sup>Agus Setiadi Tamtanus, "Pemikiran: Menetralsir Radikalisme di Pendidikan Tinggi." *Jurnal Untirta Civic Education*, no. 2, vol. 3 (2018): hal. 78-80.

<sup>163</sup>Imam Mustofa, "Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror." *Jurnal al-Manahij*, no. 1, vol. 5 (2011): hal. 113-117.

yang dilakukan dengan bom bunuh diri dapat membahayakan bagi orang lain, apalagi dilakukan di daerah *green zone* atau daerah aman atau damai. Sebagaimana kasus bom bunuh diri yang terjadi di sejumlah kota besar, seperti: bom bunuh diri di Bali, Kuningan Indonesia dan bom bunuh diri lainnya. Pelaku bom bunuh diri yang dapat menyebabkan kematian orang lain disebut dengan teroris. Para teroris merupakan orang-orang Islam yang memiliki pemahaman tentang Jihad atau pembela agama Allah.

Pelaku bom bunuh diri telah banyak korban berjatuh atau meninggal sia-sia. Beberapa pelaku bom bunuh diri pada kasus Bom Bali I telah diidentifikasi oleh BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai inisiator atau pemimpinya, di antaranya:<sup>164</sup>

1. Imam Samudra; eksekutor.
2. Ali Ghufron; ustadz sebagai perekrut yang memiliki 9 tim.
3. Amrozi; transportasi dan logistik.
4. Ali Imron; pembuat bom dan eksekutor di lapangan.

Mereka memiliki pemahaman agama bahwa, jihad adalah melawan orang-orang kafir yang dapat dilakukan dengan defensif maupun ofensif. Dasar hukumnya diyakini jelas dari Al-Quran dan Hadis. Menurut mereka, kemungkaran harus lenyap dimuka bumi dan tegaknya agama Allah atas keunggulan agama lainnya. Dalam kajian Islam, menurut Yusuf Qordhawi dan Hasan al Banna bahwa, bom bunuh diri yang dilakukan Imam Samudra dan kawan-kawannya merupakan tindakan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Argumentasinya bertentangan dengan ijtihad mayoritas ulama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai misi kemanusiaan.<sup>165</sup> Misi Islam adalah

---

<sup>164</sup>Sarlinto Wirawan, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Alvabet, 2012), hal. 7.

<sup>165</sup>Yoyo Hambali, "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat." *Jurnal Masalah*, no. 1, vol. 1 (2010): hal. 40-43.

agama yang mengajarkan cinta damai, toleran dan solidaritas umat. Bom bunuh diri tidak memberikan nilai kemaslahatan namun, sebaliknya menimbulkan kesedihan, permusuhan, dan kebencian sepanjang hidup, bahkan sampai keturunannya.

Pemanfaatan perempuan pada bergulirnya gerakan terorisme yang memanfaatkan perempuan naik kelas menjadi pelaku bom. Perempuan bukan lagi menjadi aktor pembantu, tetapi pelaku bom. Beberapa nama perempuan sebagai pelaku bom tersebut di antaranya; Dian Yulia ‘pelaku bom panci’ yang beraksi di penghujung tahun 2016 di Bekasi. Selain itu ditemukan juga, pelaku teroris perempuan Ika Puspitasari di Purworejo, Umi Delima dan masih banyak lagi pelaku bom bunuh diri oleh perempuan. Aksi tersebut menggambarkan bahwa, perempuan telah dimanfaatkan oleh laki-laki untuk kepentingan teror bom dengan dalih agama. Keterlibatan perempuan di Indonesia dalam gerakan teroris sudah menjadi subjek atau pelaku. Hal ini disebabkan, karena perempuan memiliki tingkat loyalitas dan kepatuhan yang tinggi, termasuk kesetiaan yang tidak bisa dipandang rendah.<sup>166</sup> Perempuan menjadi korban yang disebabkan oleh pemahaman terhadap ajaran agama yang radikal. Kasus-kasus tersebut harus segera dieliminir dengan mengedepankan pemahaman agama di akar rumput, termasuk menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan yang mungkin dapat dijadikan penyebabnya. Ideologi radikal harus segera difilter dengan konsep Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang wajib dipahami dan diimplementasikan seluruh warga negara Indonesia, termasuk perempuan.

Transnasionalisme menjadi salah satu gerakan yang mengkhawatirkan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Konsep

---

<sup>166</sup>Musdah Mulia, *Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*, <http://www.muhammadmuslimah.com/home/dok/2018-perempuan-dalam-gerakan-terorisme-di-indonesia.pdf>

transnasionalisme yang ditawarkan tidak memiliki batasan antar negara, karena manusia saling terhubung baik secara individu, kolektif maupun antar lembaga. Transnasional merupakan kajian ilmiah yang menggambarkan tentang tipologi gerakan baru yang menyebar di Indonesia dan didukung oleh kekuatan baru dari pihak luar negeri. Terminologi transnasional mencakup tiga bagian penting, di antaranya; *pertama*, pergerakan demografi. *Kedua*, lembaga keamanan trans-nasional dan *ketiga*, perpindahan gagasan atau ide.<sup>167</sup> Terminologi tersebut menjelaskan bahwa transnasional merupakan gerakan antarnegara, kelembagaan yang terkait dengan ide atau gagasan. Gerakan ini dapat mengarah pada problem agama atau gerakan Islam yang radikal atau problem ekonomi maupun budaya yang dapat memberikan dampak pada perkembangan pembangunan bangsa Indonesia.

Transnasional merupakan salah satu dampak dari globalisasi masyarakat dunia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Komunikasi antar manusia tidak lagi sekat atau batas karena, terhubung dengan internet. Dampak globalisasi dapat mengarah pada kejahatan yakni, transnasional, seperti: terorisme, perdagangan manusia, pencucian uang, imigran gelap dan kejahatan dunia maya.<sup>168</sup> Karena itu, untuk meminimalisir kejahatan transansional perlu dilakukan upaya yang lebih serius oleh pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik antar lembaga keamanan, misalnya kepolisian, imigrasi, bea cukai dan lain-lain. Globalisasi yang berdampak pada transnasional harus diiringi dengan filter-filter yang kuat

---

<sup>167</sup>Masdar Hilmy, "Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Islamica*, no. 1, vol. 6 (2011): hal. 3-9. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/117/343>

<sup>168</sup>Rahmanidar, *Kejahatan Transnasional di Perbatasan Kepulauan Riau*,



yakni, Pancasila sebagai penyeimbang gerakan transnasional. Kekuatan Pancasila menjadi tolok ukur untuk meruntuhkan setiap gerakan yang membahayakan keamanan negara, termasuk gerakan Islam radikal.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa salah satu gerakan Islam yang berdampak pada ancaman Bangsa Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan Islam radikal yang telah dibekukan oleh pemerintah karena, tidak sejalan dengan konsep ideologi Bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Perkembangan HTI yang semakin meningkat mulai akar rumput hingga tingkat elit perlu dilakukan pembekuan, sebagai bentuk penolakan pemerintah terhadap organisasi tersebut. Gerakan Islam radikal telah mengancam ideologi bangsa yang memiliki sendi-sendi toleransi dan keberagaman. Karena itu, transnasional sebagai gerakan penyeragaman tidak sejalan dengan identitas Islam Indonesia. Identitas Islam Indonesia dibangun melalui miniatur pesantren yang merupakan kontribusi dari Nahdhatul Ulama (NU) dan cara-cara rasionalisme diajarkan oleh Muhammadiyah. Islam Indonesia mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman atau pluralitas yang dapat dipelajari di sekolah Islam maupun pesantren.<sup>169</sup> Sekolah atau pesantren menjadikan identitas Islam selaras dengan ideologi bangsa Pancasila. Lembaga pendidikan Islam selalu dekat dengan gerakan sosial yang tentu saja berbenturan dengan kepentingan ideologis. Karena itu, pesantren menjadi filter untuk mengantisipasi gerakan transnasional.

---

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/171/168>

<sup>169</sup>Ana Aniati, "Defending Radicalism and Islamic Transnasional Movement; Renewal Approaches From Structural to Cultural Demention." *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1, vol. 11 (2018): hal. 31-36.

<http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/265/196>

Gerakan para pelaku bom bunuh diri sebagai gerakan Islam radikal memiliki jaringan di pelbagai negara. Mereka memiliki orang-orang yang solid, sangat disiplin dan aturan yang ketat. Wajah-wajah pelaku bom bunuh diri terus bergulir di Indonesia, gerakan terorisme yang mengancam dunia yang diawali dengan kasus bom terbesar di WTC (*World Trade Center*) Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan Bom Bali. Genderang perang melawan terorisme dunia yang ditantang oleh Bush presiden Amerika untuk menangkap atau membunuh Osama bin Laden dan meninggal di Pakistan, 2 Mei 2011. Gerakan Islam radikal yang identik dengan teroris terus mengakar dan muncul ISIS sebagai poros radikalisme Islam pasca al-Qaeda. Deklarasi gerakan tersebut adalah mendirikan negara Islam 'Ad-Dawlah Al-Islamiyyah'.<sup>170</sup> Deklarasi tersebut menjadi jihad global yang terus menyebar dan menjadi ancaman bangsa Indonesia. Jihad global menjadi sebuah gerakan transnasional yang memiliki visi yang sama, kejahatan yang terselubung untuk menghancurkan tatanan negara yang mapan. Gerakan radikalisme dan transnasional dapat dicegah dengan memberikan pendidikan karakter secara berkelanjutan kepada anak didik, tentang ideologi bangsa sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap gerakan, termasuk gerakan Islam atau gerakan agama harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kemanusiaan, keadilan dan penghargaan serta toleransi.

### **Gender Citizenship**

Gerakan gender menjadi bagian dari perkembangan dan tuntutan zaman yang sesungguhnya telah ada sejak

---

<sup>170</sup>Ali Asghar, "Gerakan Terorisme Tahun 201: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad." *Jurnal Keamanan Nasional*, no. 1, vol. 2 (2016): hal. 3-10.

zaman sebelum kemerdekaan. Menengok sejarah perjuangan kemerdekaan, banyak perempuan memiliki kontribusi terhadap negara, termasuk kontribusi pemikiran lahirnya Pancasila, khususnya saat proses persiapan kemerdekaan. Dua tokoh perempuan yakni, Raden Ayu Maria Ulfah Santoso dan Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo yang berjasa dalam persiapan kemerdekaan atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Raden Ayu Maria Ulfah ditunjuk sebagai menteri sosial yang dipilih secara aklamasi oleh pemerintah. Karena, kapasitasnya yang bagus dan memiliki kecakapan dalam jabatan tersebut. Selanjutnya kongres perempuan pertama kali diadakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Jogjakarta, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan. Perempuan memiliki titik temu dengan Pancasila, yakni setiap butir sila Pancasila tidak lepas membicarakan perempuan.<sup>171</sup> Penjelasan terkait keberpihakan perempuan yang tertuang dalam Pancasila adalah tentang kerukunan umat beragama, mengembangkan sikap hormat-menghormati, mengakui persamaan hak, keterwakilan perempuan dalam politik serta keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia menjadi pondasi perjuangan perempuan dalam setiap gerakannya. Salah satu gerakan perempuan di era Orde Baru, yakni tertuang dalam organisasi PKK yang sesungguhnya masih sangat jauh dari gerakan. Kira-kira tahun 1980 mulai muncul organisasi perempuan, sebagai gerakan untuk merebut hak-hak perempuan. Beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan gerakan perempuan yang melakukan beragam kegiatan, di antaranya; pengembangan ekonomi, advokasi

---

<sup>171</sup>Anggia Ermarini, *Perempuan dan Pancasila*, Republika, Kamis 8 Juni 2017. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/08/or8h70327-perempuan-dan-Pancasila>

kekerasan terhadap perempuan serta keterwakilan perempuan dalam parlemen. Gerakan LSM perempuan menggelar kongres perempuan Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan 22 Desember 1998 di Jogjakarta pasca mundurnya penguasa Orde Baru. Gerakan perempuan mendeklarasikan *affirmative action* atau tindakan khusus sementara untuk keterwakilan perempuan di parlemen dengan kuota 30%. Gerakan ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah serta diterbitkannya keputusan presiden tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Pada era reformasi setelah ditetapkannya otonomi daerah undang-undang nomor 22 tahun 1999 diadakan rapat kerja nasional luar biasa oleh tim penggerak PKK. Hasil kegiatan tersebut memutuskan bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini sesuai dengan perubahan nama Kementerian Peranan Urusan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pada masa Abdurrahman Wahid (1999-2001). Esensi dari perubahan nama tersebut adalah paradigma perjuangan perempuan sebagai mitra kerja pemerintah, yakni berperspektif gender dan memahami isu kepentingan perempuan.<sup>172</sup> Gerakan perempuan menjadi inspirasi masyarakat untuk terus berjuang dan menemukan eksistensi diri, agar jauh dari kebodohan dan keterbelakangan yang dapat mengarah pada diskriminasi. Gerakan gender harus selalu menginspirasi masyarakat tentang keadilan, kesetaraan dan jaringan akses untuk keberpihakan terhadap perempuan. Perempuan sebagai bagian dari *citizenship* atau warga negara Indonesia harus melakukan kegiatan yang dapat memberikan

---

<sup>172</sup>Dina Martiany, "Pemberdayaan Perempuan Desa." *Jurnal Aspirasi*, no. 2, vol. 6 (2015): hal. 203-207.

kontribusi bagi negara untuk tegaknya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Salah satu gerakan *gender citizenship* adalah gerakan perempuan muslim, yakni yang dilakukan organisasi masyarakat seperti; muslimat dan fatayat dari NU dan Aisyiah dari Muhammadiyah. Organisasi perempuan yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat dan negara dalam mengimplementasikan Pancasila sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Gerakan sosial yang dilakukan organisasi masyarakat merupakan sumbangsih NU dan Muhammadiyah sekaligus bagian dari dinamika politik bangsa. Para pemimpin organisasi perempuan seperti Khofifah Indar Parawansa telah mewarnai parlemen untuk menjadi bagian dari penentu kebijakan pemerintah. Para aktifis gerakan gender seperti; Musdah Mulia, Nasaruddin Umar juga mewarnai Kementerian Agama dalam pergulatan wacana Islam dan gender.<sup>173</sup> Gerakan gender difokuskan pada konsep gerakan sosial untuk mengajak laki-laki dan perempuan memiliki pandangan dan cara berpikir yang konstruktif berperspektif gender. Gerakan gender dapat dikonstruksi secara pelan tapi pasti, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, termasuk tuntutan masyarakat kepada pemerintah memiliki keseimbangan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Gerakan feminisme atau gerakan perempuan mempunyai tujuan untuk mencari keadilan dan kesetaraan serta hak yang sama dengan laki-laki. gerakan feminisme bermula dari R.A. Kartini memperjuangkan perempuan dalam pendidikan telah melahirkan beragam capaian. Emansipasi perempuan dapat

---

<sup>173</sup>Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik." *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 3, vol. 3 (2014): hal. 404-408. [https://www.researchgate.net/publication/273526954\\_Gerakan\\_Perempuan\\_Nahdatul\\_Ulama\\_dalam\\_Transformasi\\_Pendidikan\\_Politik](https://www.researchgate.net/publication/273526954_Gerakan_Perempuan_Nahdatul_Ulama_dalam_Transformasi_Pendidikan_Politik)

bebas berkarya, sehingga mampu menjunjung harkat dan martabat perempuan. Capaian yang terbesar adalah konsep kesetaraan gender yang telah dilegalformalkan di Indonesia yakni, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi ‘hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat’. Selanjutnya, undang-Undang Hak Azasi Manusia Nomor 39, Bab 3 Pasal 15 yang berbunyi ‘setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, negara dan bangsa’. Perjuangan perempuan untuk capaian tersebut sesungguhnya ingin mewujudkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar konsep yang tidak disentuh, tetapi Pancasila mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya gerakan *gender citizenship*.

Perspektif gender menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Gender harus diusung dalam kedudukan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan berbagai bidang. Pada tahun 1990 pembangunan perempuan harus berdasarkan pada ketentuan UNDP (United Nation Development Programme) dan diukur dengan HDI (Human Development Index) yakni, konsep kesetaraan gender (Gender Equality). Kesetaraan gender harus diikutkan pada evaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang digunakan adalah GDI (Gender Development Indeks) yang meliputi, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan dan GEM (Gender Empowerment Measure) yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik.<sup>174</sup> Konsep

---

<sup>174</sup>Suriadi, “Partisipasi Perempuan Perspektif dalam Politik Islam dan

kesetaraan dalam politik sebagaimana keberhasilan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Pasal 65 Tahun 2003 yakni, munculnya afirmasi action kuota perempuan 30%. Keberhasilan pembangunan salah satunya mengakomodir gagasan-gagasan cerdas yang datang dari siapapun termasuk gagasan perempuan.

Keterlibatan perempuan diberbagai sektor telah mendorong perempuan Indonesia untuk terus bersemangat dalam pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan terus melakukan inovasi untuk pembangunan manusia dengan berbasis gender. Pembangunan kapabilitas manusia Indonesia harus merujuk pada nilai-nilai manfaat yang adil dan setara, baik laki-laki dan perempuan. Pembangunan itu harus merujuk pada Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG)<sup>175</sup> yang tidak hanya di perkotaan, tetapi harus menyentuh pedesaan. Kemampuan perempuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi modal untuk pembangunan dan pemberdayaan gender. Inovasi pemerintah untuk pembangunan manusia berbasis gender sebagai bentuk pemanfaatan perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan perempuan dalam berkarya di berbagai sektor membuktikan dirinya sebagai warga negara yang berkontribusi untuk negaranya.

Berkiprahnya perempuan di ruang publik, terutama bidang politik bukanlah sekedar wacana, tetapi implementasi keterwakilan perempuan berdasarkan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki. Kemampuan perempuan untuk berkiprah di masyarakat bukanlah sesuatu yang baru, namun telah mampu

---

gender." *Jurnal al-Ulum*, no. 1, vol. 18 (2018): hal. 247-250.

<sup>175</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (Jakarta: Andhika Pratama, 2012), hal. 59-68.

mewarnai dalam beragam sektor. Salahsatu yang menarik perhatian masyarakat adalah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di berbagai kota yang tersebar di Indonesia, perempuan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dengan calon-calon lain dari berbagai partai politik. Isu keterwakilan perempuan dalam politik ramai diperbincangkan, pasca reformasi tren kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik meningkat. Studi kasus di Sulawesi Utara semakin nyata,<sup>176</sup> keterlibatan perempuan di pelbagai sektor secara angka cukup signifikan dibanding propinsi lainnya. Hal ini didukung oleh faktor sosial dan agama serta keberpihakan undang-undang terhadap partisipasi perempuan di politik dan pemerintahan. Kepemimpinan ini mengangkat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sekaligus menjawab keberpihakan terhadap perempuan dapat dibuktikan melalui kualitas yang dimiliki. Kemampuan perempuan dalam berpolitik memiliki nilai kemanfaatan bagi perkembangan politik di Indonesia. Perempuan membuktikan diri sebagai warga negara yang dapat berkontribusi kepada negara melalui jabatan publiknya bahwa, pemanfaatan terhadap perempuan harus bertumpu pada kualitas dan kapabilitas kinerja.

Keterlibatan perempuan berada di ruang publik, dapat menunjang program-program pemerintah. Salah satunya menyusun peraturan perundang-undangan yang melibatkan perempuan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hadirnya calon legislatif dalam kontestasi politik yang menghadirkan perempuan dalam representasi politik di Indonesia,<sup>177</sup> memiliki tantangan yang harus dihadapi. Namun,

---

<sup>176</sup>Leviane Jacklin, "Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara." *Jurnal Sosiohumaniora*, no. 2, vol. 20 (2018): hal. 139-142. <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/14889>

<sup>177</sup>Dirga Ardiansa, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam



dengan usaha-usaha kuat perempuan mampu mengambil kesempatan untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kerja keras untuk mendapatkan peluang tersebut harus berkompetisi dengan sesama perempuan. Situasi ini justru mempersempit ruang perempuan, yang sesungguhnya bersaing dengan laki-laki (bias gender). Ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang pemilu, merupakan kerja nyata dan bentuk partisipasi perempuan dalam dunia politik. Demokratisasi di Indonesia memberikan ruang yang luas kepada siapa saja, dan menjadi landasan bagi setiap individu dalam mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik.

Demokratisasi menjunjung tinggi kebebasan yang pada akhirnya semakin memperjelas jurang pemisah antar identitas (agama, suku, bahasa, jenis kelamin dan lain sebagainya). Persoalan agama dan nasionalisme bangsa merupakan dua identitas yang menjadi perdebatan di Indonesia. Polemik politik identitas mulai meruncing dengan klaim kebenaran, bahwa kelompok kepentingan yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. Problem kepentingan kelompok dapat memecah-belah bangsa yang pada awalnya perbedaan sangat dijunjung tinggi. Politik identitas yang berkembang saat ini adalah kelompok Nasionalis dan Muslim merupakan dua kekuatan besar yang harus dikelola dengan baik. Kemajemukan merupakan identitas Indonesia yang harus dijaga, namun hadirnya politik identitas dapat mengancam stabilitas bangsa. Politik identitas keagamaan menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia.<sup>178</sup> *Political will*

---

Representasi Politik di Indonesia." *Jurnal Politik*, no. 2, vol. 2 (2016): hal. 73-76. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/82>

<sup>178</sup>Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama." *Journal Politic and Policy*, no. 1, vol. 1 (2018): hal. 21-28.

menjadi solusi pemerintah untuk mengelola politik identitas Nasionalis dan Muslim, bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama yakni, tegaknya kedaulatan bangsa dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Perspektif gender menjadi kebutuhan dalam melihat dua kekuatan besar yang menjadi aset negara sekaligus kekuatan bangsa. Berbakti kepada negara merupakan bentuk *citizenship* yang dapat dibanggakan dan identitas bangsa.

*Citizenship* menjadi identitas Indonesia yang dapat berperan pada berbagai bidang, pada sektor ekonomi, perempuan berpeluang mengatur dan menciptakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Pada sektor publik maupun domestik *stereotype* perempuan piawai dalam menciptakan dan memberdayakan masyarakat untuk usaha ekonomi makro maupun mikro. Program pemerintah terkait program pemberdayaan masyarakat<sup>179</sup> lebih didominasi oleh perempuan, karena kecakapannya dalam mengatur dan mengelola keuangan dan anggaran keluarga. Pemberdayaan masyarakat diharapkan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi serta meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat. Peran perempuan pada sektor ekonomi memiliki nilai strategis untuk peningkatan usaha pendapatan belanja rumah tangga, agar tidak bergantung pada nafkah suami. Berbagai program pemberdayaan yang ditawarkan pemerintah, menjadi daya tarik perempuan untuk mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat. Kondisi atau keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi dalam bekerja. Partisipasi perempuan menjadi bagian dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga

---

<sup>179</sup>Dwi Pratiwi Kurniawati, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi." *Jurnal Administrasi Publik*, no. 4, vol. 1 (2013): hal. 9-12. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/129>

untuk menuju masyarakat yang berkualitas, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.

Kompetisi di dunia global mendorong setiap warga negara untuk siap bersaing dalam menghadapi era milenial. Karena itu, perempuan telah mengambil peran dalam mensejahterakan masyarakat. Aksebilitas perempuan, dalam menapaki dunia global menjadi pilihan yang memiliki nilai-nilai manfaat dalam setiap gerak langkah yang dapat berdampak pada tatanan negara. Perempuan dan laki-laki perspektif gender mampu menghasilkan karya-karya nyata yang dapat memberikan kontribusi bagi negara dengan tetap bertumpu pada Pancasila. Perempuan mampu menginklusi diri dalam wilayah domestik maupun publik dan senantiasa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tanggung jawab perempuan yang kompleks, tetapi tetap fokus pada hak dasar perempuan menjadi seorang ibu dan istri. Peran ganda perempuan semakin kuat pertahanannya dalam membangun bangsa yang harus diikuti sensitif gender dan meneguhkan *citizenship*.

## **Penutup**

Pancasila sebagai apapun, akan mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Tidak ada alasan untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa, meskipun perubahan akan selalu ada pada setiap zamannya. Pancasila menjadi jawaban atas setiap perubahan yang terjadi, karena Pancasila memiliki cara pandang dalam memahami setiap situasi dan kondisi yang bergulir. Eksistensi Pancasila menjadi jalan untuk membuka kebuntuan setiap problem yang muncul, mampu mengurai persoalan yang kompleks dan beragam dan mengajarkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi simbol dan kebanggaan Bangsa Indonesia yang tak akan layu dimakan waktu. Era Orde Lama,

Orde Baru, masa reformasi dan era global, Pancasila tetap menjadi ideologi Bangsa dan memiliki dinamika perkembangan zaman.

Agama sering menjadi sasaran masyarakat untuk dikambinghitamkan atas terjadinya persoalan kekerasan dan praktik kejahatan. Bangsa Indonesia harus mampu menyikapi persoalan kekerasan atau radikalisme yang telah bergulir. Radikalisme tidak sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia, karena itu harus segera diatasi dengan cara-cara yang bijaksana. Radikalisme telah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan, namun paham radikal saat ini lebih membahayakan bagi Bangsa Indonesia. Beberapa kasus bom bunuh diri yang disebut sebagai jihad telah membahayakan bagi orang lain. Islam menjadi sasaran mudah bagi teroris, atas nama agama memperdaya perempuan untuk ikut andil dalam peristiwa bom bunuh diri. Perempuan dijadikan alat perjuangan untuk jihad sekaligus mengorbankan anak-anaknya. Tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut telah melemahkan perempuan untuk dijadikan umpan para teroris. Radikalisme memberikan dampak besar bagi kehidupan Bangsa Indonesia, karena itu pengetahuan yang baik dan benar harus diajarkan sejak dini. Globalisasi yang bergulir harus mampu mengukuhkan dan meneguhkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Gerakan cinta damai, menjaga dan merawat kemajemukan menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi kejahatan radikalisme dan transnasional.

Gerakan radikalisme dan transnasional merupakan kejahatan besar yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Kejahatan lintas negara yang diatur dalam gerakan transnasional dapat menjatuhkan ideologi bangsa. Karena itu, kesenjangan sosial yang berada dalam pusaran ekonomi, politik, hukum dan sosial keagamaan sering dijadikan alasan. Pancasila harus dapat dijadikan senjata ampuh untuk menangkis segala

bentuk kekerasan dan kejahatan yang menjatuhkan Bangsa Indonesia. Gerakan transnasional yang telah menjadi isu nasional harus disikapi dengan tuntas, pemerintah harus mengatur melalui Undang-Undang Terorisme secara maksimal. Dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah bersatu untuk menyikapi gerakan radikalisme dan transnasional yang sembunyi di balik gerakan ISIS (Islamic State Of Iraq And Suriah). ISIS menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia yang melakukan perekrutan terhadap anak-anak muda untuk dikader menjadi pejuang jihad. Pemerintah melarang dengan keras karena, dapat membahayakan masa depan bangsa. Tekad bersama dari seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam merespon gerakan yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemuda Indonesia harus dibekali dengan pengetahuan kewarganegaraan atau *citizenship* untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air. Pemuda Indonesia harus peka terhadap serangan dari luar yang dapat menjatuhkan masa depan dirinya dan bangsanya. Pembentukan karakter melalui cinta kebangsaan dan keindonesiaan menjadi solusi untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Setiap pendidikan harus disosialisasikan dan diharuskan memahami Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Kewarganegaraan. Implementasi Pancasila dan kewarganegaraan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gender menjadi bagian penting untuk menegaskan nilai-nilai kedamaian, karena mengedepankan keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Gender menjadi substansi pengetahuan bagi pemuda Indonesia untuk menjadi warga negara yang bermartabat, karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tentang persamaan hak dan kewajiban terhadap negara.

Pancasila menjadi filter dan kewarganegaraan menjadi ruh seluruh generasi Bangsa Indonesia. Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjadi pondasi yang kuat untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang datang dengan tiba-tiba. Pendidikan gender harus mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat diberikan pada usia dini, sehingga peka terhadap lingkungan. Sensitif gender dalam segala sektor akan membentuk karakter bangsa yang mampu bersaing dalam dunia internasional dan membawa martabat bangsa yang mengedepankan keluhuran dan kesamaan derajat.

Dinamika Pancasila di era global diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan melalui kasus-kasus yang berkembang dengan perspektif gender. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih waspada terhadap organisasi-organisasi di intra atau ekstra kampus yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Khususnya gerakan Islam radikal yang menyusup di organisasi Islam. Mahasiswa dapat mengembangkan pembelajaran Pancasila dengan perspektif gender melalui pembelajaran bersama dengan masyarakat.

## **Latihan**

1. Bagaimana Pancasila mampu membawa perubahan di setiap zamannya?
2. Bagaimana implementasi Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat di era digital?
3. Bagaimana peran mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat yang berperspektif gender di era perubahan?
4. Bagaimana bangsa Indonesia memproteksi diri dari radikalisme yang dapat membayakan NKRI (negara kesatuan republik Indonesia)?

5. Mengapa gerakan radikalisme muncul di Indonesia yang ditengarai sebagai gerakan ISIS?
6. Bagaimana menyikapi gerakan radikalisme dan transnasional yang bergulir dan telah menjadi isu nasional di Indonesia?
7. Bagaimana mengantisipasi dan menutup akses gerakan transnasional di Indonesia?
8. Bagaimana peran perempuan dalam ranah agama dalam memahami Islam secara eksklusif?
9. Bagaimana gender dan *citizenship* melihat fenomena sosial yakni, munculnya kasus-kasus bom bunuh diri?
10. Bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dan transnasional?



# Daftar Pustaka

- Aco, Andi, Agus. 2016. "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Republik Indonesia." Dalam Jurnal Sosialisasi, Vol. 3. No. 3. <http://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/3115>
- Adam, Asvi Warman. 2019. *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Afadhal. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Affiah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agil, Said Siradj. 1999. *Islam Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Al Anshori, M. Junaedi. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan.
- Alganih, Ignius. 2016. "Konflik Poso; Kajian Historis tahun 1998-2001." Dalam Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 10.
- Ali, As'ad Said. 2010. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3S.
- Alius Suhardi. 2016. "Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi." Dalam Jurnal Kemanaan Nasional. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/41/34>
- Anggraeni, Dewi. *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas HAM*, [http://gelora45.com/news/TragediMei98\\_KomnasPerempuan.pdf](http://gelora45.com/news/TragediMei98_KomnasPerempuan.pdf)



- Aniati, Ana. *Defending Radicalism and Islamic Transnasional Movement; Renewal Approaches From Structural to Cultural Demention*, <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/265/196>
- Ardiansa, Dirga. 2016. "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia." Dalam *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 2. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/82>
- Arifin, Ahmad, Ed. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949, Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Arotonang, D. 1999. *Runtuhnya Rezim Soeharto: Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Arrayan, Firdaus. 2017. "Pancasila Enterprise Theory and Pancasila Botton Line: Suatu Kajian Mengakuasasi Akutansi Ke-Indonesiaan dari Jeratan Kapitalis." Vol. 8. <https://jurnal.polban.ac.id/index.php/proceeding/article/view/735>
- Asghar, Ali. 2016. "Gerakan Terorisme Tahun 2011: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad." Dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2, No. 1.
- Ayatrohaedi, Tawalinuddin Haris, Sri Sutjiatiningsih. 1994. *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Azwar, Rully Chairul. 2009. *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era*. Jakarta: Grasindo.
- Bagin. 1983. *Topan Menjelang Fajar*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Basarah, Ahmad. 2019. *Eksistensi Pancasila Sebagai tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Makamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*, <https://ahmadbasarah.id/2019/01/riset-soal-Pancasila-jadi-disertasi-ahmad-basarah/>
- Bashri, Yanto dan Retno Suffatni. 2011. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiyono. 2012. "Menjaga Etika dalam Berpolitik." Dalam *Jurnal*

- Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 1. No. 1. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/3736>
- Burhanuddin, Jajat dan Oman Fathurrahman, Ed. 2004. *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chamsyah, Bachtiar dan kawan-kawan. 2008. *100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Republika.
- De Stuers, Cora Vreede. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*, Terj., Elvira Rosa dan kawan-kawan. Depok: Komunitas Bambu.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elson, R.E. 2009. *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Terj. Zia Anshor. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Emna, Laisa. 2014. "Islam dan Radikalisme." Dalam *Jurnal Islamuna*, Vol. 1, No. 1.
- Ermardini, Anggia. 2017. *Perempuan dan Pancasila*, dalam *Republika*, Kamis 8 Juni. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/08/or8h70327-perempuan-dan-Pancasila>
- Erwinsyahbana, Tengku. 2012. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Esty, Ekawati. 2017. "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru." Dalam *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam*. Vol. 16, No. 1.
- Fadlyana, Eddy. 2009. "Pernikahan Dini dan Permasalahannya." Dalam *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2.
- Fatma, Shabana. 2007. *Woman and Islam*. New Delhi: Sumit Enterprises.
- Fauzia, Amalia dan kawan-kawan. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakannya*. Jakarta: Gramedia.
- Fauziah, Ida. 2015. *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Hambali, Yoyo. 2010. "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat." Dalam *Jurnal Maslahah*, Vol. 1, No. 1.

- Hastuti, Kurnia Dewi. 2015. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Hidayati, Rahma. 2018. "Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh." Dalam *Jurnal Community*, Vol. 4, No. 2.
- Hilmy, Masdar. 2011. "Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia." Dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 1. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/117/343>
- Hisyam, Muhammad, Ed. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Ikhwan, Afiful. 2017. "Kajian Sosio Historis Islam Indonesia Era Reformasi." Dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. 5, No. 01.
- Isaacson, Jason F. dan Colin Rubenstein, Ed. 2002. *Islam in Asia, Changing Political Realities*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Jacklin, Leviane. 2018. "Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara." <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/14889>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2012. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Andhika Pratama.
- Khatijatussalihah. *Membaca Elektabilitas Perempuan Dalam Politik*, <https://www.acehtrend.com/2019/02/11/membaca-elektabilitas-perempuan-dalam-politik/>
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)
- Kristi, E. Poerwandari, Rahayu S. Hidayat. 2000. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah; 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*. Jakarta: PPS UI.
- Kusairi, Latif. *Ontran-Ontran Demokrasi: Kekerasan dengan Isu Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 1998-1999*. [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=87243&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=87243&obyek_id=4)
- Kusumaningtyas, AD., dan kawan-kawan. 2015. *Seksualitas dan*

- Agama, Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kusumi, Wewen Rahayu. 2017. "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)." Dalam JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol. 2, No. 1.
- Lapau, Buchari dan Alib Birwin. 2017. *Prinsip dan Metode Epidemiologi*. Depok: Kencana.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liu, Hong. 2011. *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965*. Singapore: NUS Press.
- Macdhani, Laode Afala. 2018. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Maimon, Herawati. 2016. "Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media." Dalam Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 4, No. 1.
- Margianto, Heru. *Strategi Baru Untuk Pancasila*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/07/14304971/strategi.baru.untuk.Pancasila>
- Martiany, Dina. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Desa*, Review Buku Ani W. Soetjipto, Suara dari Desa Menuju Revitalisasi PKK. Jakarta: Margin Kiri, 2013. Dalam Jurnal Aspirasi.
- Meij, Lim Sing. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa, Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moehkardi. 1918. *Bunga Rampai Sejarah Indonesia, dari Borobudur hingga Revolusi Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mufisah, Ch. *Peta dan Isu Gerakan Perempuan Islam Indonesia*, [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=69/hl=id/Peta\\_Dan\\_Isu\\_Gerakan\\_Perempuan\\_Islam\\_Di\\_Indonesia](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=69/hl=id/Peta_Dan_Isu_Gerakan_Perempuan_Islam_Di_Indonesia)
- Muhammad, Ashsubli. 2016. "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." Dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Mulia, Musdah. 2018. *Perempuan dalam Gerakan Teorisme di Indonesia*, <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/dok/2018-perempuan-dalam-gerakan-terorisme-di->

- indonesia.pdf
- Mustofa, Imam, 2011. "Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror." Dalam Jurnal al-Manahij, Vol. 5, No. 1.
- Naim, Ngainun. 2015. "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurkholis Madjid." Dalam Jurnal Esteme, No. 10, Vol. 2. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/90>
- Naqiyah, Siti Mansor. 2018. "Ideologi Gerakan ISIS di Malaysia." Dalam Jurnal Islamiyyat, Vol. 40, No. 2.
- Nawawi, Anwar Muhammad. 2018. "Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Jemaat Ahmadiyah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)." Dalam Fikri: Jurnal Kajian Agama, Vol. 3, No. 1.
- Newberry, Jan. 2013. *Back Door Java, Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*, Ter., Bernadetta Esti Sumarah-Masri Maris. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Oostindie, Gert. 2016. *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950, Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*, Terj., Susi Moeiman dan kawan-kawan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Poeze, Harry A. 2009. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pratiwi, Dwi Kurniawati. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi*, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/129>
- Pratiwi, Wulan Mulya. 2016. *Kuliah Jurusan Apa? Jurusan Kebidanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, Ani. *Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan Dewan*, <https://www.neliti.com/id/publications/19380/peran-anggota-dprd-perempuan-dalam-pembentukan-kbeijakan-di-dewan-dprwakil-rak>
- Putri, Aisah Budiatri dan kawan-kawan. 2019. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Qodir, Zuly. 2008. "Gerakan Salafi Radikal Dalam konteks Indonesia." Dalam Jurnal Islamica, Vol. 3, No. 1.

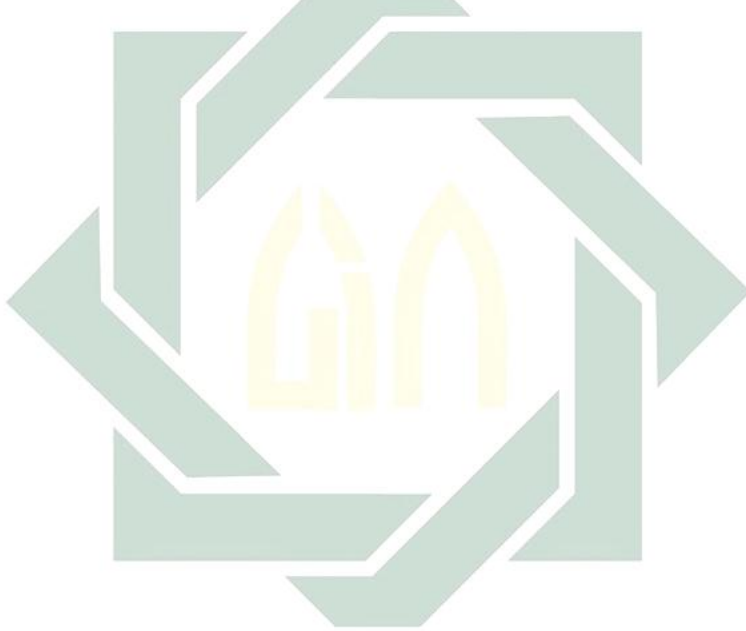
- Rachman Arif. 2012. "Wacana Pancasila dalam Era Reformasi." Dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1. No. 2.
- Rahmanidar. *Kejahatan Transnasional di Perbatasan Kepulauan Riau*, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/171/168>
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono dan rekan. Jakarta. Serambi Ilmu Semesta.
- Roviana, Sri. *Gerakan Perempuan Nahdatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*, [https://www.researchgate.net/publication/273526954\\_Gerakan\\_Perempuan\\_Nahdatul\\_Ulama\\_dalam\\_Transformasi\\_Pendidikan\\_Politik](https://www.researchgate.net/publication/273526954_Gerakan_Perempuan_Nahdatul_Ulama_dalam_Transformasi_Pendidikan_Politik)
- Ruslina, Elli. 2012. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." Dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1.
- Saifuddin. 2011. "Radikalisme Islam di kalangan Mahasiswa ,Studi Metamorfosa Baru." Dalam *Jurnal Analisis*, Vol. 11, No. 1.
- Sakai, Yumiko dalam Budi Winarno. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Medpress.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sarinah dan kawan-kawan. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiadi, Agus Tamtanus. 2018. "Pemikiran: Menetralsir Radikalisme di Pendidikan Tinggi." Dalam *Jurnal Untirta Civic Education*, Vol. 3, No. 2.
- Setialaksana, Nana. 2017. "Peranan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI Menuju Proses Kemerdekaan." Dalam *Jurnal Artifak*, Vol. 4, No. 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/904/798>
- Setijo, Pandji. 2010. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Shadily, Hassan, ed. 1984. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Shihab, Muhammad Al- Habieb Rizieq Husein. 2012. *Pengaruh Pancasila pada Penerapan Syariah Islam di Indonesia*. Thesis. Kuala Lumpur: Universitas of Malaya. <http://studentsrepo.um.edu.my/5038/>
- Sihotang, Kasdin. 2019. *Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi*

- Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: Atmajaya.
- Singgih, Ujianto Prayaitno. 2014. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur Dalam Dinamika Interaksi Sosial." <https://jurnal.dpr.go.id>
- Soekmono, R. 1990. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sri, Yeni Lestari. 2018. "Politik identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama." Dalam *Journal Politic and Policy*, Vol. 1, No. 1.
- Stellarosa, Yolanda and Martha Warta Silaban. 2019. "Perempuan, Media, dan Profesi Jurnalis." Dalam *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 7. No. 1.
- Suci, Atri Maharani. 2018. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Naskah Drama Monolog Marsinah Menggugat Karya Ratna Sarumpaet." Dalam *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 5, No. 2.
- Sudarmiyatun, Sri. 2012. *Makna Sumpah Pemuda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sukma, Bambang Wijaya. 2019. "Menonton Indonesia Di Remang Kabut Euforia Reformasi." Dalam *Jurnal Desain* Vol. 1. No. 02.
- Sularto, St. dan D. Rini Yunarti. 2010. *Konflik di Balik Proklamasi, BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sularto, St., Ed. 2001. *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sulastomo. 2008. *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sulastri, Endang. 2017. "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang Berintegritas." Dalam *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 28, No. 1.
- Suparjan, Edy. 2019. *Pendidikan Sejarah Untuk Membentuk Karakter Bangsa*. Sleman: Deepublish.
- Suriadi. 2018. "Partisipasi Perempuan Perspektif dalam Politik Islam dan gender." Dalam *Jurnal a l-Ulum*, Vol. 18, No. 1.
- Suwarno, P.J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwito. 2014. "Membangun Integritas Bangsa di Kalangan Pemuda

- Untuk Menangkal radikalisme.” Dalam Jurnal Civis, Vol. 4, No. 2.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tjiptabudy, J. 2010. “Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi.” Dalam Jurnal SASI, Vol. 16. No. 3.
- Uchrowi, Zaim. 2012. *Karakter Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2010. “Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia,” Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14, No. 2.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Utama, Andre. *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/7y9wn/>
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*, Terj., Samsuddin Berlian. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahyun, Andik Muqoyyidin. 2013. “Wacana Kesetiaan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam.” Dalam Jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 2.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2018. *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan*. Depok: Prenadamedia Group.
- Widodo, Agung. 2018. “Perlindungan Hak Azasi Manusia Melalui Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian.” Dalam Jurnal Lex Et Sociaties, Vol. 6, No. 3.
- Wieringa, Saskia E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
- Wijaya, Komang I. Wisnu Budi. 2018. Revitalisasi Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk Membentuk Generasi Emas 2045 Bermoral Pancasila.” Dalam Prosiding Nasional. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/PN/article/view/27>.
- Wirawan, Sarlinto. 2012. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alfabet.
- Yanto, Dwi. 2016. “Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai



- Pandangan Hidup Sehari-Hari.” Dalam Jurnal Ittihad, Vol. 14. No. 25.
- Yasin, Fatah A. 2018. “Wanita Karir dan Problem Pendidikan Anak.” Dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 3, No. 2.
- Yukesti, Tetty. 2015. *51 Perempuan Pencerah Dunia*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Yuliana, Ratna. 2015. “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Menengah di Kabupaten Sukoharjo.” Dalam Jurnal Studi Politik dan pemerintahan, Vol. 4, No. 3.



**B**uku ini mencoba menghubungkan pendidikan kesetaraan gender sebagai satu paket yang integral dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Amanat kesetaraan gender sejalan dengan amanat Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Isu gender merupakan isu kemanusiaan yang harus dituntaskan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan isu-isu perlindungan dunia lainnya. Ketika pendidikan kesetaraan gender menguat, maka manusia Indonesia akan lebih kuat tingkat toleransi dan kolaborasinya dalam menyongsong persoalan global yang lain.

Setiap topik pembahasan dalam buku ini disajikan secara komprehensif, kritis, dan mendorong cara berpikir kritis terhadap nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan keseharian yang nyata. Alur diskusi yang disajikan dalam buku ini diawali dengan wacana tentang historis-visioner Pancasila secara mendalam, kemudian mengalir kepada sistem pengetahuan Pancasila, sistem keterampilan Pancasila, dan diakhiri dengan penguatan wacana tentang sistem sikap Pancasila. Setiap bab dilengkapi dengan pertanyaan reflektif yang diorientasikan untuk menguatkan pemahaman dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan perspektif gender yang kritis. Dengan demikian, pembentukan karakter mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia akan memiliki profil lulusan yang berkarakter humanis-berakhlakul karimah, cakap sebagai warganegara, serta memiliki tanggung jawab kebangsaan yang berkeadilan gender.

Diterbitkan Atas Kerjasama:

